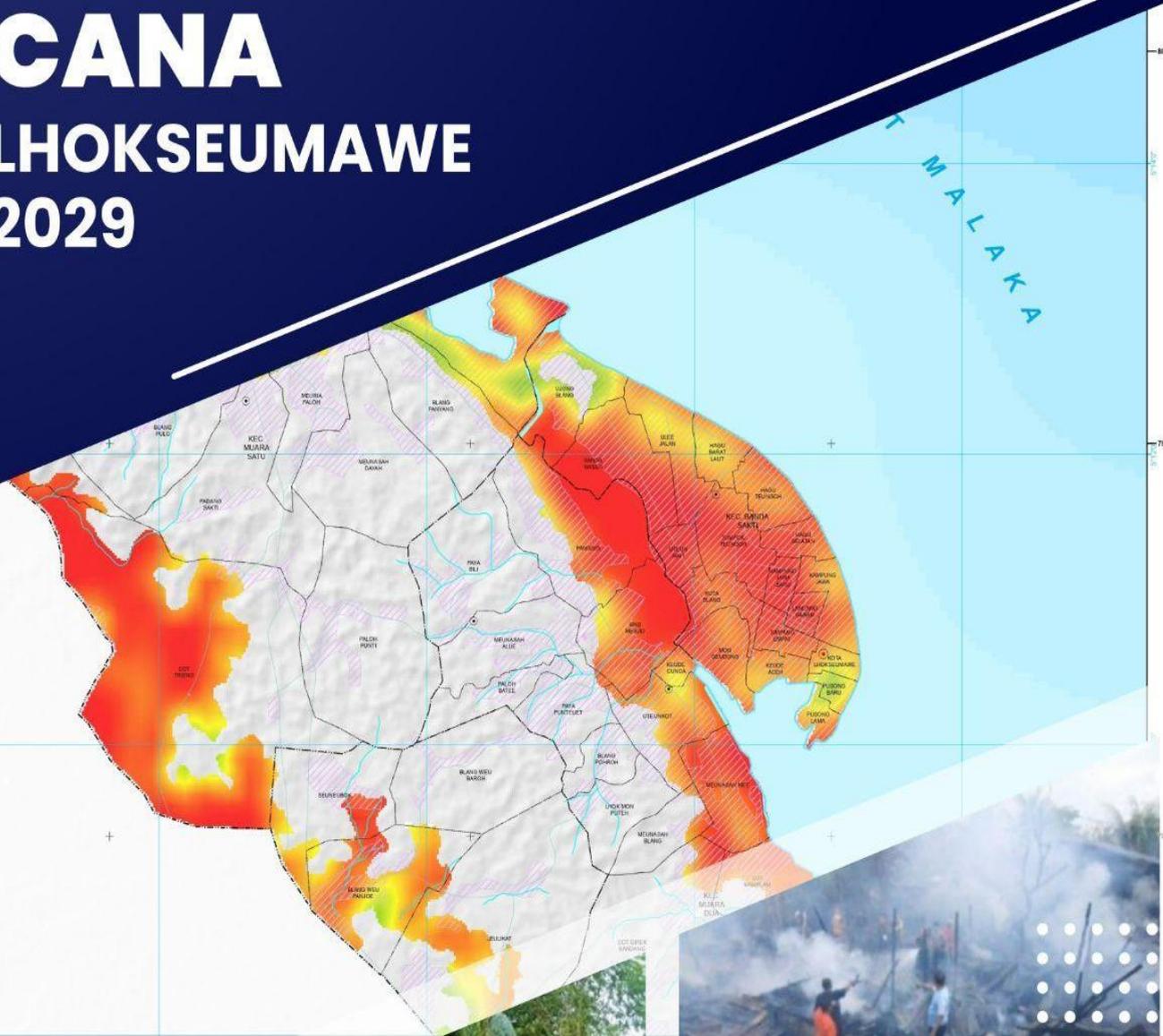
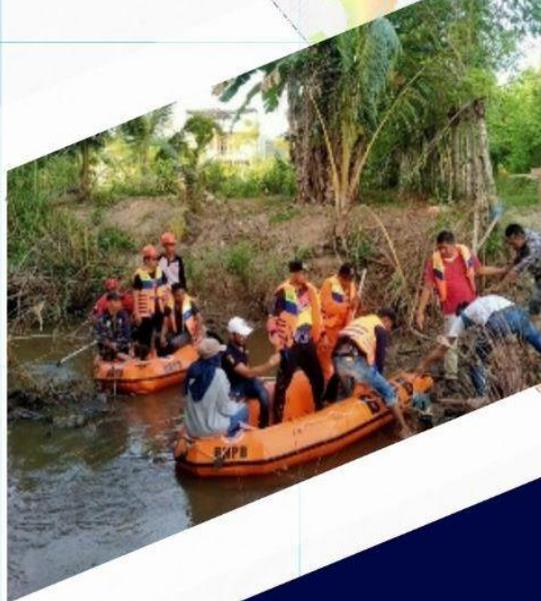




# RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LHOKSEUMAWE 2025-2029



KABUPATEN



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah perencanaan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Amanat ini ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara sistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan.

RPB dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode lima tahun. Melalui RPB, diharapkan setiap langkah penanggulangan bencana, dari pencegahan hingga pemulihan, dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dan didukung oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi upaya konkrit yang dilaksanakan pemerintah untuk mensinergiskan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan daerah Kota Lhokseumawe. Pada saat ini penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan reaktif, sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang terintegrasi sehingga penanggulangan bencana bersifat komprehensif. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD atau OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe merasa perlu mempersiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar dan juga upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJM Kota Lhokseumawe. Aksi-aksi penanggulangan bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe. RPB juga menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multi hazard, tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di provinsi Aceh dan termasuk salah satu wilayah rawan terhadap bencana. Identifikasi kewilayahan adalah salah satu tahapan yang sangat diperlukan untuk mengetahui kekhasan daerah, seperti administrasi wilayah, kekhasan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah, DAS, dan faktor lain yang berpengaruh seperti keterkaitan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi sehingga memudahkan pengambilan tindakan untuk upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Identifikasi kewilayahan tersebut antara lain berkaitan dengan geografis, topografi, demografi, dan iklim dan lain-lain.

2.1.1 Letak Administratif Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54"-05°18" Lintang utara dan 96°20"-97°21" Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter di atas permukaan laut, disebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 105 di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181.06 Km<sup>2</sup> atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56.12 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57.80 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah sangat berkaitan dengan kepentingan analisis wilayah terpapar terhadap suatu bencana dalam pengkajian risiko bencana di Lhokseumawe, baik dari segi luas wilayah berpotensi rawan bencana serta dampak yang akan ditimbulkan. Potensi luasan bencana yang terjadi pada suatu daerah dihasilkan berdasarkan hasil kajian yang mengacu pada metodologi pengkajian risiko bencana sesuai dengan kondisi daerah.

Dari hasil analisis kecenderungan bencana dan FGD dengan tim Substantif Penyusunan RPB Kota Lhokseumawe Terkait dengan bencana prioritas maka terdapat 5 jenis bencana yang perlu menjadi fokus prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe. Yaitu : (1). Banjir (2). Karhutla (3). Cuaca Ekstrim (4). Gelombang Pasang dan Abrasi (5). Tanah Longsor.

Masalah pokok merujuk pada masalah-masalah mendasar yang menjadi akar permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam analisis risiko bencana, masalah pokok ini terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor-faktor kerentanan yang meningkatkan risiko bencana. Ini berarti faktor yang menyebabkan dampak

yang tinggi atau langsung dari bencana, seperti penderitaan, korban jiwa, gangguan terhadap penghidupan dan kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan dalam berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup. Akar masalah, atau disebut juga masalah pokok dapat berasal dari faktor-faktor birokrasi, politik, sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup. Dalam analisis lebih lanjut, beberapa masalah pokok mungkin timbul sebagai akibat dari masalah yang lebih mendasar, yang disebut sebagai akar masalah, dan terkait dengan keberadaan beberapa atau banyak sumber bahaya atau pemicu peristiwa bencana. Masalah pokok ini diuraikan berdasarkan jenis risiko bencana, dengan pendekatan yang bersifat teknokratis dan administratif yang didasarkan pada informasi dari analisis bahaya dan kerentanan.

Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kota Lhokseumawe. Masalah utama penyebab banjir di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa hal. Pertama, penumpukan sedimen harian yang terus bertambah disebabkan oleh sampah tambak dan galian C. Hal ini mengakibatkan saluran-saluran tersumbat karena terisi oleh sedimen. Selain itu, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan terutama di selokan juga menjadi penyebab utama banjir. Kedua, turunnya permukaan tanah juga menjadi faktor yang menyebabkan banjir di Kota Lhokseumawe. Kedangkalan sungai atau Krueng Cunda juga menjadi masalah serius, karena menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, dimensi sungai yang menyempit juga memperparah situasi, karena aliran air menjadi terhambat. Ketiga, pembangunan saluran dan selokan yang lebih tinggi dari badan jalan serta pembangunan badan jalan yang lebih tinggi dari lingkungan perumahan juga menjadi salah satu sebab terjadinya banjir. Hal ini dapat menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan baik ke saluran-saluran yang ada. Faktor lain yang turut memperparah banjir di Kota Lhokseumawe adalah curah hujan tinggi, waduk penampungan yang tidak berfungsi dengan semestinya, dan pembangunan permukiman di daerah DAS yang dapat mengganggu aliran air secara alami.

Bencana cuaca ekstrim disebabkan oleh anomali cuaca, kurangnya pohon, banyaknya penebangan pohon, rumah kaca, dan banyaknya emisi gas buang dari kendaraan, pabrik, dan lainnya merupakan masalah yang signifikan di Kota Lhokseumawe. Anomali cuaca, seperti perubahan pola hujan yang ekstrim, dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya. Kurangnya pohon dan penebangan liar juga mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air dan mengurangi intensitas cuaca ekstrem. Fenomena rumah kaca dapat menyebabkan peningkatan suhu yang ekstrim di beberapa area kota, yang dapat memicu cuaca panas yang berlebihan. Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan, pabrik, dan industri lainnya juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dapat memperparah cuaca ekstrem. Masalah pokok yang menyebabkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, pembuangan sampah ke laut merupakan permasalahan serius yang mengganggu

ekosistem laut dan mempengaruhi pola arus laut. Sampah-sampah ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran air dan meningkatkan risiko gelombang ekstrim dan abrasi di pantai. Kedua, fenomena pasang purnama juga berkontribusi terhadap terjadinya gelombang ekstrim di wilayah pesisir. Pasang purnama meningkatkan tinggi permukaan air laut, yang dapat menyebabkan abrasi pantai yang lebih parah. Selain itu, pengikisan bibir pantai juga merupakan masalah utama yang dapat memicu abrasi. Pengikisan ini bisa dipicu oleh gelombang yang tinggi dan kuat, yang diperparah oleh kurangnya tanaman pencegah atau penahan abrasi di sekitar pantai. Terakhir, pembangunan liar di pinggir pantai juga memperburuk masalah abrasi. Pembangunan ini dapat mengganggu aliran air dan pola sedimentasi alami, yang meningkatkan risiko abrasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk melindungi pantai dan lingkungan pesisir dari kerusakan yang lebih lanjut.

Masalah pokok yang menyebabkan bencana longsor di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, praktik galian C yang tidak sesuai aturan menjadi penyebab utama longsor. Galian C yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan dapat melemahkan struktur tanah dan menyebabkan longsor. Kedua, penebangan pohon sembarangan juga berkontribusi terhadap terjadinya longsor. Pohon-pohon yang menjadi penahan tanah dapat mengurangi risiko longsor, namun jika ditebang tanpa perencanaan yang baik, maka stabilitas tanah dapat terganggu. Selain itu, pembukaan lahan baru tanpa perencanaan yang matang juga dapat meningkatkan risiko longsor. Pembukaan lahan baru cenderung mengubah tata guna lahan yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Faktor cuaca juga berperan penting dalam terjadinya longsor, terutama curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air, yang pada gilirannya dapat memicu longsor. Terakhir, banyaknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan juga menjadi faktor penyebab longsor. Alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan karakteristik tanah dan topografi dapat meningkatkan risiko longsor di wilayah tersebut.

Penyebab bencana kekeringan di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, musim kemarau panjang menjadi penyebab utama kekeringan. Kurangnya curah hujan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air secara signifikan. Kedua, kurangnya air tanah dikarenakan banyaknya pemakaian sumur bor juga menjadi faktor yang memperburuk kekeringan. Penggunaan sumur bor yang berlebihan dapat menguras sumber air tanah dan menyebabkan penurunan permukaan air tanah. Selain itu, anomali cuaca seperti El Niño juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekeringan. Perubahan pola cuaca yang tidak normal dapat mengakibatkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara, yang berdampak pada kekeringan. Kurangnya embung sebagai sarana penyimpanan air juga memperburuk kondisi kekeringan. Embung yang berfungsi untuk menampung air hujan dalam jumlah besar dapat membantu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

Kota Lhokseumawe, dengan posisinya yang berdekatan dengan sesar Sumatera dan sesar lokal yang masih dalam penelitian, rentan terhadap gempa bumi. Saat terjadi gempa, terutama di daerah seperti Banda Sakti, kondisi tanah yang tidak solid dapat menyebabkan likuifaksi, di mana tanah berubah menjadi cairan akibat getaran gempa. Selain itu, karena dikelilingi oleh lautan, Kota Lhokseumawe juga berpotensi terkena dampak tsunami jika terjadi gempa bumi di dasar laut. Faktor lain yang meningkatkan risiko adalah pembangunan yang kurang memperhatikan mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Pembangunan yang tidak memperhatikan mitigasi dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana.

Penyusunan program dan fokus prioritas penanggulangan bencana dilakukan dengan memadukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ada 3 (tiga) sasaran utama RPB dalam pembangunan tingkat Kabupaten yaitu: (1). Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, karena RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari rencana pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan legalitas agar menjadi sebuah panduan teknokratik bagi daerah. Ketetapan hukum ini dapat mengikat seluruh instansi perangkat daerah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai. (2) Dokumen RPB menjamin anggaran penanggulangan Bencana di Kota Lhokseumawe tertampung dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. (3). Menjadikan dokumen RPB sebagai acuan bagi para pihak dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan kebencanaan baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pascabencana.

Rencana Aksi ini disusun dengan mengacu pada isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kota Lhokseumawe. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Aksi menggambarkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang secara komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Lhokseumawe.

## DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe maka disajikan daftar istilah kata-kata sebagai berikut:

1. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. walaupun abrasi dapat disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
2. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
4. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
5. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar, terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.

11. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
13. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
14. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
15. Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
16. Kapasitas (*capacity*) adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
17. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
18. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
19. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
20. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
21. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.

22. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
23. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
26. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
27. Mitigasi fisik (*structural mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
28. Mitigasi non-fisik (*non structural mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
29. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
30. Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
31. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
32. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

34. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
35. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
36. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
37. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
38. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
39. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
40. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
41. Risiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
43. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
44. Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

45. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, Penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
46. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak).

## DAFTAR SINGKATAN

Guna memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe, berikut daftar singkatan yang disajikan dalam dokumen ini, yaitu:

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	: Dana Siap Pakai
KRB	: Kajian Risiko Bencana
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PMI	: Palang Merah Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
R3P	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD PRB	: Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN PRB	: Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
Renas PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RenOps	: Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	: Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	: Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
RPKB	: Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

**DAFTAR ISI**

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISTILAH .....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Kerangka Pikir .....	3
1.4 Kedudukan Dokumen .....	6
1.4.1 Kedudukan RPB .....	6
1.4.2 Jangka Waktu dan Tanggung gugat .....	7
1.5 Landasan Hukum .....	8
1.6 Ruang Lingkup .....	10
<b>BAB II Karakteristik dan Isu Strategis Bencana Daerah .....</b>	<b>11</b>
2.1 Gambaran Umum Wilayah .....	11
2.1.1 Letak Administratif .....	11
2.1.2 Kondisi Demografis .....	12
2.1.3 Kondisi Geografis .....	13
2.1.4 Kondisi Hidrologi, Klimatologi, & Geologi.....	14
2.1.5 Lingkungan Hidup .....	17
2.1.6 Penggunaan Lahan .....	20
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah .....	20
2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah .....	24
2.2.1 Banjir .....	24
2.2.2 Cuaca Ekstrim .....	25
2.2.3 Gelombang Pasang dan Abrasi .....	25
2.2.4 Gempa Bumi .....	25
2.2.5 Kebakaran Hutan dan Lahan .....	26
2.2.6 Kekeringan .....	26
2.2.7 Longsor .....	26
2.2.8 Tsunami .....	27
2.2.9 Kegagalan Teknologi .....	27
2.2.10 Covid-19 .....	27
2.2.11 Likuifaksi .....	27

2.3	Risiko Bencana Kota Lhokseumawe .....	28
2.3.1	Pengkajian Bahaya .....	28
2.3.2	Pengkajian Kerentanan .....	31
2.3.3	Pengkajian Kapasitas .....	36
2.3.4	Pengkajian Risiko Bencana .....	38
2.4	Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani .....	48
2.4.1	Sejarah Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe .....	48
2.4.2	Analisis Kecenderungan Bencana .....	51
2.5	Masalah Pokok .....	53
2.5.1	Masalah Pokok Berdasarkan Faktor Keterpaparan dan Kerentanan Bencana .....	54
2.5.2	Masalah Pokok Berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah .....	57
2.5.3	Masalah Pokok Karena Aspek Politis Daerah (Sinkronisasi dengan RPA dan Visi Misi Kepala Daerah .....	60
2.6	Rumusan Isu Strategis .....	61
BAB III	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	63
3.1	Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional .....	63
3.1.1	Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RPB) 2020-2044 .	63
3.1.2	Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024 .....	66
3.1.3	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB)7 2025-2029 .....	67
3.2	Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah .....	68
3.2.1	RPB Aceh 2023-2026 .....	68
3.2.2	Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 .....	72
3.2.3	RPK Lhokseumawe 2023-2026 .....	72
3.3	Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	74
3.3.1	Kerangka Kerja Pra Bencana .....	74
3.3.2	Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana) .....	76
3.3.3	Kerangka Kerja Pascabencana (Pemulihan) .....	77
3.4	Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	91
3.4.1	Mekanisme Penganggaran dan Pendanaan .....	91
3.4.2	Penggunaan Dana .....	92
BAB IV	Tujuan, Sasaran, Strategi Arah Kebijakan dan Program .....	98
4.1	Tujuan dan Sasaran .....	99
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan .....	105
4.3	Program Kebencanaan .....	113
BAB V	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana .....	126
BAB VI	Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi .....	129

6.1	Pemaduan Para Pihak .....	129
6.2	Pemaduan ke Perencanaan Lainnya .....	136
6.3	Pengendalian dan Evaluasi .....	171
BAB VII	Penutup .....	173
DAFTAR PUSTAKA	.....	174

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Isi Rencana Penanggulangan Bencana .....	4
Gambar 1.2	Alur Sistem Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana .....	7
Gambar 1.3	Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan .....	8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Lhokseumawe .....	11
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe .....	13
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe .....	15
Gambar 2.4	Curah Hujan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 .....	15
Gambar 2.5	Kelembaban Udara Kota Lhokseumawe Tahun 2022 .....	16
Gambar 2.6	Suhu Udara Lhokseumawe Tahun 2022 .....	16
Gambar 2.7	Peta Geologi Kota Lhokseumawe .....	17
Gambar 2.8	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha) .....	20
Gambar 2.9	Peta Risiko Multi Bencana Kota Lhokseumawe .....	39
Gambar 2.10	Peta Risiko Banjir Kota Lhokseumawe .....	40
Gambar 2.11	Peta Risiko Cuaca Ekstrim Kota Lhokseumawe .....	41
Gambar 2.12	Peta Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Lhokseumawe .	42
Gambar 2.13	Peta Risiko Gempa Bumi Kota Lhokseumawe .....	43
Gambar 2.14	Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Lhokseumawe .....	44
Gambar 2.15	Peta Risiko Kekeringan Kota Lhokseumawe .....	45
Gambar 2.16	Peta Risiko Tanah Longsor Kota Lhokseumawe .....	46
Gambar 2.17	Peta Risiko Tsunami Kota Lhokseumawe .....	47
Gambar 2.18	Grafik Kecenderungan Bencana Kota Lhokseumawe 2014-2023	51
Gambar 2.19	Gambar Kecenderungan Bencana Geologi Kota Lhokseumawe 1821-2023 .....	52
Gambar 2.20	Diagram Analisis IKD Kota Lhokseumawe .....	58
Gambar 6.1	Mekanisme Koordinasi tata Kerja Lintas Komponen Pentahelix ...	136

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2022 .....	12
Tabel 2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL) Tahun 2020-2022	18
Tabel 2.3	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe ...	18
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 .....	19
Tabel 2.5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe tahun 2017- 2022 .....	19
Tabel 2.6	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043	21
Tabel 2.7	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 .....	23
Tabel 2.8	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2-17-2011 (km) .....	24
Tabel 2.9	Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2022 .....	28
Tabel 2.10	Rekapitulasi Kajian bahaya Kota Lhokseumawe .....	28
Tabel 2.11	Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Lhokseumawe .....	31
Tabel 2.12	Potensi Kerugian Bencana di Kota Lhokseumawe .....	32
Tabel 2.13	Tingkat Kerentanan Kota Lhokseumawe .....	33
Tabel 2.14	Kelas Kapasitas Kota Lhokseumawe dalam Menghadapi Potensi Bencana .....	37
Tabel 2.15	Rekapitulasi Nilai IKD Kota Lhokseumawe dalam KRB Aceh .....	37
Tabel 2.16	Tingkat Risiko Bencana di Kota Lhokseumawe .....	38
Tabel 2.17	Potensi Bencana Kota Lhokseumawe .....	48
Tabel 2.18	Rekapitulasi Bencana Kota Lhokseumawe dalam kurun Waktu 10 Tahun Terakhir (2014-2023) .....	49
Tabel 2.19	Sejarah Kejadian Gempa Bumi Kurun Waktu 200 Tahun Terakhir (1821-2023) .....	49
Tabel 2.20	Analisis Kecenderungan FGD .....	52
Tabel 2.21	Identifikasi Akar Masalah Berdasarkan Faktor Keterpaparan dan Kerentanan Bencana .....	56
Tabel 2.22	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis .....	62
Tabel 3.1	Kebijakan dan Strategi RPB 2020-2044 .....	64
Tabel 3.2	Arah dan Kebijakan RPB Aceh 2023-2026 .....	69
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan RPA 2023-2026 .....	72
Tabel 3.4	Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran .....	73
Tabel 3.5	Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana .....	79
Tabel 3.6	Peran Para Pihak di Kota Lhokseumawe dalam Kerangka Penanggulangan Bencana .....	81
Tabel 4.1	Target capaian IRBI dan IKD Kota Lhokseumawe 2025-2029.....	99
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran .....	100

Tabel 4.3	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	106
Tabel 4.4	Program Kebencanaan .....	114
Tabel 6.1	Pemaduan Peran Para Pihak Pentahelix Non Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe .....	134
Tabel 6.2	Kerangka Kerja Pemanduan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe dalam Perencanaan Lainnya .....	140
Tabel 6.3	Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana BPBD Kota Lhokseumawe .....	172

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Peta Lokasi Rencana Aksi Kegiatan RPB

Lampiran 2 Rencana Aksi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota di bagian utara Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah 181 km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan pantai Selat Malaka. Kota ini merupakan salah satu wilayah dengan potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Potensi ini disebabkan oleh kondisi geologi, geografis, topografi dan kondisi sosial di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe sendiri secara struktur geologi cukup dipengaruhi oleh kedudukannya yang berada di zona tektonik aktif patahan Lempeng Hindia Australia dan Lempeng Sunda serta patahan memanjang di sepanjang Bukit Barisan. Selain itu secara geografis posisi Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari cekungan Sumatera yang berbatasan dengan laut Selat Malaka dan didominasi topografi bergelombang di wilayah selatan yang berbatasan dengan perbukitan Aceh Utara. Kondisi ini menyebabkan Kota Lhokseumawe menjadi rawan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami serta bencana hidrometeorologi seperti gelombang ekstrim, tanah longsor, abrasi, dan banjir.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak dari bencana yang berpotensi terjadi. Berdasarkan angka kejadian bencana serta angka kerugian dan korban yang tercatat pada data Pusdatin BPBA Aceh dalam 10 tahun terakhir juga dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), angka kejadian bencana banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan atau cenderung tetap. Selain itu, potensi risiko akibat bencana di wilayah Kota Lhokseumawe juga cenderung tinggi, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerentanan, serta rendahnya tingkat kapasitas yang ada. Oleh karena itu, Kota Lhokseumawe membutuhkan sebuah perencanaan penanggulangan bencana yang matang, yang melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dapat diimplementasikan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe menjadi upaya konkrit yang dilaksanakan pemerintah untuk menyinergikan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan daerah Kota Lhokseumawe. Pada saat ini penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan reaktif, sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang terintegrasi sehingga penanggulangan bencana bersifat komprehensif. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD atau OPD dalam menyusun

dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe merasa perlu mempersiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar dan juga upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terkait penanggulangan bencana. Dokumen RPB Kota Lhokseumawe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPB Nasional, Rencana Pembangunan Aceh (RPA), RPB Provinsi Aceh dan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Kota Lhokseumawe. Selain itu, dokumen RPB juga harus terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan agar kinerja antar lembaga dan instansi pemangku kepentingan yang ada terkoordinasi dan terpadu dengan baik dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah.

Dokumen RPK Kota Lhokseumawe yang berlaku saat ini akan habis masanya pada tahun 2026 mendatang oleh karena itu dokumen RPB Kota Lhokseumawe, harus diselaraskan dengan dokumen RPK Kota Lhokseumawe yang masih berlaku. Dokumen RPB Kota Lhokseumawe harus menjadi masukan bagi penyusunan RPK Kota Lhokseumawe selanjutnya, sehingga program pembangunan daerah dapat berbasis pada pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul.

RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun non-pemerintah. Dalam posisi ini, RPB diharapkan harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, penyediaan sumber daya, serta rencana aksi bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kota Lhokseumawe. Proses penyusunan RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari tingkat Provinsi hingga daerah, baik Pemerintah maupun non-pemerintah (Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, Dunia Usaha, dan Lembaga lainnya). RPB ini disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam merencanakan pembangunan dan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini, dimaksudkan untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe. Dokumen ini menjadi

pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana ; pra bencana, saat bencana dan pascabencana.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah:

1. Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang menyinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

### 1.3 Kerangka Pikir

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bentuk Peraturan Walikota sesuai kewenangannya. RPB merupakan dokumen induk penanggulangan bencana Kota Lhokseumawe.

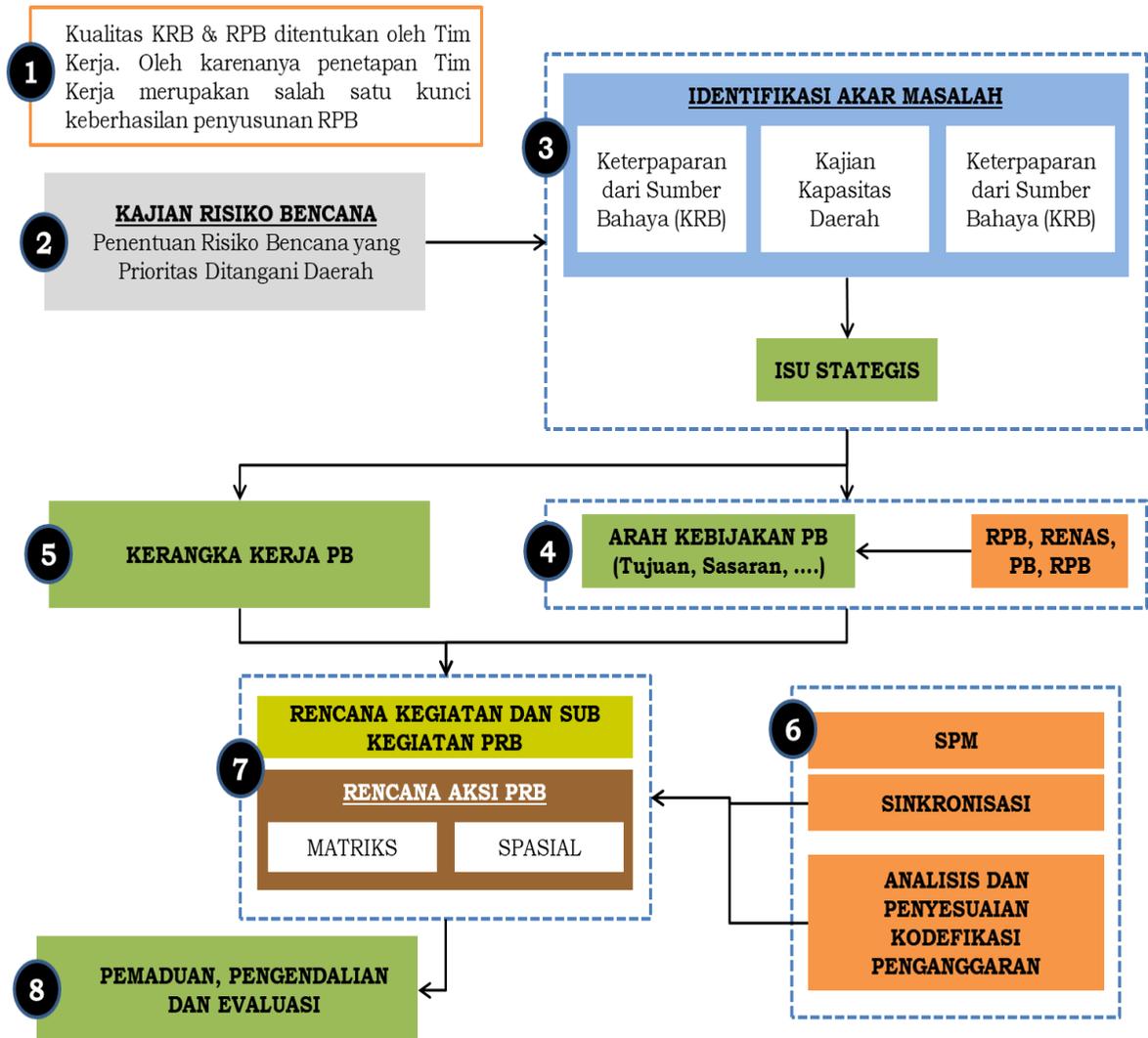
Sesuai dengan perintah UU muatan RPB menjadi muatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam paradigma baru penanggulangan bencana, RPB bukan hanya menitik beratkan pada penyelenggaraan risiko bencana dan pengurangan risiko bencana tetapi lebih menonjolkan sisi *Disaster Risk Management* secara menyeluruh. RPB dengan perspektif *Disaster Risk Management* akan memberi kesempatan daerah untuk meminimalisir ancaman dan gangguan dimana Penanggulangan Bencana akan menyumbang dengan memberikan jaminan dalam pembangunan.

Banyak hal yang dapat ditonjolkan dengan menguatkan kapasitas dan mengelola aspek kerentanan yang sebelumnya belum banyak kita sentuh. Hal ini memberi peluang pada kepentingan daerah untuk dapat menysasar kepentingan-kepentingan daerah. RPB Kota Lhokseumawe menyeimbangkan program pra, saat dan pasca bencana. Rencana Penanggulangan Bencana mempunyai masa berlaku 5 tahun, tetapi dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) Tahun.

Penyusunan dokumen RPB dilaksanakan melalui 8 tahapan, yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan mekanisme swakelola atau kontraktual. Sebagai koordinator, BPBD perlu membentuk tim kerja sebagai langkah awal penyusunan dokumen RPB. Tim kerja ini terdiri dari penulis, fasilitator, dan tim teknis yang terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait. Adapun BPBD itu sendiri juga merupakan bagian dari tim kerja, tepatnya sebagai bagian

dari sekretariat yang menjadi panitia pelaksana dan pengawas kegiatan. Tim kerja penyusunan dokumen RPB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Secara garis besar kerangka isi Rencana Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Isi Rencana Penanggulangan Bencana  
Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPPB, 2023

Penyusunan dokumen RPB didasarkan pada pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan di Kota Lhokseumawe. Penyusunan dokumen dimulai dengan menentukan prioritas bencana yang ditangani, dan mengidentifikasi berbagai masalah pokok baik dari aspek keterpaparan dari bahaya (KRB), aspek kapasitas daerah, maupun masalah pokok RPK lalu diterjemahkan ke dalam isu strategis yang dapat menjadi arahan bagi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir penyusunan RPB berikut.

Selanjutnya, tim teknis dari tim kerja mulai menyusun rencana aksi berdasarkan nomenklatur kegiatan dengan berpedoman pada kerangka kerja yang telah disusun sebelumnya. Rencana aksi disusun sebagai pedoman rencana kegiatan penanggulangan bencana perangkat daerah selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan SPM, laporan kinerja, serta kode penganggaran yang

tersedia. Selain menentukan bentuk kegiatan, tim kerja juga perlu menentukan mekanisme pemaduan, pengendalian, dan evaluasi yang akan dilakukan sebagai langkah konkrit monitoring pelaksana RPB. Segala rancangan tersebut dituang ke dalam dokumen RPB berdasarkan pedoman susunan yang sinergis.

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan di Kota Lhokseumawe. Penyusunan dokumen dimulai dengan menentukan prioritas bencana yang ditangani, dan mengidentifikasi berbagai masalah pokok baik dari aspek keterpaparan dari bahaya (KRB), aspek kapasitas daerah, maupun masalah pokok RPK lalu diterjemahkan ke dalam isu strategis yang dapat menjadi arahan bagi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir penyusunan RPB berikut.

Untuk menjamin adanya keselarasan analisis rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di nasional, provinsi dan daerah, maka perlu diperhatikan beberapa konsepsi dasar berikut ini:

- Kerangka yang merupakan batang tubuh dan substansi RPB suatu daerah adalah berbasis KRB. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan daerah.
- Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan baik oleh pemerintah pusat dan daerah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada Rencana Pembangunan Daerah.
- Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode sistem perencanaan daerah. RPB Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan kelompok-kelompok strateginya, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah.
- Seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah. Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam

pembagian urusan wajib pelayanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya, untuk mencapai harmonisasi dan keterpaduan, strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada Kota Lhokseumawe serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disingkat RPJMD) maupun kebijakan daerah lainnya. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pengawasan yang tepat dalam penyelenggaraan proses penyusunan dokumen, serta proses penyelenggaraan rencana aksi penanggulangan bencana merupakan komponen penting dari formasi fungsi tindak lanjut dokumen RPB. Ini akan menjadi terukur dan bermanfaat sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) perangkat daerah yang berdampak dalam penilaian kinerja baik IKU, IKD, IKM, dan juga SAKIP.

## **1.4 Kedudukan Dokumen**

### **1.4.1 Kedudukan RPB**

Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan. RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPK Kota Lhokseumawe. Aksi-aksi penanggulangan bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe.
2. RPB menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multi *hazard*, tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB, sebagaimana digambarkan di bawah ini:

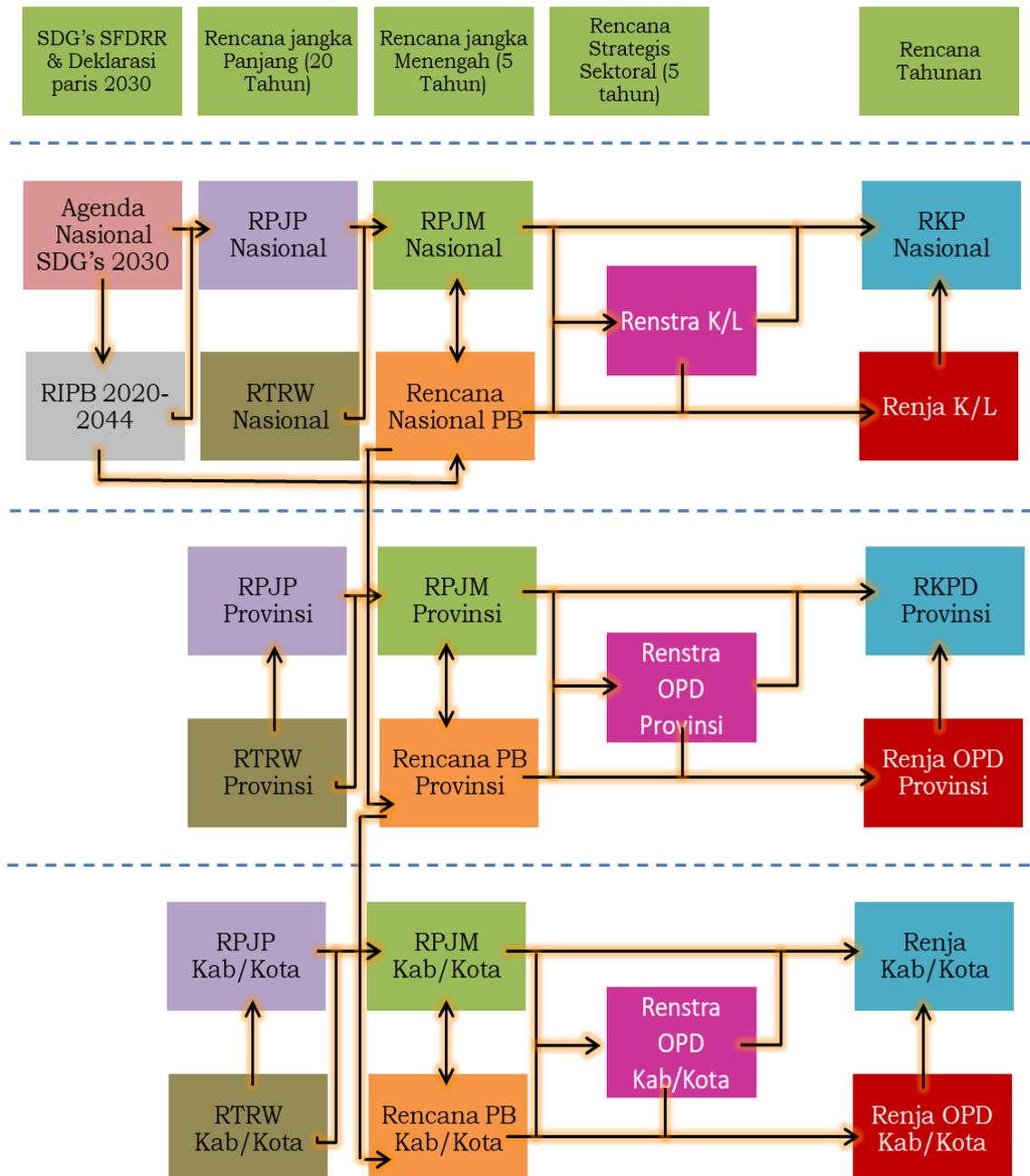


Gambar 1.2. Alur Sistem Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana  
 Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2021

#### 1.4.2 Jangka Waktu dan Tanggung Gugat

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe dilaksanakan pada tahun 2025-2029 dan menyesuaikan dengan RPK Kota Lhokseumawe periode 2023-2026, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban gugatan dan tanggung gugat dalam pelaksanaan RPB Kota Lhokseumawe ada pada Pemerintah Kota Lhokseumawe beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan Kota Lhokseumawe, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB mengacu kepada induk perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Provinsi Aceh serta Rencana Pembangunan Kota (RPK) Kota Lhokseumawe. Pada sisi lain RPB juga mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan  
 Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPP,2021

### 1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.

- Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024;
- 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032; dan
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

### **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Dokumen RPB Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Lingkup Risiko Bencana

Jenis-jenis bahaya/ancaman bencana di Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.

2. Lingkup Jenis Rencana Aksi

Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun.

3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi

Rencana aksi dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, serta lembaga/instansi kemasyarakatan lainnya.

## BAB II

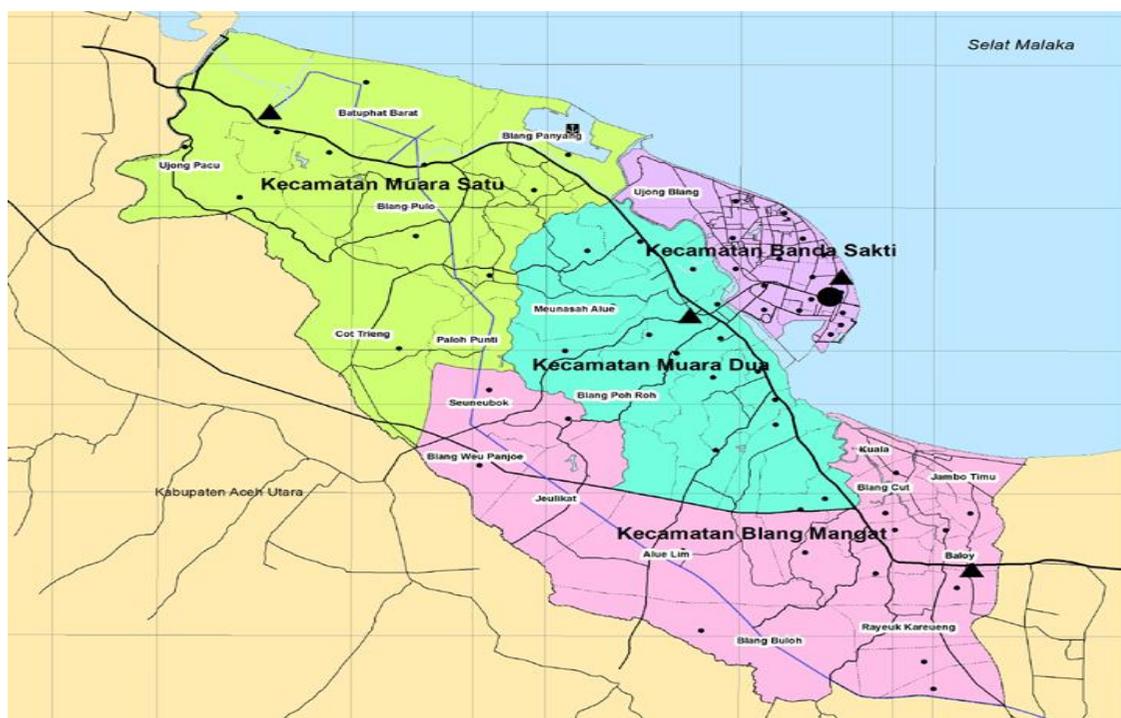
### KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS BENCANA DAERAH

#### 2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu dari 5 kota di provinsi Aceh dan termasuk salah satu wilayah rawan terhadap bencana. Identifikasi kewilayahan adalah salah satu tahapan yang sangat diperlukan untuk mengetahui kekhasan daerah, seperti administrasi wilayah, kekhasan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah, DAS, dan faktor lain yang berpengaruh seperti keterkaitan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi sehingga memudahkan pengambilan tindakan untuk upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Identifikasi kewilayahan tersebut antara lain berkaitan dengan geografis, topografi, demografi, dan iklim dan lain-lain.

##### 2.1.1 Letak Administratif

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181.06 Km<sup>2</sup> atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56.12 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57.80 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km<sup>2</sup>. Kota Lhokseumawe memiliki 9 Kemukiman dengan 68 Gampong. Besarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe wilayah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara); Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

### 2.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2005-2022 mengalami tren peningkatan. Jumlah Penduduk Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 189.941 jiwa dan tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 191.396 jiwa. Berdasarkan proporsi sebaran penduduk per wilayah, pada tahun 2022, kecamatan dengan jumlah penduduk tumbuh sebesar 0,71 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk menjadi sebesar 1,42 persen dan tahun 2022 melambat menjadi 0,77 persen. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Blang Mangat sebesar 1,63 persen dan Kecamatan Banda Sakti dengan pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 0.35 persen. Laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran dan migrasi.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk
		2021	2022	
1	Banda Sakti	77.985	78.256	0.35
2	Muara Dua	51.472	52.097	1.18
3	Blang Mangat	26.559	26.992	1.63
4	Muara Satu	33.925	34.069	0.35
<b>Lhokseumawe</b>		<b>189.941</b>	<b>191.396</b>	<b>0.77</b>

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2022 dan 2023

Angka Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe masih diatas rata-rata Aceh, dimana pertumbuhan penduduk Aceh tahun 2021 sebesar 0,69 persen dan pada tahun 2022 melambat menjadi 0,60 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan Kota Lhokseumawe juga masih di atas rata-rata nasional untuk tahun 2021 berada pada angka 1,22 persen dan di bawah rata-rata nasional pada tahun 2022 melambat menjadi 1,17 persen. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk tersebut diantaranya angka kematian dan angka kelahiran penduduk.

Lhokseumawe memiliki luas wilayah sebesar 181.09 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.057 jiwa/km<sup>2</sup>. Terdapat disparitas persebaran penduduk yang cukup tinggi antara wilayah kecamatan di Lhokseumawe yang dilihat dari perbandingan persentase penduduk dan luas wilayah. Wilayah perkotaan yang memiliki luas wilayah lebih kecil memiliki rasio kepadatan penduduk tinggi, sedangkan pada kecamatan yang luas wilayahnya besar memiliki rasio kepadatan penduduk lebih rendah.

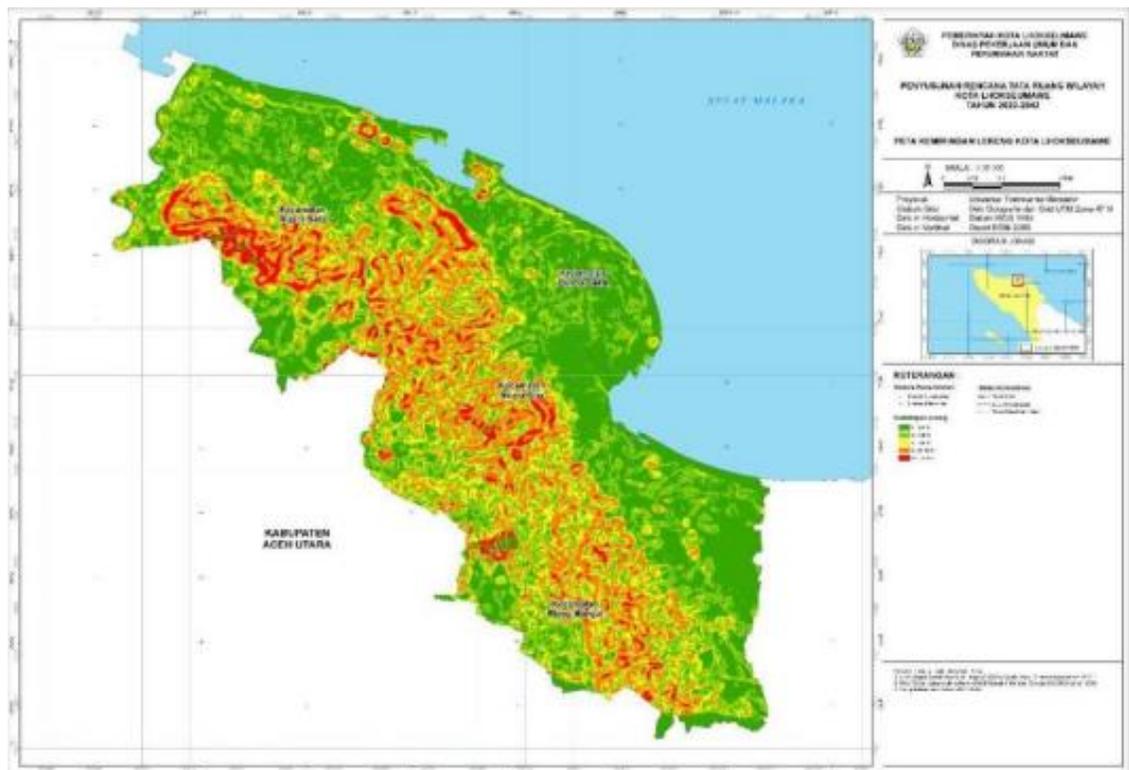
Dari data jumlah penduduk tersebut, diprediksi besaran angka potensi jiwa terpapar berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dengan memperhatikan wilayah rentan. Kerentanan wilayah yang tinggi membuat semakin besar potensi terhadap jiwa terpapar akibat terjadinya bencana. Selain itu, kependudukan berperan penting dalam potensi kejadian bencana.

Hal ini dapat dipicu karena pola hidup yang menyimpang dari kelestarian alam. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut dapat memicu potensi bencana banjir, kebakaran hutan lahan, serta tanah longsor. Pada dasarnya setiap bencana yang terjadi disebabkan oleh kondisi daerah yang rentan serta kondisi manusianya.

### 2.1.3 Kondisi Geografis

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20'–97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter di atas permukaan laut, di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 105 di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 di atas permukaan laut.

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 mdpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan. Ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

#### **2.1.4 Kondisi Hidrologi, Klimatologi, & Geologi**

##### a. Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

##### *Air Tanah*

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara.

##### *Sungai*

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) *Krueng Geukeuh* dan *Krueng Pase*. Cakupan DAS *Krueng Geukeuh* meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS *Krueng Pase* meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

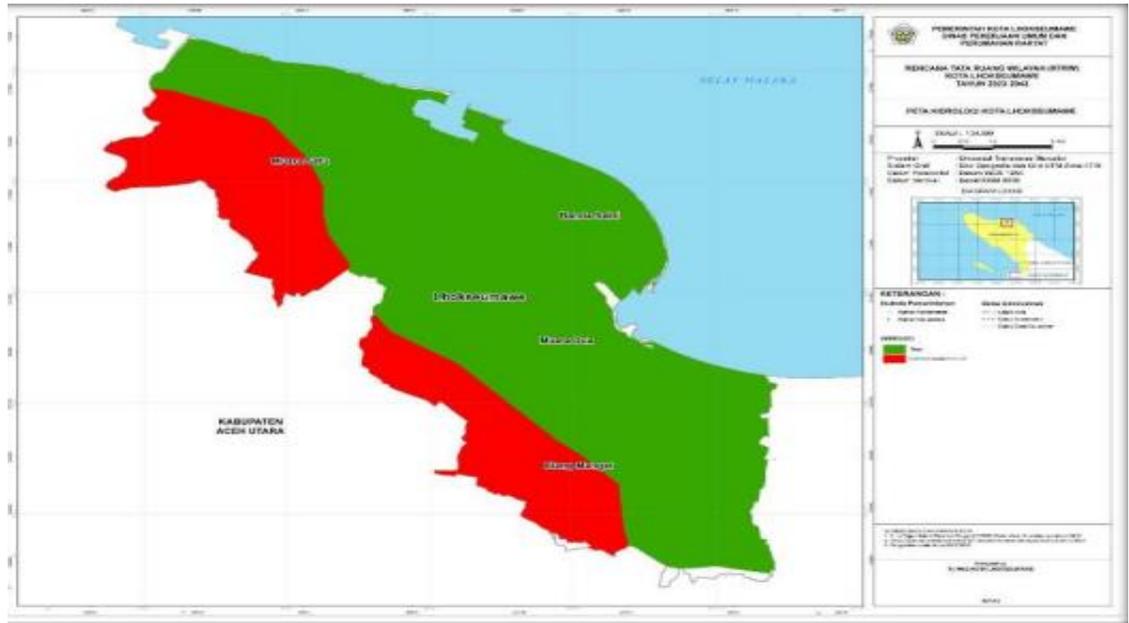
##### *Waduk*

Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, waduk *Jeulikat*, *Seuneubok*, *Paya Itek*, *Lhok Kuaci*, *Mane Kareung* dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

##### *Cekungan Air Tanah*

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air

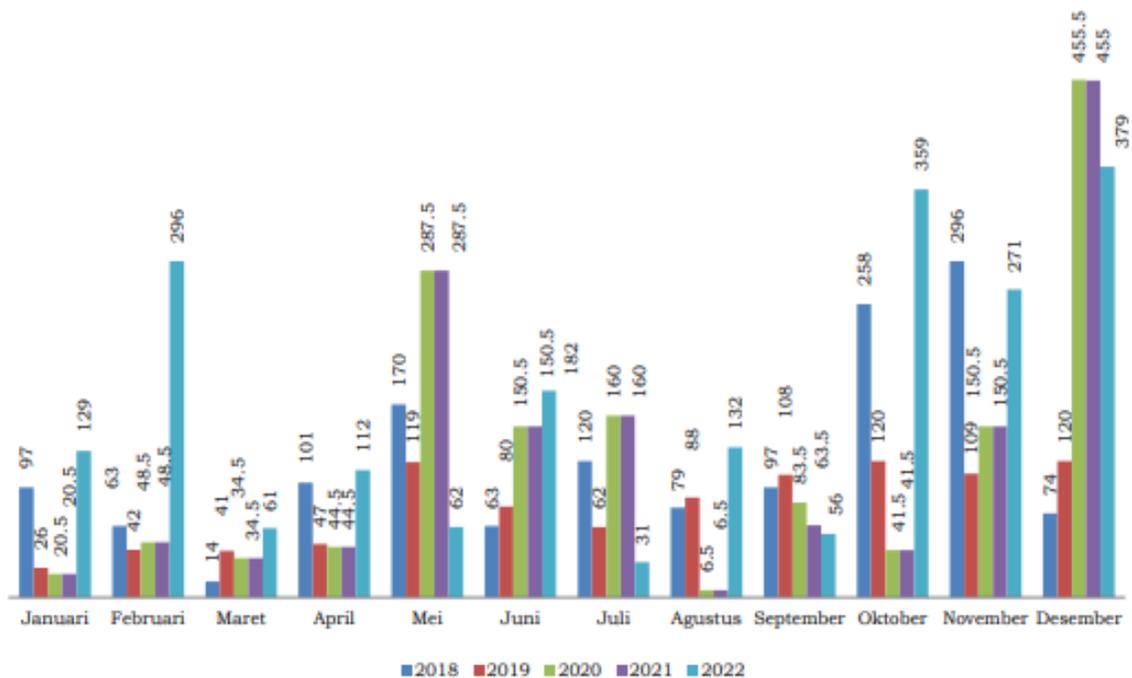
Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireuen seluas 1.38 Ha dan Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.



Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe  
 Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

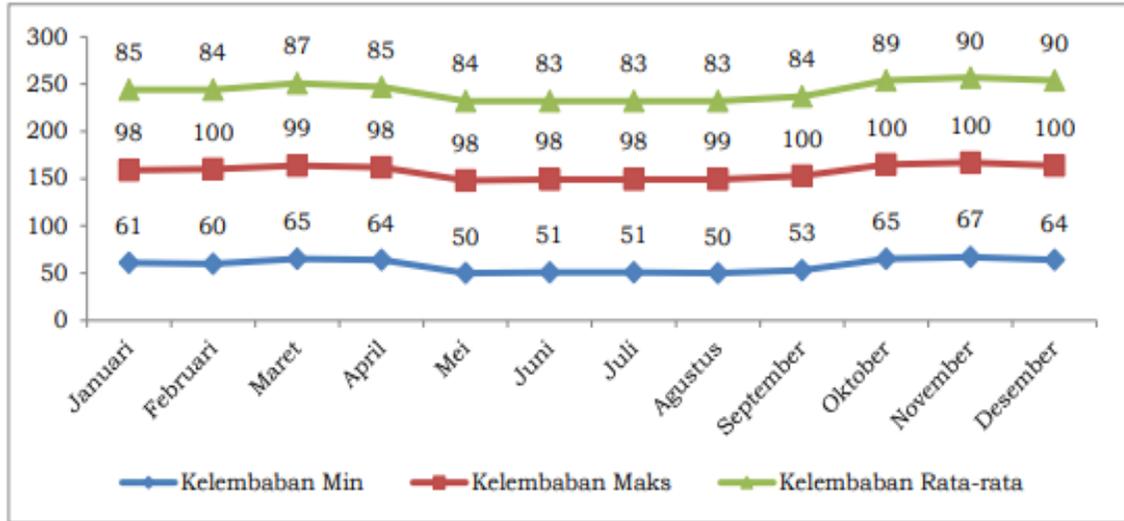
b. Klimatologi

Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 23°C hingga 32°C dan jarang di bawah 22°C atau di atas 33°C. Curah hujan di Kota Lhokseumawe membentuk grafik yang cekung di bagian tengah (bulan tengah tahun). Setiap tahunnya curah tertinggi berada di bulan yang relatif berbeda. Tahun 2018 berada di bulan November, tahun 2019 berada di bulan Oktober dan Desember, tahun 2020 berada di bulan Desember, tahun 2021 berada di bulan Desember dan tahun 2022 berada di bulan Desember.



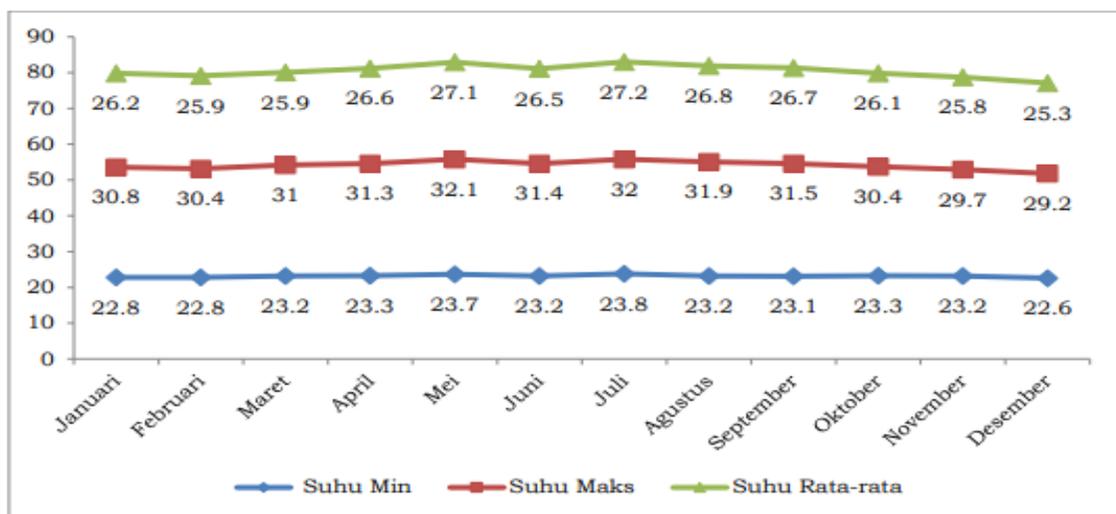
Gambar 2.4 Curah Hujan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022  
 Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023

Rata-rata kelembaban udara Lhokseumawe berkisar 83% sampai dengan 90%. Kelembaban rata-rata pada tahun 2022 berkisar antara 83% sampai 90%. Kelembaban tertinggi pada satu tahun terakhir adalah 100% yang terjadi di bulan februari, September, Oktober, November dan Desember. Kelembaban terendah adalah 50% terjadi di bulan Mei dan Agustus.



Gambar 2.5 Kelembaban Udara Kota Lhokseumawe Tahun 2022  
 Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023

Lama penyinaran matahari di Kota Lhokseumawe berkisar 32.0-79.3 persen. Rata-rata kecepatan angin per jam di Kota Lhokseumawe mengalami variasi musiman kecil sepanjang tahun. Masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 4,5 bulan, dari 28 September sampai 13 Februari, dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 8,7 kilometer per jam. Bulan paling berangin dalam setahun di Kota Lhokseumawe adalah Desember, dengan kecepatan angin rata-rata per jam 10,3 kilometer per jam. Masa angin lebih tenang dalam setahun berlangsung selama 7,5 bulan, dari 13 Februari sampai 28 September. Bulan paling tidak berangin dalam setahun di Kota Lhokseumawe adalah Juni, dengan kecepatan angin rata-rata per jam 6,9 kilometer per jam.



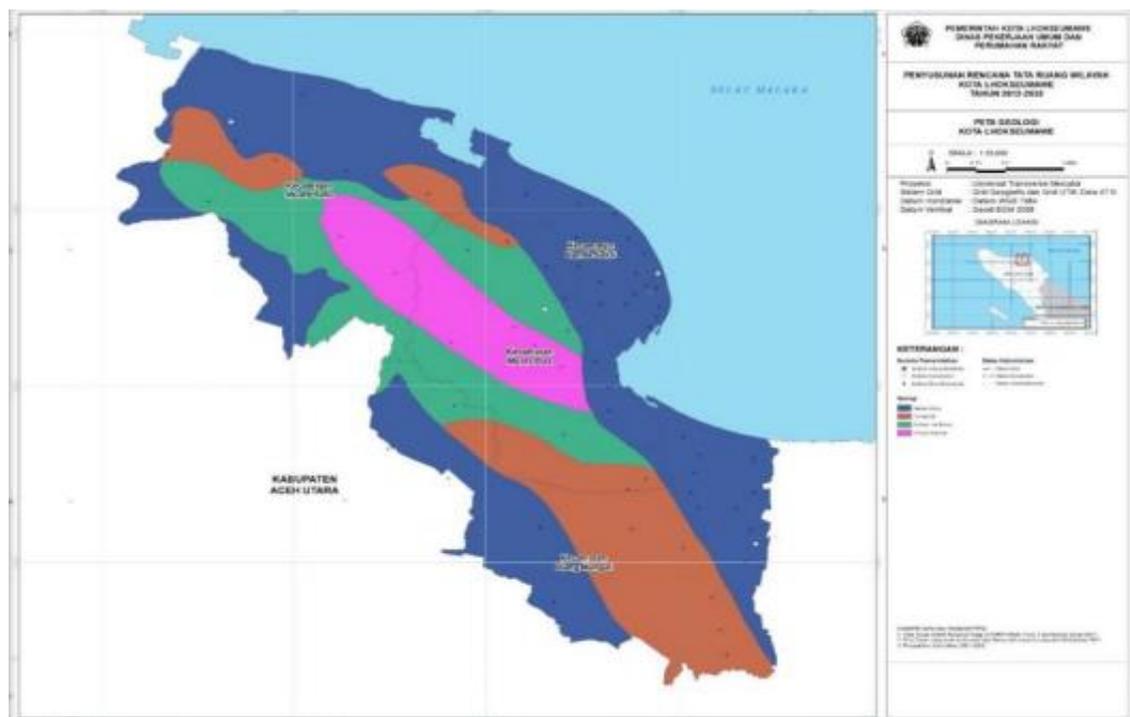
Gambar 2.6 Suhu Udara Lhokseumawe Tahun 2022  
 Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2023

Suhu udara rata-rata pada tahun 2022 berkisar 25.3 C sampai 27.2 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei yang mencapai 32.1 C dan Suhu terendah pada bulan Desember sebesar 22.6 C. Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih serius dalam mengelola lingkungan dan mengambil langkah konkret untuk perubahan iklim ini.

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh batuan Aluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julu Rayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatile berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

Sebaran Formasi Julu Rayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung lignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batu pasir gunung api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.



Gambar 2.7 Peta Geologi Kota Lhokseumawe  
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

### 2.1.5 Lingkungan Hidup

a. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur

berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO<sub>3</sub>-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Tabel 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2022

Tahun	IKU	IKA	IKL	IKLH
2020	86.36		29.06	41.34
2021	90.80	58.33	22.82	63.7
2022	91.2	55.00	22.48	62.54

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2023

Dari tabel di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 62.54 pada predikat sedang, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 91.20, Indeks Kualitas Air sebesar 55.00 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22.48 dengan predikat waspada.

b. Ruang Terbuka Hijau

Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Adapun Ketersediaan RTH publik Kota Lhokseumawe dalam RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043 adalah seluas 2.594 Ha atau 14.32% dari luas wilayah Kota Lhokseumawe yaitu seluas 18.106 Ha.

c. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan dari 75.80% menjadi 86.25% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penanganan sampah mengalami sedikit penurunan menjadi 81.13%. Pada tahun 2017 jumlah sampah yang tertangani sebesar 75.80% atau 24.572 ton sampah dari total timbulan sampah sebanyak 32.419 ton. Dan pada tahun 2022 jumlah sampah tertangani 81.13% atau 28.470 ton sampah dari 35.091 jumlah timbulan sampah.

Tabel 2.3 Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sampah yang tertangani	24.572	24.572	25.604	27.396	29.672	28.470

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Total jumlah timbulan sampah di Kota (ton)	32.419	32.419	33.067	33.729	34.403	35.091
<b>Persentase</b>		<b>75,80</b>	<b>75,80</b>	<b>77,43</b>	<b>81,22</b>	<b>86,25</b>	<b>81,13</b>

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2023

- d. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2017 terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan. Pada tahun 2017 persentase penduduk berakses air minum sebesar 12,57%, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 sebesar 22,57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk berakses air minum	25.012	31.651	35.452	36.969	38.648	43.192
2	Jumlah penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	189.941	191.396
<b>Persentase</b>		<b>12,57</b>	<b>15,57</b>	<b>17,11</b>	<b>19,59</b>	<b>20,35</b>	<b>22,57</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

Tabel 2.5 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

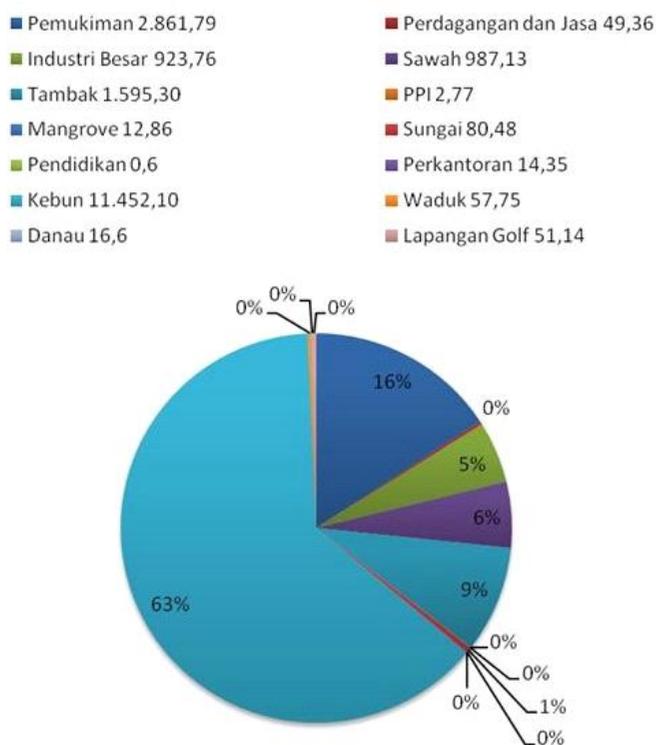
No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	29.052	29,565	31,651	32,709	34,969	39.563
2	Jumlah rumah tinggal	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827	55.661
<b>Persentase</b>		<b>67,05</b>	<b>68,23</b>	<b>73,04</b>	<b>75,49</b>	<b>67,47</b>	<b>71,08</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun 2017-2020 terus terjadi penambahan. Pada tahun 2017 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 29.052 rumah atau sebesar 67.05% dan pada tahun 2020 menjadi 32.709 rumah atau 75.49%, pada tahun 2021 terjadi persentase rumah tinggal berakses sanitasi menurun menjadi 67.47% dikarenakan bertambahnya jumlah rumah tinggal maupun jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dan pada tahun 2022 persentase rumah tinggal berakses sanitasi meningkat menjadi 71.08%.

### 2.1.6 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km<sup>2</sup> dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budidaya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.



Gambar 2.8 Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)  
 Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2023

### 2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

#### a. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial,

budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu: zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup: zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata; zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, pemukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa; zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat. zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman. zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi di sekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW

Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya”. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043, luas kawasan lindung sebesar 3.218,15 Ha (24.05%) dan kawasan budidaya sebesar 10.164,65 Ha (75.95%). Luas Pola Ruang secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

<b>Kawasan Lindung</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	356.09	Badan Jalan	374.9
Kawasan Lindung Sempadan Sungai		Kawasan Campuran	620.35
Kawasan Lindung kawasan sekitar danau/waduk	-	Kawasan Pariwisata	-
Kawasan Lindung Sempadan Rel Kereta Api		Kawasan Perikanan	847.7
Kawasan Ruang Terbuka Hijau	2594	Kawasan Perkebunan Rakyat	1,645
Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Banda Sakti	13.72	Kawasan Permukiman	4,016
Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Blang Mangat	20.39	Kawasan Pertanian	927.09

<b>Kawasan Lindung</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Muara Satu	16.53	Kawasan Peruntukan Industri	1043
Kawasan Ekosistem Mangrove Kecamatan Muara Dua	49.12	Kawasan Transportasi	5.48
Badan Air	168.3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	512.2
		Kawasan Perkantoran	77.04
		Kawasan Pertanian dan Keamanan	95.46
		Pergudangan	1.23
<b>Jumlah</b>	<b>3218.15</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10,165.45</b>

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

Pola ruang yang diuraikan pada tabel di atas menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRW.

Hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019, tercatat bahwa berdasarkan tingkat kualitas RTRW Kota Lhokseumawe, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRW Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai sebesar 56.32 dan dinyatakan buruk. Hal ini dibandingkan dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus revisinya RTRW Kota Lhokseumawe tahun 2013-2033.

#### *Pantai*

Kerusakan pantai sampai saat ini terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur serta gelombang pasang purnama. Kondisi tersebut semakin parah akibat hutan mangrove telah musnah sepanjang pantai. Panjang pantai Kota Lhokseumawe dalam kondisi kritis periode 2017-2022 sepanjang 6,06 km. Sejauh ini pembangunan tanggul dan pemecah ombak merupakan satu-satunya cara yang diambil dalam mengurangi dampak abrasi. Untuk menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan fisik saja, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

*Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

Permukiman layak huni merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, yang mampu menumbuhkan keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, dan tidak termasuk permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 2.7 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	35.518	35.518	35.610	35.678	35.858	38.962
2	Jumlah rumah tinggal	Unit	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827	55.661
Persentase Rumah Layak Huni		%	81,97	81,97	82,18	82,34	69,19	70.00
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	198.980	203.284	207.202	188.713	189.941	191.396
Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk		rasio	0,18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19
Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin		Unit	92	-	72	22	55	63

*Sumber: Dinas PUPR, 2023 dan diolah*

Luas permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 mengacu pada Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe sebesar 81.3 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 78.46 ha pada tahun 2022.

*Kondisi Jalan*

Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412,468 Km dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini. Secara garis besar total persentase panjang jalan Kota Lhokseumawe dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan persentase jalan dalam keadaan mantap, dari 58,13 persen pada tahun 2017 dengan panjang jalan kota 412.468 km menjadi 69,52 persen di tahun 2023. Sementara itu, persentase jalan kota dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan provinsi

yaitu 84.4 persen dan juga masih dibawah kondisi jalan mantap nasional sebesar 98,65 persen.

Tabel 2.8 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2022 (km)

Tahun	Jalan Kota				Jalan Provinsi			
	Panjang Jalan seluruh	Kondisi Mantap			Panjang Jalan seluruh	Kondisi Mantap		
		Baik	Sedang	%		Baik	Sedang	%
2017	412,468	108,190	131,577	58,13	1.781,72	823,43	306,08	63.39
2018	412,468	108,190	131,577	58,13	1.781,72	870,79	324,14	67.07
2019	412,468	171,297	106,994	67.47	1.781,72	1.297,35	72,03	76.86
2020	412,468	171,297	106,994	67.47	1.781,72	1.321,82	92,14	79.36
2021	412,468	171,297	106,994	67.47	1.781,72	1.157,10	206,83	76.55
2022	412,468	279.983	37,493	76,97	1.781,72	1.391.21	112,72	84.41
2023	412,468	258,494	28,254	69,52				

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan diolah

## 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Berdasarkan data KRB Aceh 2022-2026, sub bagian Kota Lhokseumawe memiliki risiko bahaya banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi, karhutla, kekeringan, kegagalan teknologi covid-19 dan likuifaksi. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan resiliensi yang masif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Kota Lhokseumawe diturunkan menjadi kategori rendah.

### 2.2.1 Banjir

Banjir merupakan masalah serius yang sering terjadi di Kota Lhokseumawe. Sebagai kota pesisir yang berada di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe rentan terhadap banjir karena faktor geografisnya yang merupakan dataran landai yang berdekatan dengan laut, juga dipengaruhi oleh kondisi Daerah Aliran Sungai yang masuk ke dalam wilayah Kota Lhokseumawe, diantaranya DAS Krueng Geukeuh dan DAS Krueng Pase.

Sejarah kejadian banjir di kota ini telah terjadi secara berulang, terutama saat musim hujan tiba. Faktor penyebab utama banjir di Kota Lhokseumawe antara lain curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang kurang baik, serta tingginya intensitas pembangunan tanpa pertimbangan mitigasi bencana yang memadai. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022, wilayah terdampak Banjir di Kota Lhokseumawe meliputi Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu dengan total luas wilayah terdampak 6,784.38 Ha.

### **2.2.2 Cuaca Ekstrim**

Dalam definisi lokal di Kota Lhokseumawe, yang dimaksud cuaca ekstrim tidak hanya berupa angin puting beliung saja, tetapi juga petir, atau angin kencang yang bertiup dalam waktu singkat. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya cuaca ekstrim adalah koefisien keterbukaan (terkait peta penggunaan lahan), dikombinasikan dengan 'perbukitan' (kelas lereng) dan peta curah hujan tahunan. Perubahan pola cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur. Seiring dengan perubahan iklim global, intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim semakin meningkat, meningkatkan risiko bencana di wilayah ini. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022, wilayah terdampak cuaca ekstrim di Kota Lhokseumawe meliputi Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu dengan total luas wilayah terdampak 13,914.45 Ha.

### **2.2.3 Gelombang Pasang dan Abrasi**

Gelombang pasang dan abrasi menjadi masalah serius di Kota Lhokseumawe, dikarenakan minimnya tutupan vegetasi di wilayah pesisir serta tidak banyak penanaman mangrove dilakukan di sepanjang pesisir. Gelombang pasang yang tinggi dapat menyebabkan banjir rob di daerah pesisir, merusak bangunan, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, abrasi pantai juga menjadi ancaman serius, terutama bagi pemukiman yang berada di pinggir pantai. Akibat abrasi, sebagian wilayah pantai menjadi semakin tergerus, mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang tinggal di sana. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022, kecamatan terdampak gelombang pasang dan abrasi adalah Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu dengan kelas tinggi, sedangkan Kecamatan Muara Dua masuk ke dalam kelas sedang, untuk total wilayah terdampak gelombang pasang dan abrasi adalah 136.44 Ha.

### **2.2.4 Gempa Bumi**

Gempa bumi menjadi salah satu ancaman di Kota Lhokseumawe karena wilayah ini terletak di zona seismik yang aktif. Sejarah telah mencatat beberapa kejadian gempa bumi yang signifikan, termasuk gempa besar pada tahun 2004 yang mengakibatkan tsunami dahsyat turut berdampak di Kota Lhokseumawe. Menurut KRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 total wilayah berpotensi terdampak gempa di Kota Lhokseumawe mencapai 13,937.04 (Ha), dengan tiga kecamatan masuk ke dalam kelas sedang yaitu Kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Dua, sedangkan Kecamatan Muara Satu masuk ke dalam potensi rendah.

### **2.2.5 Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh perubahan iklim global yang menghasilkan kekeringan yang berkepanjangan. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe, disebabkan oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian, bukan karena faktor alam. Di Kota Lhokseumawe tidak ada lahan perkebunan milik industri, melainkan lahan perkebunan milik warga. Dengan demikian, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Lhokseumawe tidak dikategorikan ke dalam kebakaran hutan, melainkan kebakaran lahan. Kejadian kebakaran lahan yang kerap terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh warga yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar rumput di sekitar lahan. Api yang membakar rerumputan menjadi lebih besar dan tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya mengganggu masyarakat sekitar lahan tersebut.

Dikutip dari KRB Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022, total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah Kota Lhokseumawe yang berpotensi terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah 855.18 Ha, melingkupi dua Kecamatan yaitu Blang Mangat dan Muara Satu.

### **2.2.6 Kekeringan**

Kekeringan adalah fenomena alam yang dipicu oleh fluktuasi iklim yang signifikan. Kondisi kekeringan berkembang secara bertahap, dengan masa kekeringan berlangsung hingga tiba musim hujan, dan memiliki dampak yang meluas dan merambah ke berbagai sektor (RBI, BNPB). Seluruh Kecamatan di Kota Lhokseumawe masuk ke dalam potensi rendah untuk ancaman kekeringan, dengan luas total wilayah yang berpotensi bencana kekeringan adalah 13.397 Ha.

### **2.2.7 Longsor**

Tanah longsor, juga dikenal sebagai gerakan tanah, adalah fenomena alam yang dipengaruhi oleh faktor geologi, tingkat curah hujan, dan pola penggunaan lahan di lereng. Di Kota Lhokseumawe, tanah longsor sering terjadi karena topografi yang didominasi oleh tebing tinggi dan lereng curam. Kondisi ini diperparah oleh minimnya vegetasi yang dapat mengikat tanah di daerah perbukitan. Kebiasaan masyarakat membangun rumah di bawah tebing yang tidak tertutup vegetasi juga menjadi faktor utama dalam terjadinya tanah longsor, yang dapat menyebabkan kerugian material maupun korban jiwa. Menurut dokumen KRB tahun 2017-2022 wilayah Kota Lhokseumawe yang memiliki potensi bahaya longsor mencakup 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua dengan kelas Rendah serta Kecamatan Muara Satu dengan kelas rendah.

### **2.2.8 Tsunami**

Tsunami adalah jenis bencana yang tergolong dalam fast-onset disaster, yang artinya proses terjadinya bencana ini sangat cepat. Tsunami merupakan ancaman serius bagi banyak wilayah pesisir di Indonesia, termasuk Kota Lhokseumawe yang berada di wilayah pesisir. Bencana ini biasanya dipicu oleh gempa bumi di dasar laut yang mengakibatkan pergeseran vertikal yang kuat. Analisis ancaman tsunami bertujuan untuk memahami karakteristik tsunami yang mungkin terjadi atau sedang terjadi, dengan mempertimbangkan sumber gempa, lokasi, pergerakan gelombang, dan tinggi gelombang tsunami. Berdasarkan KRB Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022, seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe memiliki potensi bencana tsunami meski hanya dengan kategori sedang.

### **2.2.9 Kegagalan Teknologi**

Bahaya kegagalan teknologi di Kota Lhokseumawe terdiri dari parameter jenis industri dan bahaya bencana alam (tsunami dan gempa bumi). Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing. Potensi kegagalan teknologi tergolong cukup tinggi dikarenakan Lhokseumawe masuk dalam kategori wilayah KEK.

### **2.2.10 Covid-19**

Kota Lhokseumawe ikut mengalami penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Penularan Covid-19 di Kota Lhokseumawe melalui orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19.

### **2.2.11 Likuifaksi**

Likuifaksi adalah fenomena geologi di mana tanah yang jenuh air mengalami perubahan mendadak menjadi kondisi yang mirip dengan cairan, sering kali terjadi selama gempa bumi atau getaran lainnya. Untuk Lhokseumawe, kota yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia, laporan mengenai lokasi spesifik likuifaksi biasanya terkait dengan daerah yang memiliki tanah berpasir dan kondisi tanah yang jenuh air.

Secara umum, daerah dengan potensi likuifaksi tinggi di Lhokseumawe bisa ditemukan di kawasan pesisir dan delta sungai, yaitu area yang memiliki tanah berpasir dan jenuh air yang lebih rentan terhadap likuifaksi, serta di kawasan yang pernah terkena gempa: area yang mengalami gempa bumi

besar sebelumnya bisa memiliki potensi likuifaksi yang tinggi, tergantung pada kondisi tanah dan struktur geologisnya.

### 2.3 Risiko Bencana Kota Lhokseumawe

Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018- 2022 berada pada kelas risiko sedang, namun pada tahun 2022 Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe naik dari 130.11 menjadi 132.70. Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2022

No.	Tahun	Nilai IRB	Kategori
1	2015	175,20	Tinggi
2	2016	142,77	Sedang
3	2017	136,92	Sedang
4	2018	130,11	Sedang
5	2019	130,11	Sedang
6	2020	130,11	Sedang
7	2021	130,11	Sedang
8	2022	128,61	Sedang

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, 2023

#### 2.3.1 Pengkajian Bahaya

Hasil rekapitulasi kelas indeks bahaya mengacu pada Kajian Risiko Bencana Aceh (KRB) Aceh 2022-2026, menunjukkan bencana di Kota Lhokseumawe berada pada kelas tinggi, sedang dan rendah. Bencana dengan kelas bahaya tinggi yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, tanah longsor dan tsunami, bencana pada kategori sedang yaitu kekeringan, covid 19 dan likuifaksi, Sementara bencana pada kategori kelas rendah adalah, gempa bumi, karhutla dan kegagalan teknologi. Pengkajian bahaya tersebut dilakukan hingga tingkat desa di Kota Lhokseumawe. Rekapitulasi hasil kajian bahaya tingkat desa menghasilkan kajian bahaya tingkat kecamatan.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Kajian Bahaya Kota Lhokseumawe

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)			Total (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	110	2.857	4.093	7.060	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	6.774	3.494	7.838	18.106	Tinggi
3	Gelombang ekstrim dan Abrasi	0	0	634	634	Tinggi
4	Gempa Bumi	15.927	2.179	0	18.106	Rendah
5	Karhutla	6.928	813	0	7.740	Rendah

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)			Total (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
6	Kekeringan	0	18.106	0	18.106	Sedang
7	Tanah Longsor	299	322	2.389	3.010	Tinggi
8	Tsunami	657	586	1.191	2.434	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	398	0	0	398	Rendah
10	Covid 1-19	13.909	4.197	0	18.106	Sedang
11	Likuifaksi	0	16.055	745	16.799	Sedang

*Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe*

Hasil kajian bahaya dan luas bahaya di Kota Lhokseumawe dipaparkan sebagai berikut:

a. Banjir

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya berada pada kelas bahaya tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya banjir adalah 7.060 Ha. 110 (ha) berada pada kelas risiko rendah, 2.857 berada pada kelas risiko sedang dan 4.093 berada pada kelas bahaya tinggi.

b. Cuaca Ekstrim

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya cuaca ekstrim adalah 18.106 Ha. 6.774 Ha berada pada kelas bahaya rendah, 3.494 ha berada pada kelas bahaya sedang dan 7.838 berada pada kelas bahaya tinggi.

c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya cuaca ekstrim adalah 634 ha. Tidak ada kelas bahaya rendah, tidak ada kelas bahaya sedang, namun seluar 634 ha berada pada kelas bahaya tinggi.

d. Gempa Bumi

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya rendah untuk bahaya gempa bumi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya gempa bumi adalah 18.106 ha dengan rincian 15.927 berada pada kelas risiko rendah, 2.179 ha berada pada kelas bahaya sedang dan tidak ada kelas bahaya tinggi.

e. Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Lhokseumawe. Karhutla memiliki

kelas risiko rendah dengan rincian 6.928 ha berada pada kelas bahaya rendah, 813 ha berada pada kelas risiko sedang dan tidak ada kelas bahaya yang berisiko tinggi.

f. Kekeringan

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya kekeringan yang ada di Kota Lhokseumawe. Kekeringan memiliki kelas bahaya sedang, dengan rincian tidak ada yang berada pada kelas risiko rendah, 18.106 ha berada pada kelas risiko sedang dan tidak ada yang berada pada kelas risiko tinggi.

g. Tanah Longsor

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor yang ada di Kota Lhokseumawe. Tanah longsor memiliki kelas bahaya tinggi dengan rincian 299 ha berada pada kelas risiko rendah, 322 ha berada pada kelas risiko sedang dan 2.389 ha berada pada kelas risiko tinggi.

h. Tsunami

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya dan kelas bahaya tsunami tinggi di Kota Lhokseumawe. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya tsunami adalah 2.434 Ha. Adapun rinciannya 657 Ha berada pada kelas bahaya rendah, 568 ha berada pada kelas bahaya sedang, dan 1.191 ha berada pada kelas bahaya tinggi.

i. Kegagalan teknologi

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya kegagalan teknologi berada pada kelas bahaya tinggi. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya kegagalan teknologi adalah 398 Ha. 398 (ha) berada pada kelas risiko rendah, tidak ada kelas risiko sedang dan tinggi.

j. Covid -19

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya Covid -19 berada pada kelas bahaya sedang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya Covid-19 adalah 18.106 Ha. 13.909 (ha) berada pada kelas risiko rendah, 4. 197 ha berada pada kelas risiko sedang dan tidak ada kelas risiko tinggi.

k. Likuifaksi

Tabel diatas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya Likuifaksi berada pada kelas bahaya sedang. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya Likuifaksi adalah 16.799 (ha). Tidaka ada kelas risiko rendah, 16.055 ha berada pada kelas risiko sedang dan 745 ha berada pada kelas risiko tinggi.

### 2.3.2 Pengkajian Kerentanan

Pengkajian kerentanan dilakukan dengan menganalisis kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terdapat 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Pada di bawah ini menunjukkan bahwa kelas kerentanan Kota Lhokseumawe adalah sedang. Adapun hasil kajian kerentanan untuk seluruh potensi bencana tingkat kecamatan di Kota Lhokseumawe dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Lhokseumawe

No.	Jenis Bahaya	Jumlah Penduduk Terdampar (Jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	99.844	10.498	10.008	427	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	190.902	20.091	19.245	813	Sedang
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	11.564	1.193	1.055	46	Sedang
4	Gempa Bumi	190.903	20.091	19.245	813	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	190.903	20.091	19.245	813	Sedang
7	Tanah Longsor	6.566	692	680	30	Sedang
8	Tsunami	41.321	4.323	3.981	183	Sedang
9	Kegagalan Teknologi	-	-	-	-	-
10	Covid-19	190.903	20.091	19.245	813	Sedang
11	Likuifaksi	186.517	19.616	18.758	793	Sedang
Kota Lhokseumawe		1.109.423	116,686	111.462	4.731	

*Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe*

Hasil analisis Kajian Risiko Bencana Aceh 2022-2026 didapat analisis Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Lhokseumawe. Jumlah penduduk terpapar untuk keseluruhan bencana adalah 1.109.423 jiwa, Penduduk Umur rentan 116.686 jiwa, Penduduk Miskin 111.462 jiwa dan penduduk disabilitas 4.731 jiwa. Penduduk yang terpapar bencana banjir 99.844. 190.902 jiwa 11.564, 190.903, Kekeringan 190.903, Tanah Longsor 6.566, Jumlah penduduk yang terpapar bencana tsunami 41.321, Tidak ada penduduk yang terpapar bencana kegagalan teknologi, Jumlah penduduk yang terpapar bencana Covid-19 190.903, Jumlah penduduk terpapar bencana Likuifaksi 186.517 jiwa.

Tabel 2.12 Potensi Kerugian Bencana di Kota Lhokseumawe

No	Jenis Bahaya	Kerugian Rupiah (Juta Rupiah)			Kelas Kerugian	Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian			
1	Banjir	455.270	195.284	650.554	Tinggi	1	Rendah
2	Cuaca Ekstrim	1.618.678	29.321	1.648.000	Tinggi		
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	91.304	1.900	93.204	Sedang	-	-
4	Gempa Bumi	42.512	1.219.560	1.262.072	Tinggi	-	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.567.656	1.567.656	Rendah	-	-
6	Kekeringan	-	0	0	Rendah	1	Rendah
7	Tanah Longsor	40.008	200.726	240.734	Tinggi	-	-
8	Tsunami	172.737	15.032	187.769	Tinggi	-	-
9	Kegagalan Teknologi	-	-	-	-	-	-
10	Covid-19	-	-	-	-	-	-
11	Likuifaksi	539.806	1.441	541.247	Tinggi	1	Rendah
Kota Lhokseumawe		2.960.315	3.230.920	6.191.236			

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe

Hasil analisis Kajian Risiko Bencana Aceh, sub bagian Kota Lhokseumawe, Total kerugian akibat bencana di Kota Lhokseumawe Rp. 6.191 Triliun Rupiah, dengan potensi Kerugian Fisik akibat Bencana di Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 2.960 Triliun, kerugian ekonomi Rp. 3.230 Triliun, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

a. Potensi Kerugian Bencana Banjir

Kelas Kerugian tinggi dengan Kerugian Fisik sebesar 1,618678 Triliun Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 195,284 Miliar Rupiah dengan total kerugian sebesar 650,554 Miliar

b. Cuaca Ekstrim

Kelas Kerugian tinggi dengan Kerugian Fisik sebesar 455.27 Miliar Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 29,321 Miliar Rupiah dengan total kerugian sebesar 1,648 Triliun rupiah.

c. Gelombang Pasang dan Abrasi

Kelas Kerugian Sedang dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 91 Miliar Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 1,9 Miliar Rupiah dengan total kerugian sebesar 93,204 Miliar rupiah.

d. Gempa Bumi

Kelas Kerugian tinggi dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 42,512 Miliar Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 1,21956 Triliun Rupiah dengan total kerugian sebesar 1,262072 Triliun rupiah.

e. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kelas Kerugian rendah, tidak ada Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi sebesar 1,567656 Triliun Rupiah dengan total kerugian sebesar 1,567656 Triliun Rupiah

f. Kekeringan

Kelas Kerugian rendah, tidak ada kerugian fisik dan ekonomi.

g. Tanah Longsor

Kelas Kerugian tinggi dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 40 Miliar Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 200,726 rupiah, dengan total kerugian sebesar 240,73 Miliar rupiah

h. Tsunami

Kelas Kerugian tinggi dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 172, 737 Miliar Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 15,032 Miliar Rupiah dengan total kerugian sebesar 187,769 Miliar

i. Kegagalan teknologi

Tidak ada potensi bencana dan kerugian bencana kegagalan teknologi.

j. Covid -19

Covid-19 tidak lagi menjadi potensi bencana dan kerugian bencana

k. Likuifaksi

Kelas Kerugian tinggi dengan Kerugian Fisik sebesar Rp 939,5 Miliar Rupiah, Kerugian Ekonomi sebesar 541,247 Miliar Rupiah dengan total kerugian sebesar 541.247 Miliar rupiah.

Adapun penghitungan nilai kerentanan mayoritas berada pada kelas kerentanan Sedang. Adapun bencana yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu Banjir, Gelombang ekstrim dan Abrasi, Gempa bumi, Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, Tanah Longsor, dan tsunami. Hanya bencana Cuaca Ekstrim yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Berikut Tingkat kerentanan Kota Lhokseumawe :

Tabel 2.13 Tingkat Kerentanan Kota Lhokseumawe

No	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Banjir	sedang	tinggi	rendah	tinggi
2	Cuaca Ekstrim	sedang	tinggi	-	tinggi
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	sedang	sedang	-	sedang
4	Gempa Bumi	sedang	tinggi	-	sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	rendah	-	rendah
6	Kekeringan	sedang	rendah	rendah	sedang
7	Tanah Longsor	sedang	tinggi	-	sedang
8	Tsunami	sedang	tinggi	-	sedang

No	Jenis Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
9	Kegagalan Teknologi	-	rendah	-	rendah
10	Covid-19	sedang	-	-	rendah
11	Likuifaksi	sedang	tinggi	rendah	sedang

*Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe*

a. Banjir

Banjir memiliki jumlah penduduk terpapar 146. 518.00 jiwa. Banjir berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Pada 4 kecamatan tersebut, kelas kerentanan untuk bahaya banjir berada pada kelas kerentanan sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan banjir seperti yang ditunjukkan dalam Tabel, di Kota Lhokseumawe adalah sedang.

b. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim memiliki jumlah penduduk terpapar 38.438.00. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana cuaca ekstrim. Cuaca ekstrem berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Terdapat 3 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan sedang, yaitu kecamatan Banda Sakti, Blang Mangat, dan Muara Satu. Sementara itu pada kecamatan Muara Dua kelas kerentanan untuk bahaya cuaca ekstrim adalah tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan cuaca ekstrim seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan tinggi.

c. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Terdapat 3 kecamatan yang berada pada kelas kerentanan rendah, yaitu kecamatan Blang Mangat, Muara Satu, dan Muara Dua. Sementara itu kecamatan Banda Sakti adalah satu-satunya yang memiliki kelas kerentanan sedang untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Gelombang Ekstrem dan Abrasi memiliki jumlah penduduk terpapar 6.633.00. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan gelombang ekstrim dan abrasi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel, di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.

d. Gempa Bumi

Gempa Bumi berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Keseluruhan kecamatan yang berpotensi pada bahaya gempa bumi berada pada kelas kerentanan sedang. Gempa Bumi memiliki jumlah penduduk terpapar bencana yang sangat tinggi yaitu 195.832.00 Maka dapat

disimpulkan bahwa kelas kerentanan gempa bumi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel, di Kota Lhokseumawe adalah sedang.

e. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di 2 kecamatan di Kota Lhokseumawe, yaitu kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu. Masing-masing kecamatan memiliki kelas kerentanan yang berbeda. Kelas kerentanan sedang terdapat pada kecamatan Blang Mangat dan kelas kerentanan rendah terdapat pada kecamatan Muara Satu. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kebakaran hutan dan lahan di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.

f. Kekeringan

Kekeringan berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Hanya ada satu kecamatan yang memiliki kelas kerentanan rendah untuk bencana kekeringan yaitu kecamatan Muara Satu. Sementara itu kecamatan lainnya berada pada kelas kerentanan sedang untuk bencana kekeringan. Kekeringan memiliki jumlah penduduk terpapar bencana yang sangat tinggi yaitu 195.832.00 Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kekeringan di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.

g. Tanah Longsor

Bencana longsor berpotensi terjadi di 2 kecamatan di Kota Lhokseumawe, yaitu kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu. Masing-masing kecamatan memiliki kelas kerentanan yang berbeda. Kelas kerentanan sedang terdapat pada kecamatan Muara Satu dan kelas kerentanan rendah terdapat pada kecamatan Muara Dua. Tanah Longsor memiliki jumlah penduduk terpapar 1.386.00 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan bencana longsor di Kota Lhokseumawe adalah sedang dan rendah.

h. Tsunami

Bencana tsunami berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe dengan kelas kerentanan yang berbeda. Kelas kerentanan sedang terdapat pada kecamatan Banda Sakti dan menjadi satu-satunya kecamatan yang memiliki kelas kerentanan sedang untuk bencana tsunami. Sementara itu kelas kerentanan rendah terdapat pada kecamatan Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu. Tsunami memiliki jumlah penduduk terpapar 7.953.00 jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan bencana tsunami di Kota Lhokseumawe adalah sedang.

i. Kegagalan teknologi

Kajian kerentanan untuk bencana Kegagalan teknologi di Kota Lhokseumawe didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini

dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kegagalan teknologi. Bencana tsunami berpotensi terjadi di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe memiliki kelas kerentanan rendah. Kegagalan teknologi tidak memiliki kelas kerentanan penduduk terpapar sedang, kelas kerugian rendah, dan tidak ada kelas kerusakan lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan kegagalan teknologi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, di Kota Lhokseumawe adalah rendah.

j. Covid-19

Covid-19 memiliki kelas kerentanan penduduk terpapar sedang, tidak ada kelas kerugian, dan tidak ada kelas kerusakan lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan covid-19 seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, di Kota Lhokseumawe adalah rendah. Covid-19 tidak lagi menjadi potensi bencana dan kerugian bencana.

k. Likuifaksi

Kajian kerentanan untuk bencana likuifaksi di Kota Lhokseumawe didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana likuifaksi. Likuifaksi memiliki penduduk terpapar sedang, kelas kerugian tinggi dan kelas kerusakan lingkungan rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas kerentanan likuifaksi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel di atas, di Kota Lhokseumawe adalah sedang.

### **2.3.3 Pengkajian Kapasitas**

Pengkajian kapasitas digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, monitoring, dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki sebagai langkah untuk pengurangan risiko bencana. Kajian kapasitas dilaksanakan berdasarkan tingkat kapasitas kabupaten/kota di wilayah pemerintahannya dan pengukuran prioritas kapasitas yang dimiliki di internal pemerintahan sendiri. Pengukuran kapasitas daerah dapat dilakukan dengan perangkat inisiasi pencapaian kapasitas daerah berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan kesiapsiagaan desa/kelurahan Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.14 Kelas Kapasitas Kota Lhokseumawe dalam Menghadapi Potensi Bencana

No	Jenis Bahaya	Kapasitas		
		Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas
1	Banjir	0,40	-	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	0,40	-	Tinggi
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,40	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	0,40	-	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,40	-	Tinggi
6	Kekeringan	0,40	-	Rendah
7	Longsor	0,40	0,31	Sedang
8	Tsunami	0,40	0,37	Sedang

Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022

Pada tabel di atas memperlihatkan kelas kapasitas untuk 8 (delapan) potensi bencana Kota Lhokseumawe. Kelas kapasitas tersebut diperoleh dari penggabungan kelas kapasitas daerah yang berlaku sama untuk seluruh bencana dan kelas kesiapsiagaan yang berlaku berbeda untuk setiap bencana. Tabel tersebut diperoleh dari rekapitulasi kajian kapasitas per bencana tingkat kecamatan di Kota Lhokseumawe. Indeks kapasitas masing-masing bencana berpotensi di Kota Lhokseumawe menunjukkan tingkat ketahanan daerah yang sama dengan nilai 0,40. Akan tetapi, hanya bencana longsor dan tsunami yang memiliki nilai kelas kesiapsiagaan yaitu 0,31 dan 0,37.

Adapun dalam KRB Aceh menyebutkan bahwa nilai indeks kapasitas Kota Lhokseumawe berada dalam tingkat rendah dengan bobot 0,21. Ini selaras dengan nilai IKD aceh yang berbobot 0,28. Berikut rinciannya:

Tabel 2.15 Rekapitulasi Nilai IKD Kota Lhokseumawe dalam KRB Aceh

Penilaian	Nilai
Nilai IKD Kota Lhokseumawe	0,21
Skor IKD Kota Lhokseumawe	0,18
Nilai IKD Provinsi Aceh	0,28
Skor Provinsi Aceh	0,23
Indeks Kapasitas	0,198
Kelas	Rendah

Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe

Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe telah dilakukan beberapa bentuk preventif bencana longsor dan tsunami. Ditinjau dari kelas kapasitas, bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan berada dalam kategori kelas tinggi, sedangkan kekeringan berada dalam kategori rendah. Bencana lainnya berupa gempa bumi, longsor, dan tsunami berada dalam tingkat kelas kapasitas sedang.

Dari rekapitulasi kelas kapasitas di kecamatan-kecamatan tersebut telah diperoleh kelas kapasitas yaitu rendah dan sedang. Kota Lhokseumawe membutuhkan langkah-langkah strategis dan sistematis terkait kegiatan pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas daerah. Kelas kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh jenis bahaya di Kota Lhokseumawe. Penilaian kapasitas tersebut ditentukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan SKPD dan instansi terkait di Kota Lhokseumawe.

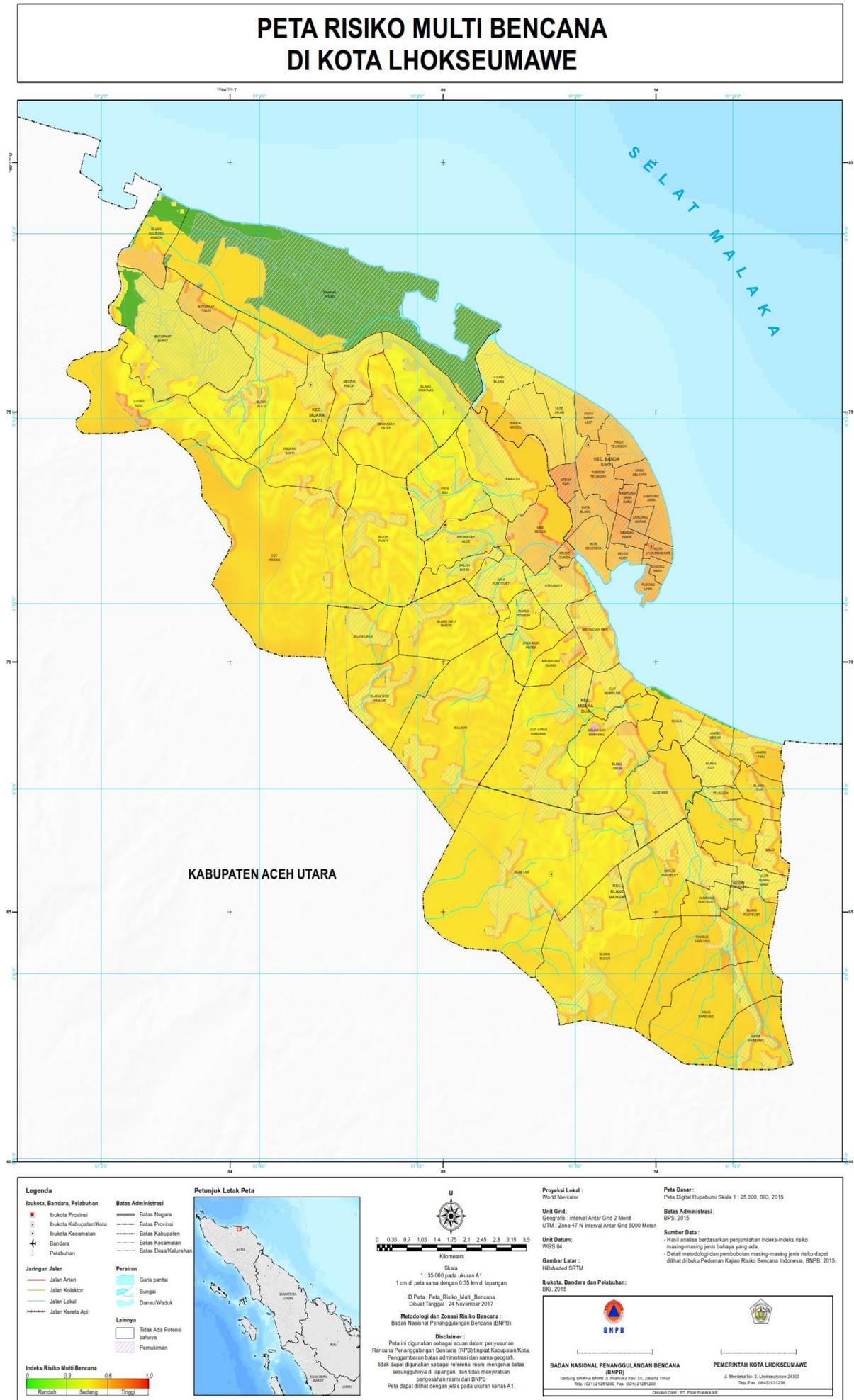
### 2.3.4 Pengkajian Risiko Bencana

Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini, yang menerangkan bahwa tingkat risiko setiap bencana di Kota Lhokseumawe berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko tinggi.

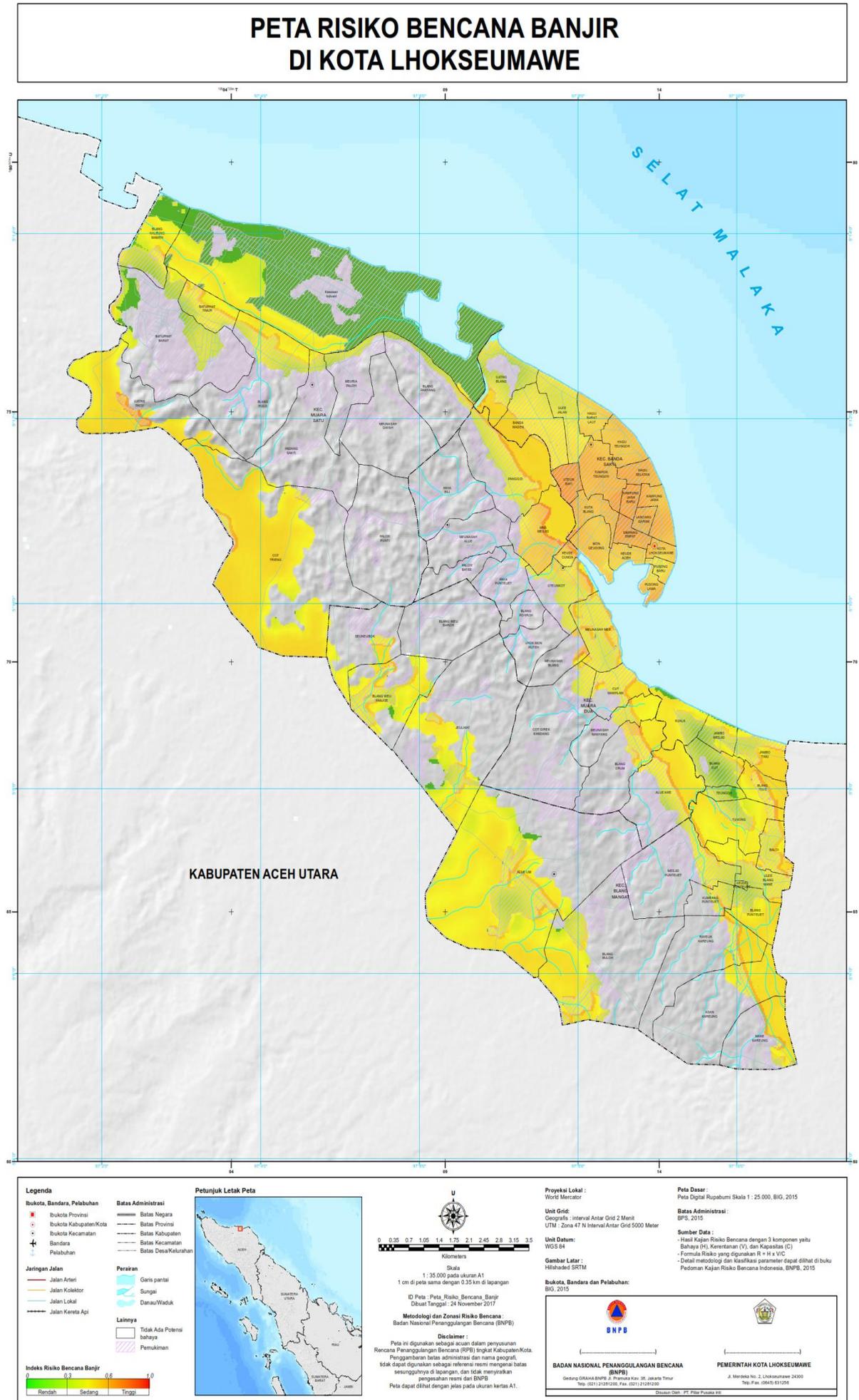
Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kota Lhokseumawe

No	Ancaman	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
4	Gempa Bumi	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
6	Kekeringan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
8	Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
9	Kegagalan Teknologi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
10	Covid-19	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah
11	Likuifaksi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

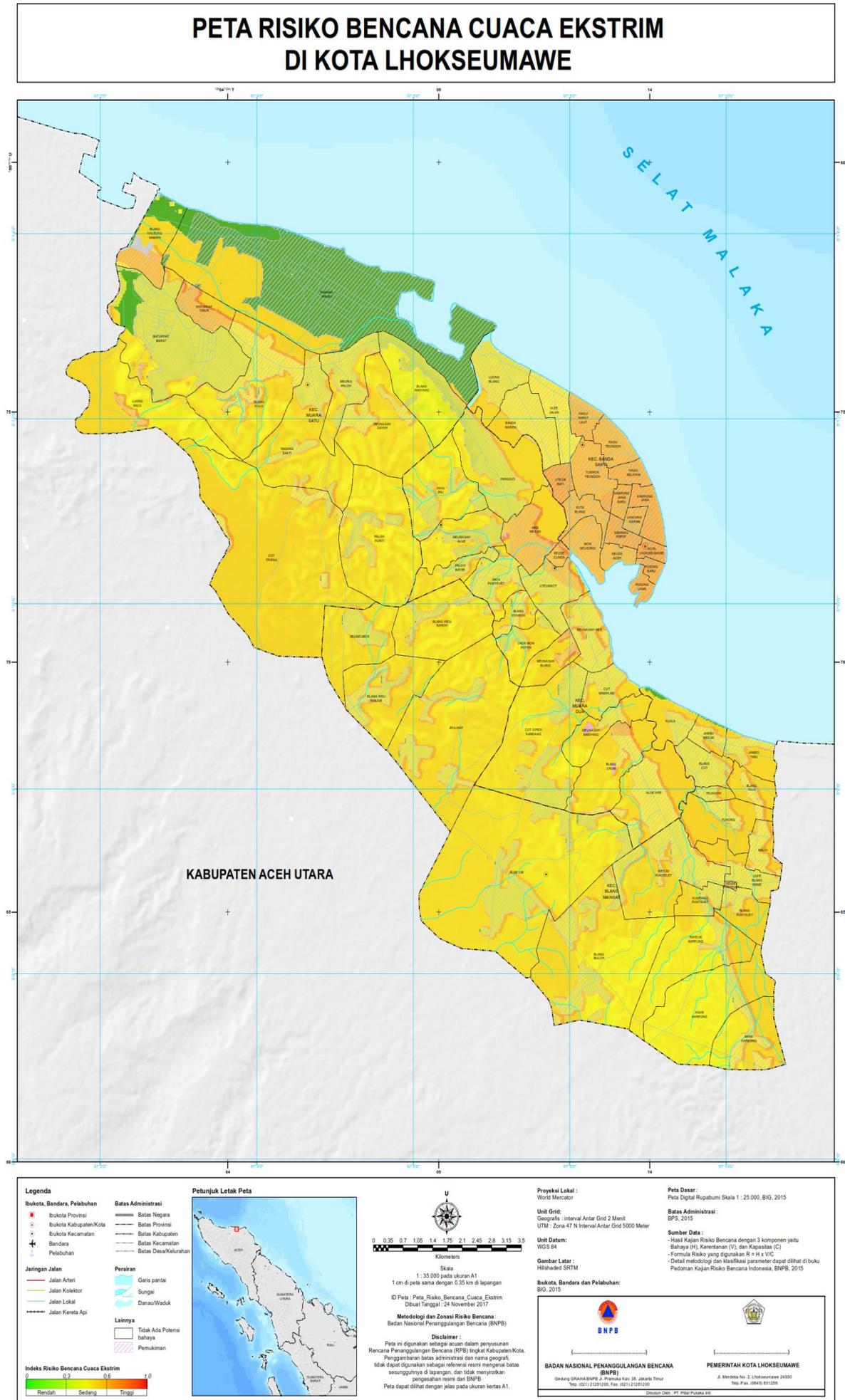
*Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe*



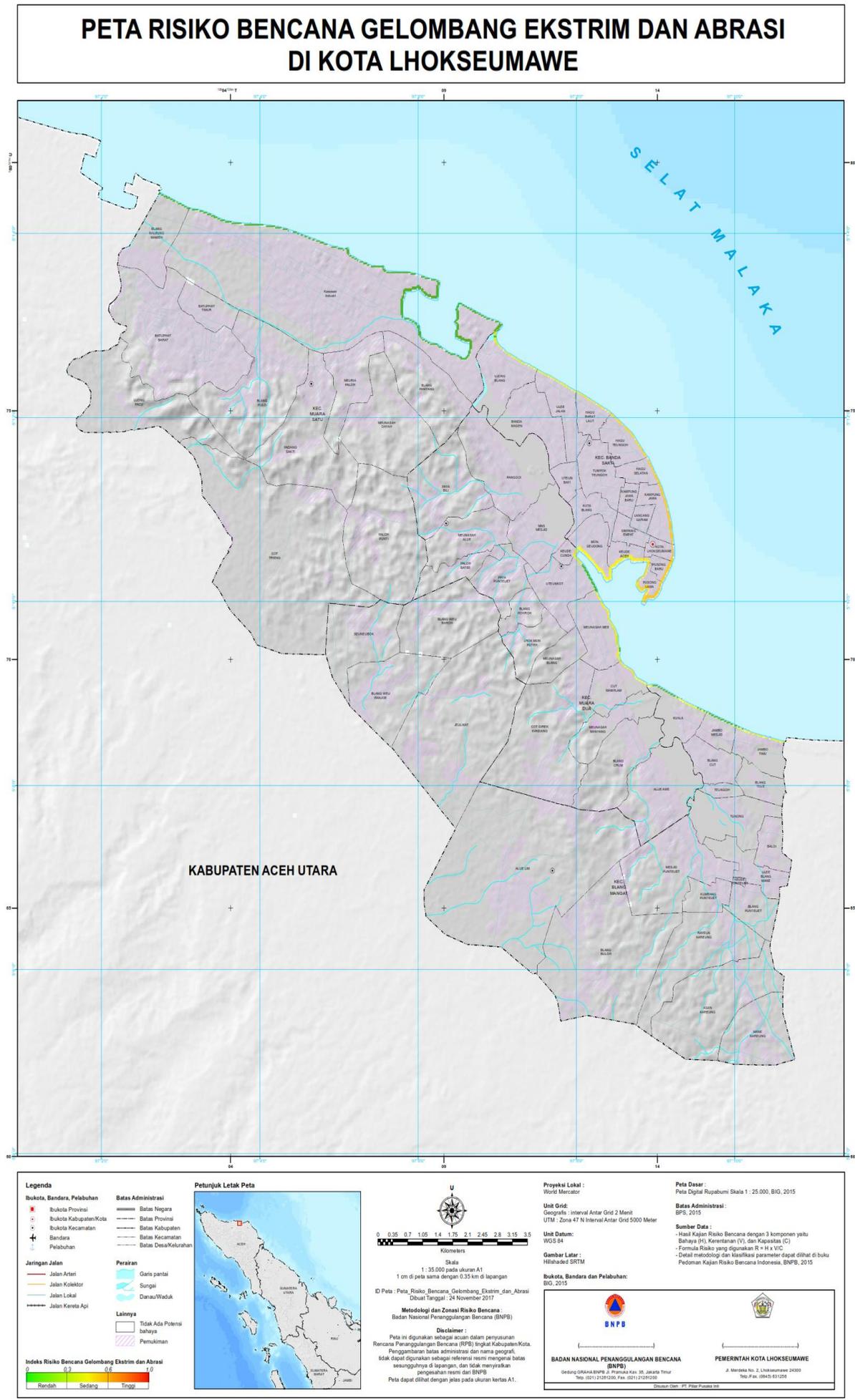
Gambar 2.9 Peta Multi Risiko Bencana Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



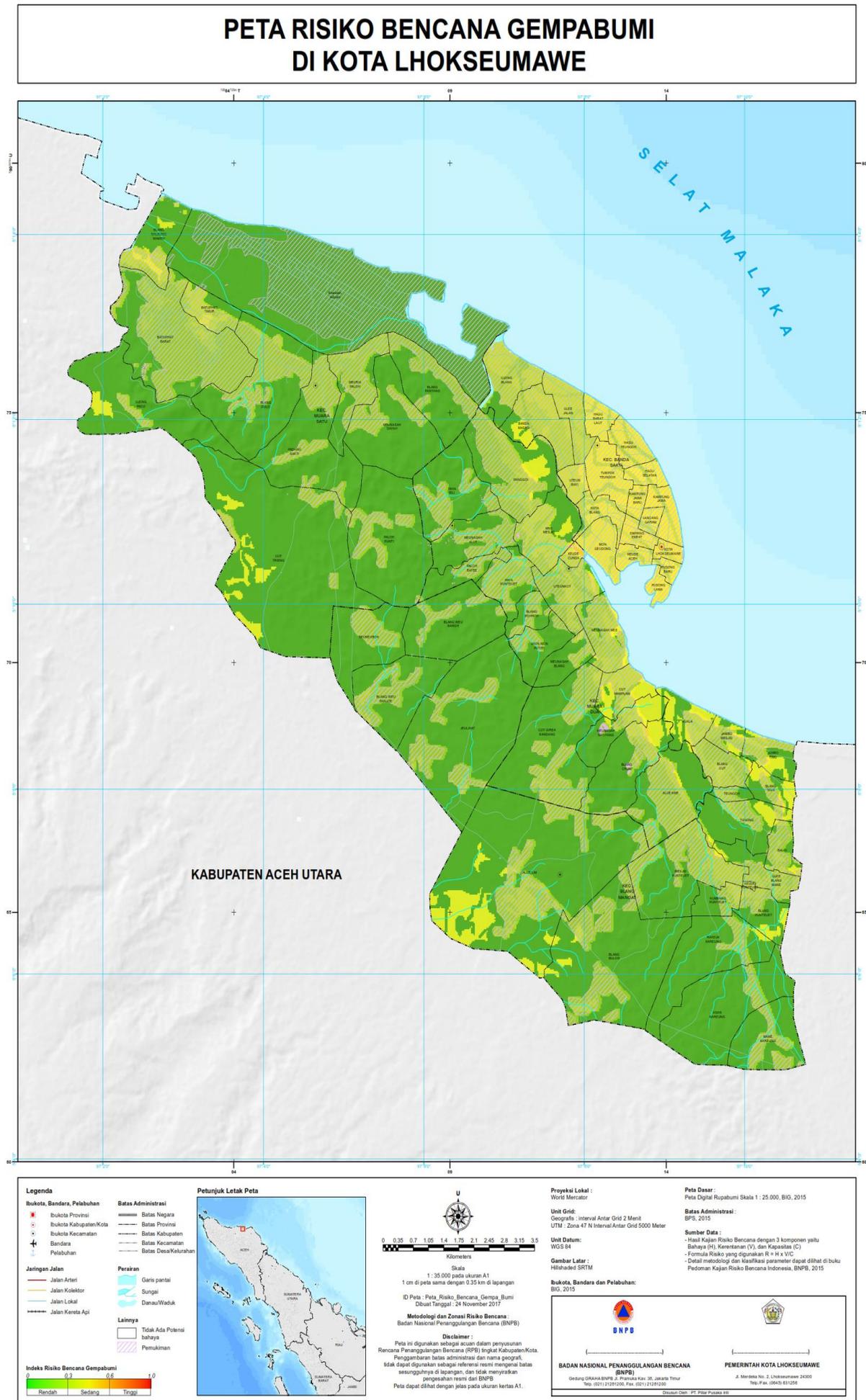
Gambar 2.10 Peta Risiko Banjir Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



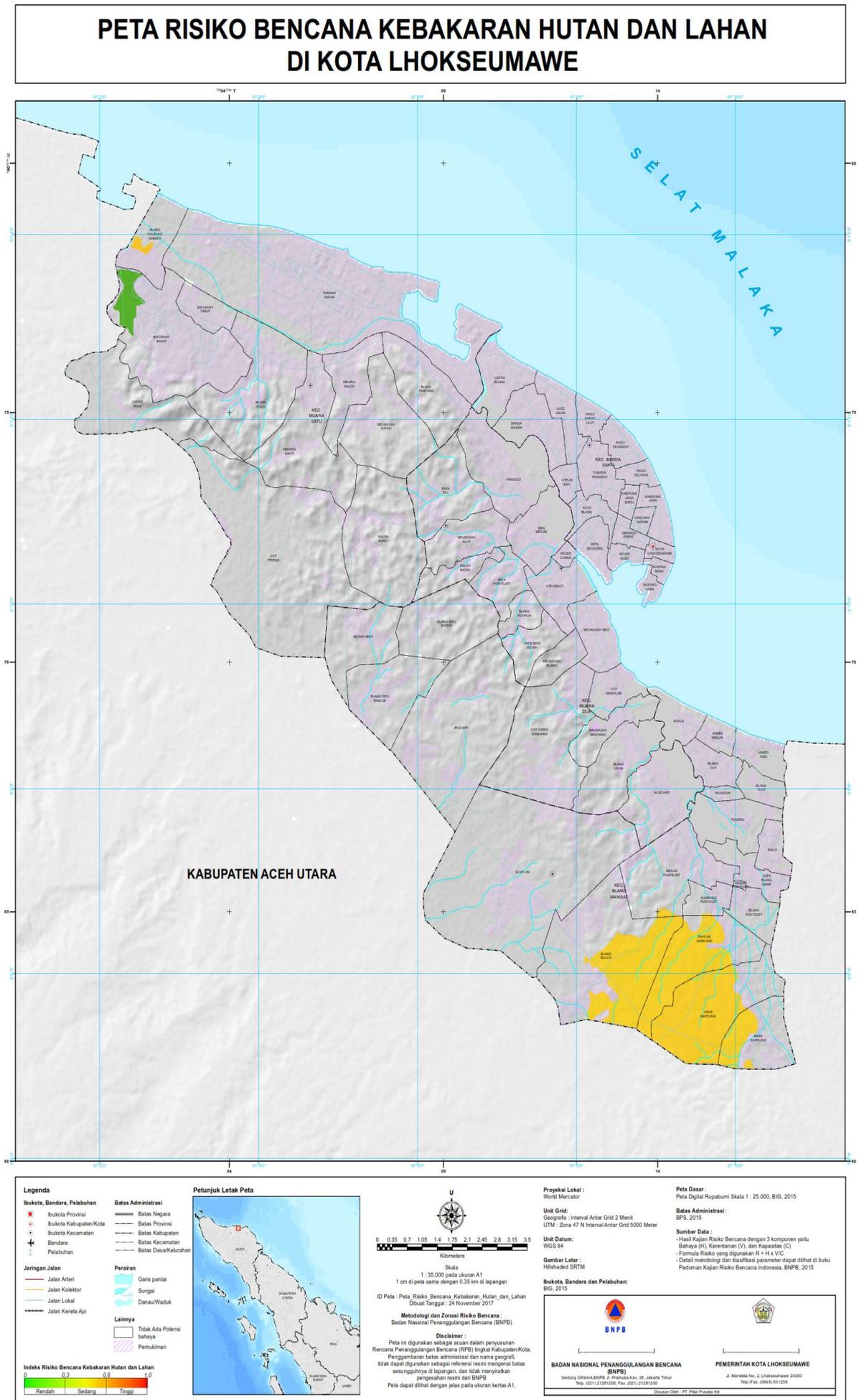
Gambar 2.11 Peta Risiko Cuaca Ekstrim Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



Gambar 2.12 Peta Risiko Cuaca Ekstrim Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



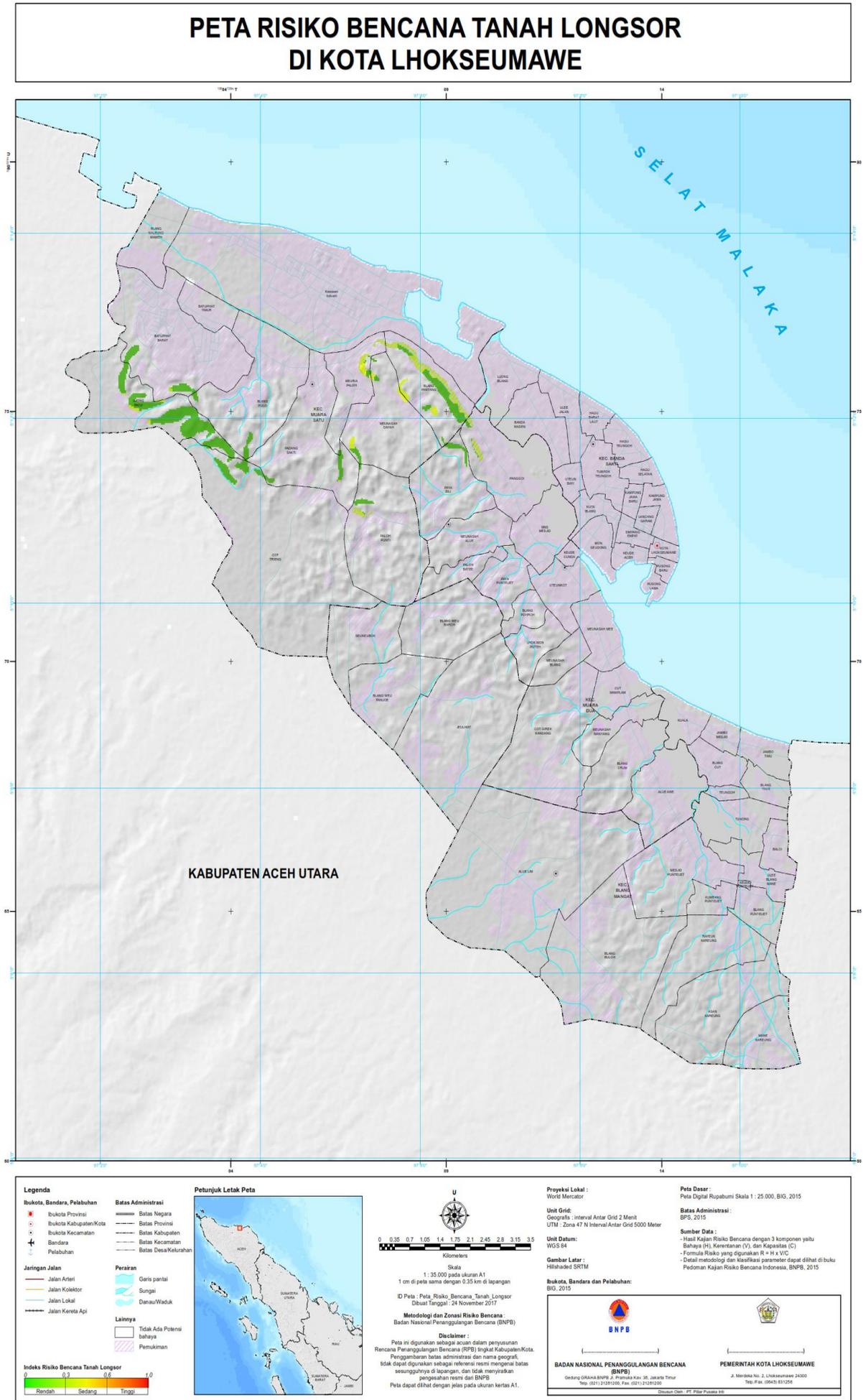
Gambar 2.13 Peta Risiko Gempa Bumi Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



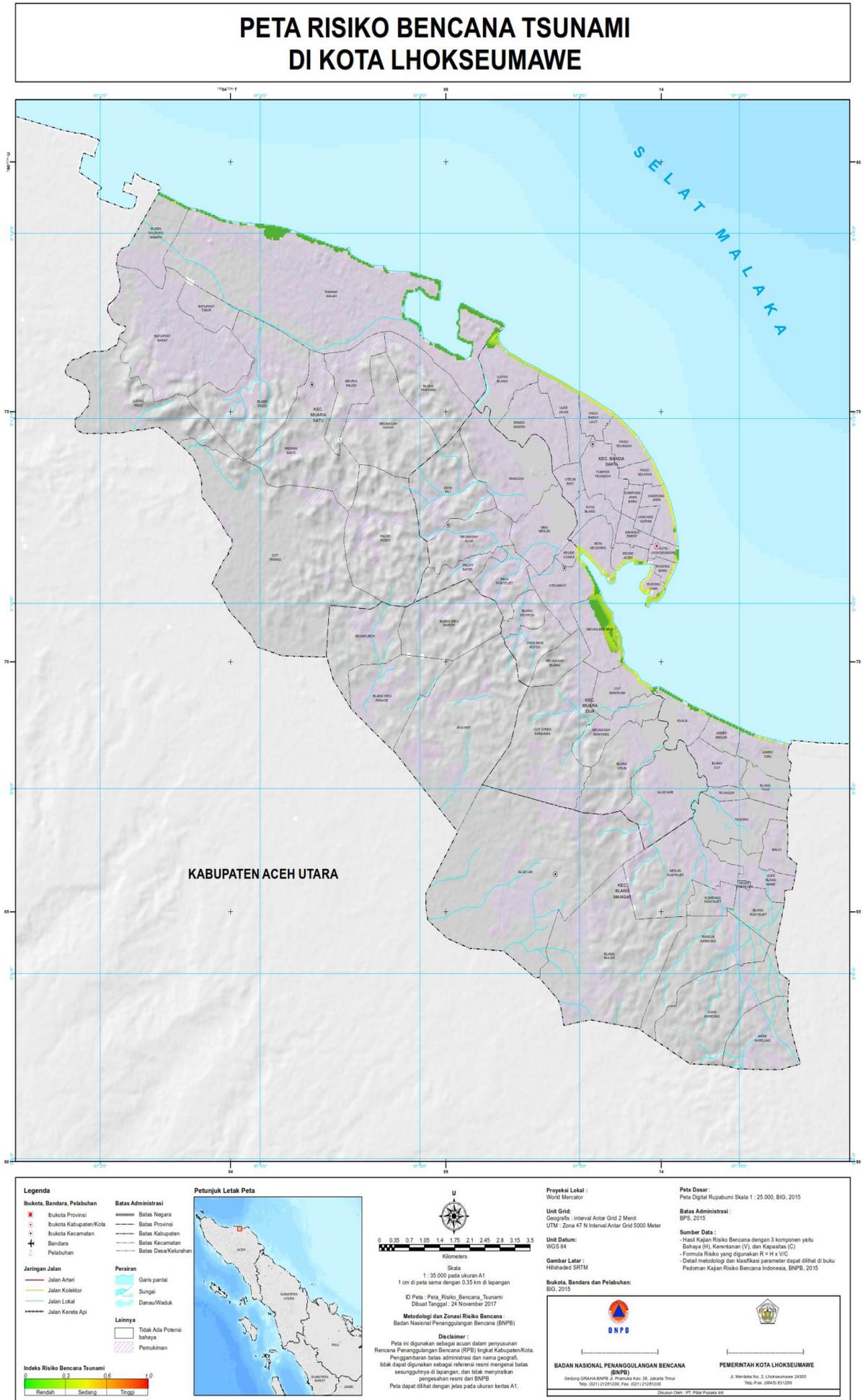
Gambar 2.14 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



Gambar 2.15 Peta Risiko Kekeringan Kota Lhokseumawe  
 Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



Gambar 2.16 Peta Risiko Tanah Longsor Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022



Gambar 2.17 Peta Risiko Tsunami Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dokumen KRB Kota Lhokseumawe 2018-2022

## 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

### 2.4.1 Sejarah Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe

Sejarah kejadian bencana dijabarkan berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi dan persentase kejadiannya. Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data dan Informasi Pusdatin BPBA yang dikeluarkan oleh BPBA. Dalam Kurun Waktu 10 tahun terakhir, dan hasil analisis Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Lhokseumawe 2014 s.d 2023 dilaporkan sebanyak 68 kejadian bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka Kota Lhokseumawe memiliki 8 (delapan) jenis potensi ancaman. Bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Potensi Bencana Kota Lhokseumawe

No	Jenis Bencana	No	Jenis Bencana
1.	Gempa Bumi	7.	Cuaca Ekstrim
2.	Tsunami	8.	Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	Banjir	9.	Kegagalan Teknologi
4.	Tanah Longsor	10.	Covid-19
5.	Kekeringan	11.	Likuifaksi
6.	Gelombang Ekstrim		

*Sumber: Hasil Kajian Risiko Bencana 2022-2026 Aceh Sub Bagian Lhokseumawe*

Adapun bencana di luar bencana alam adalah pandemi COVID- 19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020. Data bencana dan kejadian bencana pandemi ini tidak pernah tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya di Indonesia maupun di Lhokseumawe. Kejadian bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak baik korban jiwa, kerugian ekonomi dan fisik serta kerusakan lingkungan yang tidak sedikit, yang pernah terjadi di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Selanjutnya dalam tabel di bawah ini memaparkan wilayah Kota Lhokseumawe telah mengalami 68 kejadian bencana dalam kurun waktu 2014-2023. Setiap bencana memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian dan kerusakan. Bencana Banjir berkontribusi besar pada korban menderita. Di sisi lain, bencana kebakaran hutan dan lahan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Berikut Rinciannya:

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Tabel 2.18 Rekapitulasi Bencana Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2014-2023)

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan					
		Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Perkantoran	Jembatan
Banjir	16	0	0	0	0	547	192	0	0	0	0	0
Cuaca Ekstrim	10	0	0	0	0	10	23	0	0	0	0	0
Gelombang Pasang dan Abrasi	3	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0 -	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	5	0	0	0	0	-1	5	0	0	0	0	0
Tsunami	0	0	0	0	0	0	0-	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil analisis data Pusdatin BPBA 2014-2023

Tabel 2.19 Sejarah Kejadian Gempa Bumi waktu 200 tahun terakhir (1821-2023)

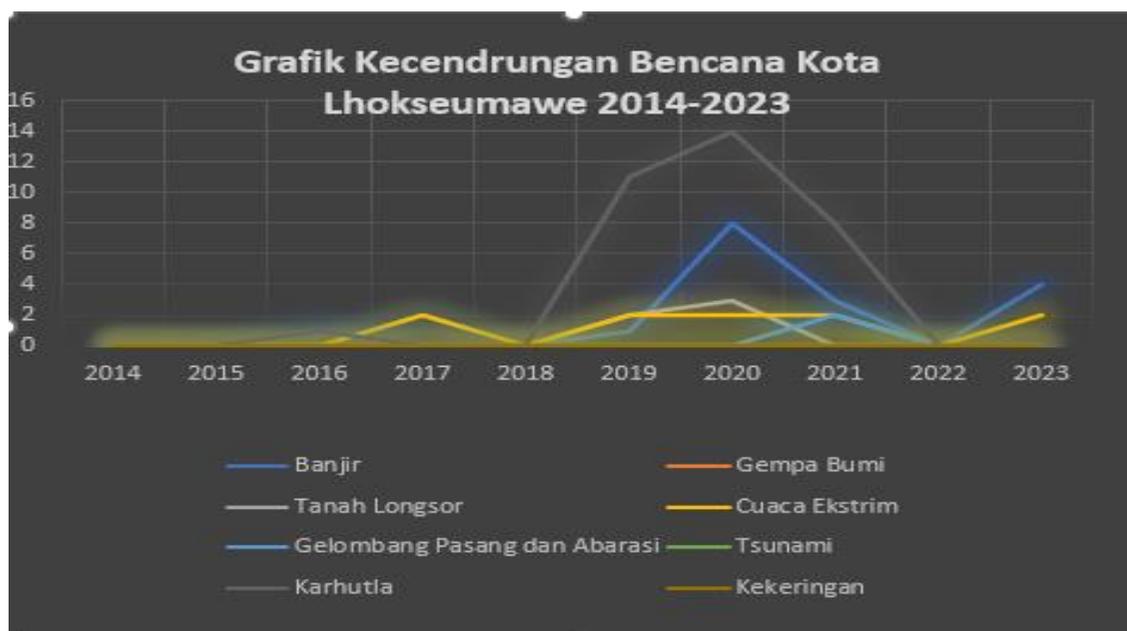
No	Magnitudo	Tanggal kejadian	Jumlah Korban		Kerusakan
			Meninggal (jiwa)	Luka-Luka (jiwa)	
1	7.3	24 Agustus 1936	9	20	- Bangunan Rusak
2	5.2	2 April 1964			- 30 s.d 40 % yang terbuat dari batu bata rusak kerusakan terparah di Krueng Raya
3	6.1	12 pril 1967			- Di Jeunieb. Pendada. dan Jeumpa Bireun : 5 masjid dan 59 rumah batu bata dan kayu, 11 bangunan sekolah, 5 jembatan, 2000 rumah tinggal baik dari batu bata atau kayu
4	6.1	21 Juni 1976			- Dinding gedung kantor pemda retak - Dinding pembangkit listrik di bandara Pinangsore Tidak Tsunami retak
5	6.6	04 pril 1983			- tembok sekolah roboh dan kaca jendela pecah di beberapa bangunan pemerintahan seperti stasiun TV, 1 ruang kuliah, gedung telkom

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No	Magnitudo	Tanggal kejadian	Jumlah Korban		Kerusakan
			Meninggal (jiwa)	Luka-Luka (jiwa)	
					rusak, dan 1 bangunan miring di Meulaboh
6	6.0	20 Agustus 1997			- beberapa ratus rumah hancur di Aceh
7	9.0	26 Desember 2004 (Tsunami di Lhokseumawe)			- Total di 10 negara di selatan Asia dan Timur Afrika
8		19 November 2005			
9	8.6	28 Maret 2005 Sumatera Utara	1 orang meninggal karena panik		- Gempa terasa sampai ke Lhokseumawe
10	7.3	20 Feb 2008			- Lhokseumawe ikut berdampak guncangan gempa
11	8.4	11 April 2012			-
12	6.1	2 Juli 2013			- tidak ada info dampak untuk Kota Lhokseumawe
13	6.4	7 Desember 2016			- Tidak ada info dampak ke Lhokseumawe

### 2.4.2 Analisis Kecenderungan Bencana

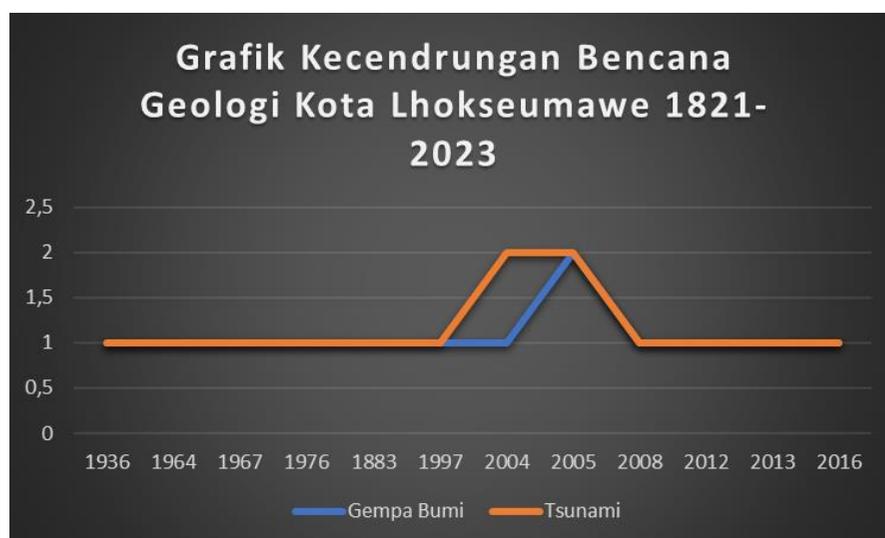
Dalam dokumen RPB ini analisis kecenderungan didasarkan pada sejarah kejadian dan dampak dari bencana. Analisis kecenderungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kejadian dan dampak bencana pada 10 tahun terakhir tahun 2014 - 2023. Kecenderungan dari ancaman Gambar Grafik 2.21 di bawah.



Gambar 2.18 Grafik Kecenderungan Bencana Kota Lhokseumawe 2014-2023  
Sumber : Hasil Analisis tahun 2024

Sumber data untuk analisis kecenderungan dengan menganalisis data Pusdatin BPBA sehingga diperoleh trend data sebagai berikut. Terdapat 2 jenis bencana yang mengalami tren peningkatan yaitu bencana Karhutla dan Banjir, Sedangkan bencana cuaca ekstrem, Gelombang pasang dan abrasi dan tanah Longsor tidak mengalami peningkatan dalam jumlah yang begitu signifikan. Sedangkan bencana kekeringan, gempa bumi dan tsunami tidak menunjukkan aktivitas. Trend kecenderungan bencana di Kota Lhokseumawe umumnya didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan klimatologi seperti banjir, gelombang pasang dan abrasi dan cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu terdapat bencana geologi yaitu gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan katalog BMKG 1821-2023 ditemukan terdapat 13 kali terjadi gempa yang berdampak dan dirasakan di kota Lhokseumawe. meskipun tidak dalam efek yang signifikan tetapi patut diwaspadai. Bencana tsunami yang langsung melanda Kota Lhokseumawe yaitu pada tahun 2004. Meskipun pada gempa-gempa sebelumnya ada tsunami kecil, namun tidak sampai berimbas ke kota Lhokseumawe.



Gambar 2.19 Grafik Kecenderungan Bencana Geologi Kota Lhokseumawe 1821-2023

Sumber : Katalog BMKG 1821-2023

Tabel 2.20 Analisis Kecenderungan FGD

Jenis Bencana	Tingkat Risiko (KRB Aceh)	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi Tingkat Kecenderungan
Banjir	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang dampak besar dan luas
Cuaca ekstrim	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang dampak besar dan luas
Gelombang pasang dan abrasi	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang dampak besar dan luas
Karhutla	Rendah	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat namun dampak sedang
Gempa Bumi	Sedang	Meningkat	Kemungkinan terjadi berdampak luas
Tsunami	Sedang	Tetap (Namun diusulkan jadi prioritas)	Kemungkinan terjadi berdampak luas
Tanah Longsor	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian tetap namun dampak lokal
Kekeringan	Sedang	tetap	Intensitas kejadian tetap
Kegagalan Teknologi	Rendah	tetap	Intensitas kejadian tetap namun dampak lokal
Covid -19	Rendah	Menurun	Kemungkinan terjadi berdampak luas
Liquifaksi	Sedang	Tetap (Diusulkan jadi prioritas)	Kemungkinan terjadi berdampak luas

Sumber : Hasil Analisis tahun 2024

Dari Hasil Analisis KRB Aceh Sub bagian Kota Lhokseumawe, terdapat dua jenis bencana yang berisiko tinggi yaitu Banjir dan Cuaca Ekstrim. Dari hasil analisis Pusdatin BPBA, analisis kecenderungan bencana dan FGD dengan tim Substantif Penyusunan RPB Kota Lhokseumawe Terkait dengan

bencana prioritas maka terdapat 5 jenis bencana yang perlu menjadi fokus prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe. Yaitu :

1. Banjir
2. Cuaca Ekstrim
3. Gelombang Pasang dan Abrasi
4. Tanah Longsor
5. Gempa Bumi, Tsunami, & Likuifaksi

Ancaman		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Meningkat	Karhutla	Gelombang Pasang/Abrasi, Tanah Longsor, Kekeringan	Banjir, Cuaca Ekstrim
	Tetap		Kegagalan Teknologi Likuifaksi	Gempa Bumi, Tsunami
	Menurun	Covid-19		



Gambar 2.20 Matriks Bencana Prioritas Awal Kota Lhokseumawe  
 Sumber : Hasil Analisis 2024

### 2.5 Masalah Pokok

Dalam perumusan isu strategis pada penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, dilakukan dengan identifikasi masalah pokok melalui analisis tiga aspek yaitu masalah pokok yang dianalisis berdasarkan faktor keterpaparan dan kerentanan bencana, berdasarkan analisis Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan berdasarkan aspek politis daerah.

Masalah pokok merujuk pada masalah-masalah mendasar yang menjadi akar permasalahan terkait pembangunan dan pengelolaan risiko bencana. Dalam analisis risiko bencana, masalah pokok ini terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan bahaya atau pemicu peristiwa bencana, serta faktor-faktor kerentanan yang meningkatkan risiko bencana. Ini berarti faktor-faktor yang menyebabkan dampak yang tinggi atau langsung dari bencana, seperti penderitaan, korban jiwa, gangguan terhadap penghidupan dan kehidupan, serta kerusakan dan kehilangan dalam berbagai aspek sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup.

Akar masalah, atau disebut juga masalah pokok dapat berasal dari faktor-faktor birokrasi, politik, sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan

hidup. Dalam analisis lebih lanjut, beberapa masalah pokok mungkin timbul sebagai akibat dari masalah yang lebih mendasar, yang disebut sebagai akar masalah, dan terkait dengan keberadaan beberapa atau banyak sumber bahaya atau pemicu peristiwa bencana. Masalah pokok ini diuraikan berdasarkan jenis risiko bencana, dengan pendekatan yang bersifat teknokratis dan administratif yang didasarkan pada informasi dari analisis bahaya dan kerentanan.

### **2.5.1 Masalah Pokok Berdasarkan Faktor Keterpaparan dan Kerentanan Bencana**

#### a. Banjir

Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kota Lhokseumawe. Masalah utama penyebab banjir di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa hal. Pertama, penumpukan sedimen harian yang terus bertambah disebabkan oleh sampah tambak dan galian C. Hal ini mengakibatkan saluran-saluran tersumbat karena terisi oleh sedimen. Selain itu, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan terutama di selokan juga menjadi penyebab utama banjir. Kedua, turunnya permukaan tanah juga menjadi faktor yang menyebabkan banjir di Kota Lhokseumawe. Kedangkalan sungai atau Krueng Cunda juga menjadi masalah serius, karena menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Selain itu, dimensi sungai yang menyempit juga memperparah situasi, karena aliran air menjadi terhambat. Ketiga, pembangunan saluran dan selokan yang lebih tinggi dari badan jalan serta pembangunan badan jalan yang lebih tinggi dari lingkungan perumahan juga menjadi salah satu sebab terjadinya banjir. Hal ini dapat menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan baik ke saluran-saluran yang ada.

Faktor lain yang turut memperparah banjir di Kota Lhokseumawe adalah curah hujan tinggi, waduk penampungan yang tidak berfungsi dengan semestinya, dan pembangunan permukiman di daerah DAS yang dapat mengganggu aliran air secara alami.

#### b. Cuaca Ekstrem

Bencana cuaca ekstrem disebabkan oleh anomali cuaca, kurangnya pohon, banyaknya penebangan pohon, rumah kaca, dan banyaknya emisi gas buang dari kendaraan, pabrik, dan lainnya merupakan masalah yang signifikan di Kota Lhokseumawe. Anomali cuaca, seperti perubahan pola hujan yang ekstrem, dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya. Kurangnya pohon dan penebangan liar juga mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air dan mengurangi intensitas cuaca ekstrem.

Fenomena rumah kaca dapat menyebabkan peningkatan suhu yang ekstrim di beberapa area kota, yang dapat memicu cuaca panas yang berlebihan. Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan, pabrik, dan industri lainnya juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dapat memperparah cuaca ekstrem.

c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Masalah pokok yang menyebabkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, pembuangan sampah ke laut merupakan permasalahan serius yang mengganggu ekosistem laut dan mempengaruhi pola arus laut. Sampah-sampah ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran air dan meningkatkan risiko gelombang ekstrim dan abrasi di pantai. Kedua, fenomena pasang purnama juga berkontribusi terhadap terjadinya gelombang ekstrim di wilayah pesisir. Pasang purnama meningkatkan tinggi permukaan air laut, yang dapat menyebabkan abrasi pantai yang lebih parah.

Selain itu, pengikisan bibir pantai juga merupakan masalah utama yang dapat memicu abrasi. Pengikisan ini bisa dipicu oleh gelombang yang tinggi dan kuat, yang diperparah oleh kurangnya tanaman pencegah atau penahan abrasi di sekitar pantai. Terakhir, pembangunan liar di pinggir pantai juga memperburuk masalah abrasi. Pembangunan ini dapat mengganggu aliran air dan pola sedimentasi alami, yang meningkatkan risiko abrasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk melindungi pantai dan lingkungan pesisir dari kerusakan yang lebih lanjut.

d. Longsor

Masalah pokok yang menyebabkan bencana longsor di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, praktik galian C yang tidak sesuai aturan menjadi penyebab utama longsor. Galian C yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan dapat melemahkan struktur tanah dan menyebabkan longsor. Kedua, penebangan pohon sembarangan juga berkontribusi terhadap terjadinya longsor. Pohon-pohon yang menjadi penahan tanah dapat mengurangi risiko longsor, namun jika ditebang tanpa perencanaan yang baik, maka stabilitas tanah dapat terganggu.

Selain itu, pembukaan lahan baru tanpa perencanaan yang matang juga dapat meningkatkan risiko longsor. Pembukaan lahan baru cenderung mengubah tata guna lahan yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Faktor cuaca juga berperan penting dalam terjadinya longsor, terutama curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air, yang pada gilirannya dapat memicu longsor. Terakhir, banyaknya alih fungsi

lahan yang tidak sesuai aturan juga menjadi faktor penyebab longsor. Alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan karakteristik tanah dan topografi dapat meningkatkan risiko longsor di wilayah tersebut.

e. Kekeringan

Penyebab bencana kekeringan di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor. Pertama, musim kemarau panjang menjadi penyebab utama kekeringan. Kurangnya curah hujan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air secara signifikan. Kedua, kurangnya air tanah dikarenakan banyaknya pemakaian sumur bor juga menjadi faktor yang memperburuk kekeringan. Penggunaan sumur bor yang berlebihan dapat menguras sumber air tanah dan menyebabkan penurunan permukaan air tanah.

Selain itu, anomali cuaca seperti El Niño juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekeringan. Perubahan pola cuaca yang tidak normal dapat mengakibatkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara, yang berdampak pada kekeringan. Kurangnya embung sebagai sarana penyimpanan air juga memperburuk kondisi kekeringan. Embung yang berfungsi untuk menampung air hujan dalam jumlah besar dapat membantu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

f. Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi

Kota Lhokseumawe, dengan posisinya yang berdekatan dengan sesar Sumatera dan sesar lokal yang masih dalam penelitian, rentan terhadap gempa bumi. Saat terjadi gempa, terutama di daerah seperti Banda Sakti, kondisi tanah yang tidak solid dapat menyebabkan likuifaksi, di mana tanah berubah menjadi cairan akibat getaran gempa. Selain itu, karena dikelilingi oleh lautan, Kota Lhokseumawe juga berpotensi terkena dampak tsunami jika terjadi gempa bumi di dasar laut.

Faktor lain yang meningkatkan risiko adalah pembangunan yang kurang memperhatikan mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Pembangunan yang tidak memperhatikan mitigasi dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana.

Tabel 2.21 Identifikasi akar masalah berdasarkan faktor keterpaparan dan kerentanan bencana.

No.	Hazard	Masalah
1	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran yang tersumbat, karena sedimen</li> <li>- Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan terutama di selokan</li> <li>- Turunnya permukaan tanah</li> <li>- Kedangkalan krueng/Sungai cunda</li> <li>- Dimensi sungai yang menyempit</li> <li>- Pembangunan saluran dan selokan lebih tinggi dari</li> </ul>

No.	Hazard	Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>badan jalan</li> <li>- Pembangunan badan jalan yang lebih tinggi dari lingkungan perumahan</li> <li>- Curah hujan tinggi</li> <li>- Waduk penampungan yang tidak berfungsi dengan semestinya</li> <li>- Pembangunan permukiman di daerah DAS</li> </ul>
2	Gelombang dan Abrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuangan sampah ke laut</li> <li>- Pasang purnama</li> <li>- Pengikisan bibir Pantai</li> <li>- Pembangunan liar di pinggir Pantai</li> <li>- Kurangnya tanaman pencegah/penahan abrasi</li> </ul>
3	Cuaca Ekstrim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anomali cuaca</li> <li>- Kurangnya pohon dan banyaknya penebangan pohon</li> <li>- Rumah kaca</li> <li>- Banyak emisi gas buang kendaraan, pabrik, dll</li> </ul>
4	Longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Galian C yang tidak sesuai aturan</li> <li>- Penebangan pohon sembarangan</li> <li>- Pembukaan lahan baru</li> <li>- Cuaca yaitu curah hujan tinggi</li> <li>- Banyaknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan</li> </ul>
5	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musim kemarau Panjang</li> <li>- Kurangnya air tanah dikarenakan banyaknya pemakaian sumur bor</li> <li>- Anomali cuaca (elnino)</li> <li>- Kurangnya embung</li> </ul>
6	Gempa Bumi, tsunami, dan likuifaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gempa bumi : adanya sesar Sumatera dan sesar Lhokseumawe (masih diteliti)</li> <li>- Tsunami : dikelilingi lautan</li> <li>- Likuifaksi : bukan tanah solid (khusus banda sakti), struktur dan kondisi tanah yang tidak kuat</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis tenaga ahli 2024*

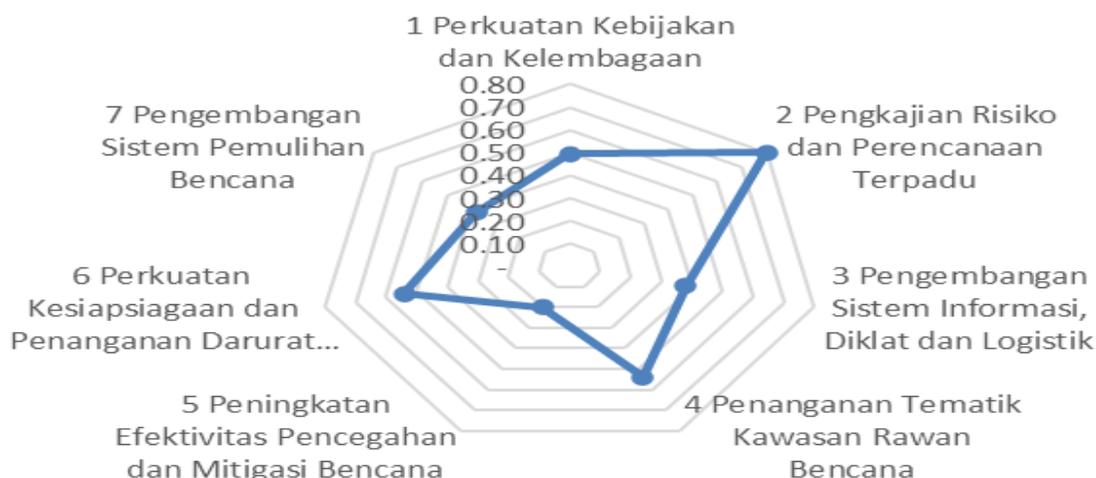
### 2.5.2 Masalah Pokok Berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu.

Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Tahun 2022 Kota Lhokseumawe memiliki Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0.49. Angka ini meningkat 0.16 dari tahun 2021 Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 0.33. Indeks Ketahanan

Daerah Kota Lhokseumawe merupakan tertinggi kedua di Aceh setelah Kota Banda Aceh yang memiliki Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0.58.

### IKD KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022



Gambar 2.19 Diagram analisis IKD Kota Lhokseumawe  
Sumber: Hasil analisis tahun 2022

Berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah, beberapa rekomendasi yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pentingnya melakukan peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, nilai IKD paling rendah, yaitu 0.20.

Beberapa akar masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Belum adanya peraturan daerah yang kuat terkait pencegahan Karhutla dan upaya budidaya serta konservasi lahan gambut untuk pengurangan bahaya Karhutla;
- Belum adanya sistem pengelolaan pencegahan bencana banjir dan longsor melalui upaya restorasi sungai, pemanfaatan biopori dan penguatan lereng;
- Belum adanya syarat tegas terkait penerapan bangunan tahan gempa bumi pada pemberian IMB; dan
- Belum adanya upaya pencegahan tsunami dengan infrastruktur seperti bangunan pemecah ombak dan budidaya mangrove yang berkelanjutan.

Kesimpulannya adalah belum adanya upaya terstruktur dalam mitigasi berbagai jenis bencana yang ada di Kota Lhokseumawe.

2. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik; dengan nilai 0.38.

Beberapa masalah pokok:

- Masih minimnya sertifikasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana untuk aparatur, masyarakat dan komponen pentahelic penanggulangan bencana; dan

- Minimnya kajian, pemenuhan kebutuhan logistik, belum optimalnya supply chain dan mekanisme sistem logistik dan peralatan terintegrasi.

Oleh karena itu, perlu membangun kemandirian informasi Kota Lhokseumawe untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat, penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga, sertifikasi personil penanggulangan bencana untuk penggunaan peralatan penanggulangan bencana dan penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.

3. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dengan nilai IKD 0.38.

Beberapa permasalahan :

- Lemahnya perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pascabencana, perencanaan pemulihan infrastruktur penting pascabencana, perencanaan perbaikan rumah penduduk pascabencana, penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

4. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan dengan nilai IKD 0,50.

Permasalahannya adalah :

- Mendorong adanya penyusunan dan penerapan aturan/regulasi daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Penyusunan peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan;
- Optimalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dan pentahelix pendukung lainnya; dan
- Penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif dalam upaya PRB.

5. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dengan nilai IKD 0.54.

Permasalahannya adalah:

- Belum optimalnya mekanisme informasi penataan ruang Kota Lhokseumawe yang mudah di akses Publik;
- Perlunya peningkatan kapasitas dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana; dan
- Pentingnya penguatan dan dukungan terhadap pembangunan Desa Tangguh Bencana.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan nilai IKD 0.54.

Beberapa permasalahan yang ditemui :

- Belum optimalnya penguatan kesiapsiagaan kabupaten/kota melalui perencanaan kontijensi, penguatan sistem peringatan dini kabupaten/kota dalam menghadapi bencana;
- Lemahnya penguatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi masyarakat; dan

- Belum optimalnya penguatan mekanisme penghentian status darurat bencana.
7. Pengkajian Risiko Bencana dan Perencanaan Terpadu dengan nilai IKD 0.80 dimana sudah mengalami peningkatan kapasitas yang signifikan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga perlu segera menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai peraturan kebijakan yang legal.

### **2.5.3 Masalah Pokok karena Aspek Politis Daerah (Sinkronisasi dengan RPA dan Visi Misi Kepala Daerah)**

Dari segi politis daerah, terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok dalam penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe. Pertama, lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek-aspek penanggulangan bencana. Hal ini mencakup kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta minimnya perencanaan yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana.

Kedua, tumpang tindihnya pengelolaan penyebab banjir dengan kabupaten tetangga juga menjadi masalah. Kurangnya kerja sama antar wilayah dalam mengatasi masalah banjir dapat menghambat efektivitas upaya penanggulangan bencana. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antarwilayah untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama.

Berdasarkan akar masalah keterpaparan dan kerentanan bencana, Hasil analisis IKD dan juga visi misi kepala daerah terhadap RPA maka ditarik 9 masalah pokok:

1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota Lhokseumawe;
2. Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan;
3. Minimnya sarana mitigasi bencana sehingga menimbulkan kerentanan bencana;
4. Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan;
5. Lemahnya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana;
6. Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan;
7. Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek penanggulangan bencana;
8. Minimnya perencanaan terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan; dan
9. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait Penanggulangan bencana.

## 2.6 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan pada saat diskusi FGD penyusunan penanggulangan bencana Lhokseumawe yang dilaksanakan pada Senin 5 Februari 2024 yang dihadiri seluruh SKPK dan perwakilan masyarakat Kota Lhokseumawe. Proses untuk mendapatkan isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi akar masalah bencana secara spesifik yaitu tingkat keterpaparan/kerentanan, kajian kapasitas penanggulangan bencana, serta kesenjangan rencana pembangunan daerah, sehingga dari 9 masalah pokok didapatkan 5 rumusan isu strategis prioritas yaitu:

1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kota Lhokseumawe;
2. Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana;
3. Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan; dan
5. Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari isu strategis di atas kemudian dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis prioritas, dengan ketentuan:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan;
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan;
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas;
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan; dan
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Dari hasil pembobotan di dapat Isu Strategis RPB Kota Lhokseumawe 2025-2029:

1. Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek penanggulangan bencana;
2. Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana;
3. Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan; dan
4. Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.22 Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		A	B	C	D	E	
1	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota Lhokseumawe	3	3	3	3	3	15
2	Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana	5	5	3	4	4	21
3	Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek penanggulangan bencana	5	5	4	5	4	23
4	Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan	4	4	4	3	4	19
5	Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	5	4	3	3	3	18

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Isu strategis prioritas yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan Perumusan Rencana Aksi Daerah-nya sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat menjawab isu strategis yang ada di Kota Lhokseumawe.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh guna melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Guna menjalankan penanggulangan bencana secara efektif, diperlukan pedoman yang jelas dalam mengidentifikasi isu-isu strategis, arah kebijakan, serta strategi umum dan khusus. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Berdasarkan PP 21 tahun 2008, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Secara garis besar, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe disusun berdasarkan analisis Kebijakan dan Strategi Kota Lhokseumawe yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe. Ketiga rencana ini bertujuan untuk mencapai target nasional dalam mengurangi risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi terhadap bencana di Kota Lhokseumawe.

#### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warga Indonesia serta semua keturunan Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bencana, untuk menciptakan "Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana". Bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana adalah bangsa yang memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana dengan cara yang lebih baik melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan.

Kebijakan penanggulangan bencana diatur oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan penanggulangan Bencana, serta regulasi-regulasi pemerintah dan keputusan presiden yang berasal dari UU No. 21 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana.

##### **3.1.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044**

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berlaku

selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) untuk periode 2020-2044 dibuat berdasarkan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RPB 2020-2044 juga merujuk pada Persetujuan Paris dalam Kerangka Konvensi Kerangka penanggulangan bencana untuk Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, dan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030. RPB ini memiliki tujuan utama meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.

Visi RIPB 2020-2044 adalah “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Sedangkan, misi dari RPB 2020-2044 adalah :

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif; dan
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Terdapat 5 kebijakan serta turunan strategi pada RIPB 2020-2044, diantaranya dijelaskan di dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi RIPB 2020-2044

Kebijakan	Strategi
Penguatan peraturan perundang undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang- undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.</li> <li>b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.</li> </ol>
Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.</li> <li>b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem</li> </ol>

Kebijakan	Strategi
	peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.</li> <li>b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.</li> <li>c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.</li> </ul>
Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.</li> <li>b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana.</li> <li>c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.</li> <li>d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.</li> <li>e. Mewujudkan kabupaten/kota, masyarakat tangguh bencana. desa/kelurahan, dan</li> <li>f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.</li> <li>g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.</li> </ul>
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.</li> <li>b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.</li> <li>c. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.</li> <li>d. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>e. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.</li> </ul>
Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.</li> <li>b. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.</li> <li>c. Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.</li> <li>d. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial</li> </ul>

Kebijakan	Strategi
	ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sumber: RIPB 2020-2044

### 3.1.2 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 didasarkan pada visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini diuraikan lebih lanjut menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dituangkan ke dalam delapan misi pembangunan, salah satunya terkait dengan kebencanaan yang terdapat pada misi ke-5, yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi." Misi ini memiliki arah (tujuan) pembangunan ke-7, yaitu "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim." Ketahanan sosial dan ekologi ini menjadi bagian dari pondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam tujuan pembangunan ke-7, penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana yang bersifat kepulauan. Perbedaan karakteristik dan kondisi bencana di tiap pulau harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway dll*) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
5. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.

7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
10. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi “Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi”.

### **3.1.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB) 2025-2029**

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah dokumen yang mencakup kebijakan, strategi, dan opsi tindakan untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana di tingkat nasional selama lima tahun. RENAS-PB 2025-2029 (selanjutnya disebut RENAS-PB) ditujukan kepada seluruh institusi yang terkait dengan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pemerintah dan nonpemerintah. RENAS-PB berfungsi sebagai panduan bagi negara dalam melindungi rakyatnya melalui penyediaan sumber daya serta koordinasi tindakan bagi semua institusi terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat.

Selain itu, RENAS-PB juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana penanggulangan bencana mereka sendiri. Oleh karena itu, penyusunan RENAS-PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non-pemerintah di tingkat pusat dengan koordinasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rumusan tujuan penanggulangan bencana 2025-2039 adalah “Meningkatkan ketangguhan (resiliensi) masyarakat dalam menghadapi bencana”:

1. Peningkatan potensi dampak & risiko bencana geologi;
2. Peningkatan potensi dampak & risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim;

3. Peningkatan alih fungsi lahan dan percepatan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan & kawasan investasi;
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana kolaborasi multi-pihak;
5. Penguatan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana; dan
6. Pengelolaan satu data & pemanfaatan sistem informasi teknologi kebencanaan.

### **3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### **3.2.1 RPB Aceh 2023-2026**

Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Aceh yang telah disahkan Gubernur pada tahun 2023, terdapat 5 isu strategis Aceh terkait penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Rendahnya efektifitas pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana;
- b. Lemahnya pengendalian tata ruang yang berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana;
- c. Lemahnya penindakan/penegakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan;
- d. Kurangnya diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu; dan
- e. Lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek-aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan daerah.

Dari 5 isu strategis ini kemudian diturunkan menjadi strategi dan arah kebijakan yang dipaparkan dalam tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Arah dan kebijakan RPB Aceh 2023-2026

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Meningkatnya efektivitas pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Terwujudnya efektivitas kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Tingkat keberhasilan melaksanakan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Menyiapkan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis kultur dan struktur	Perencanaan pencegahan dan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan	
					Pelaksanaan Mitigasi struktural dan non struktural penanganan bencana	
					Pelatihan Kesiapsiagaan	
	Meningkatnya efektivitas penanganan darurat	Terwujudnya efektifitas penanganan darurat bencana	Tingkat keberhasilan melaksanakan kegiatan penanganan darurat Bencana	Menyiapkan perencanaan penanganan Darurat bencana	Perencanaan Penanganan Darurat	
					Menyediakan panduan untuk penanganan darurat bencana	Penyiapan panduan penanganan darurat bencana
					Peningkatan kapasitas melalui pelatihan tanggap darurat bencana	Pelatihan kedaruratan
Meningkatnya efektivitas pemulihan pascabencana	Terwujudnya efektifitas pemulihan pascabencana	Efektifnya kegiatan pemulihan pascabencana	Memenuhi kebutuhan darurat melalui aksi penangan darurat	Pemenuhan kebutuhan tanggap darurat melalui aksi penangan darurat	Penanganan kedaruratan	
				Membangun kembali pemulihan pascabencana dengan <i>build back better and safer</i>	Pemulihan pascabencana berbasis <i>build back better and safer</i>	
2. Lemahnya pengendalian tata ruang yang Berdampak Terhadap meningkatnya Risiko Bencana	Mewujudkan pengendalian tata ruang yang mempertimbangkan aspek manajemen risiko bencana	Terwujudnya pengendalian tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek manajemen	Keterpaduan pengendalian tata ruang yang mempertimbangkan aspek manajemen risiko bencana	Pemanfaatan pengendalian tata ruang berbasis manajemen risiko bencana	Optimalisasi fungsi pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang berbasis manajemen risiko bencana	
				Penegakan hukum terhadap pemanfaatan dan	Konsistensi kebijakan dan tindakan aksi hukum	

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Risiko Bencana		pengendalian ruang	yang jelas terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang
3. Lemahnya penegakan/ penindakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Menguatnya penegakan/ penindakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Adanya penegakan/ penindakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Presentasi penguatan penegakan hukum	Menyiapkan regulasi penegakan/penindakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Implementasi penyusunan Regulasi penegakan/penindakan hukum
				Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Pengawasan terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan
				Melaksanakan penegakan/penindakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Implementasi penegakan/penindakan hukum
				Menyiapkan Reward terhadap kegiatan yang menjaga fungsi lahan	Penerapan Reward terhadap kegiatan yang menjaga fungsi lahan
				Punishment terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan	Penerapan Punishment terhadap kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan
4. Kurangnya Diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	Meningkatnya Diseminasi hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	Meningkatnya kegiatan diseminasi pada pihak terkait terhadap perencanaan pembangunan terpadu	Tingkat kemudahan akses informasi kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	Menyiapkan media diseminasi hasil kajian risiko bencana	Penyediaan media diseminasi hasil kajian risiko bencana
				Menyusun rencana layanan diseminasi hasil kajian risiko bencana	Penyediaan rencana layanan diseminasi hasil kajian risiko bencana
	Meningkatnya	Meningkatnya	Tingkat kemudahan	Menyiapkan konsep	Penyediaan konsep

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	integrasi hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	kegiatan integrasi pada pihak terkait terhadap perencanaan pembangunan terpadu	akses integrasi informasi kajian risiko bencana	pengintegrasian hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu Mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	pengintegrasian hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu Pengintegrasian hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu
5. Lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek-aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Persentase Keterpaduan tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Menyiapkan tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan
	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Indek pembangunan manusia (IPM)	Menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidang penanggulangan bencana	Optimalisasi potensi sumber daya manusia yang handal di bidang penanggulangan bencana

Sumber: RPB Aceh 2023-2026

### 3.2.2 Rencana Pembangunan Aceh RPA 2023-2026

Perencanaan Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026 bertujuan untuk : Meningkatkan Pembangunan Demokrasi; Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional; Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19; Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana; Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026, pembahasan mengenai penanggulangan bencana masuk ke dalam isu strategis yang ke 13, yaitu optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana. Isu strategis ini kemudian diseleraskan menjadi Tujuan poin ke 6 yaitu, Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.

Dalam RPA 2023-2026 disebutkan bahwa Aceh memerlukan upaya mitigasi bencana dengan mengembangkan pembangunan yang sejalan dengan kapasitas lingkungan dan memperhitungkan faktor kerentanan terhadap bencana, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan RPA 2023-2026

Tujuan ke 6: Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini

### 3.2.3 RPK Lhokseumawe 2023-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022 akan berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2022. Pasal 201 poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan

suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan menengah Kota Lhokseumawe sampai dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi dasar disusunnya Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen ini menjadi acuan pembangunan dalam rentang 3 tahun dan memuat isu strategis dalam berbagai bidang, dan juga upaya integrasi pembangunan dengan penanggulangan bencana. walaupun tidak terdapat Isu Strategis terkait kebencanaan, namun ada tertuang dalam isu strategis yang pertama, yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Kebijakan, Sasaran, Strategi dan Program. Adapun program yang terdapat dalam RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022, yaitu (1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran

<b>Tujuan</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan sistem pelayanan publik	1. Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.

Selanjutnya RPK Lhokseumawe tahun 2023-2026 merumuskan program pembangunan daerah yang diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana memuat beberapa program terkait kebencanaan diantaranya:

1. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Program yang telah ada ini belum memadai jika kita melihat dari trend bencana selama 10 tahun terakhir yang diperoleh dari hasil penggalan secara partisipatif pada saat Rapat koordinasi dengan SKPD instansi terkait, dimana ada 8 ancaman bencana yaitu;

- 1) Banjir
- 2) Gempa Bumi
- 3) Gelombang Pasang
- 4) Cuaca Extrim
- 5) Tsunami
- 6) Kebakaran Hutan dan Lahan
- 7) Tanah Longsor
- 8) Kekeringan

### **3.3 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prinsip, tujuan, tindakan penanggulangan bencana dan pembagian peran dan pelaku untuk setiap tahapan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi : 1) Pra bencana, 2) Saat tanggap darurat, dan 3) dan pascabencana. Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### **3.3.1 Kerangka Kerja Pra Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya ancaman bencana. Kehadiran suatu bencana akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengakibatkan banyak kerusakan dan juga kerugian bagi negara. Melakukan upaya-upaya pencegahan guna mempersiapkan kehadiran suatu bencana harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.

Upaya pra bencana menjadi tahapan yang sangat penting untuk dapat dimaksimalkan agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Prinsip penyelenggaraan pada tahap pra bencana di antaranya:

1. Partisipasi multi pihak
2. Keadilan
3. Kesetaraan
4. Profesionalisme
5. Kemandirian
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya
7. Tepat sasaran/efektif, dan
8. Berinvestasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Kota Lhokseumawe

Tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi ancaman/bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengurangan risiko bencana meliputi tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengalihan risiko bencana.

#### *Pencegahan*

Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya bencana. Dalam konteks pencegahan, upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana difokuskan kepada pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko.

#### *Mitigasi*

Mitigasi adalah serangkaian upaya melalui pembangunan *buffer* (Penghalang) struktur maupun non-struktur sehingga dapat mengurangi risiko bencana karena paparan kejadian bencana tidak sampai ke kerentanan dan kapasitas.

#### *Kesiapsiagaan*

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan difokuskan kepada upaya Penyelamatan diri atau evakuasi saat terjadi potensi bencana.

#### *Pengalihan risiko*

Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu. Bentuk pilihan tindakan akan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya dan akar masalah tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Lhokseumawe.

### **3.3.2 Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana)**

Penyelenggaraan penanggulangan saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Pengutamaan tanggung jawab pemerintah daerah Kab/Kota, dan
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi berperan melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah Kab/Kota.

Tujuan penanggulangan kedaruratan bencana adalah untuk melakukan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, memberi perlindungan pada kelompok rentan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Tindakan dalam penanggulangan kedaruratan bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya: pencarian dan Penyelamatan korban; pertolongan darurat; dan/atau evakuasi korban.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi : kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan Psikososial; dan penampungan dan tempat hunian.
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia) berupa Penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana.
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- b. Penyusunan rencana kontingensi.
- c. Pelatihan/Gladi/Simulasi serta uji sistem rencana-rencana operasional penanganan darurat bencana.

### 3.3.3 Kerangka Kerja Pascabencana (Pemulihan)

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan) pascabencana dilaksanakan antara lain dengan prinsip:

- a. Membangun partisipasi;
- b. Mengedepankan koordinasi;
- c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Menjaga kesinambungan;
- e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tujuan pemulihan pascabencana adalah melakukan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana agar kehidupan masyarakat pada wilayah terdampak dapat segera pulih kembali pascabencana. Tindakan pemulihan pascabencana meliputi:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana.
2. Penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Pengalokasian sumber daya dan dana.
4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berupa:
  - a. Rehabilitasi berupa perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
  - b. Melakukan kegiatan rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
6. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan.

7. Perbaikan lingkungan dan Kota Lhokseumawe aliran sungai di Kota Lhokseumawe bencana.
8. Perbaikan prasarana dan sarana umum.
9. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
10. Pemulihan Psikologis Social.
11. Pelayanan kesehatan.
12. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik.
13. Pemulihan sosial ekonomi budaya.
14. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
15. Pemulihan fungsi pemerintahan, dan
16. Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana.
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
6. Peningkatan fungsi pelayanan public.
7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat, dan
8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Menyusun peraturan/kebijakan tentang kompensasi/bantuan tunai bagi korban bencana.
2. Menyusun kebijakan/rencana relokasi pemukiman korban bencana agar tidak kembali bermukim di area/Kota Lhokseumawe yang rawan bencana.
3. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
4. Menyusun strategi pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur penting.

Tabel 3.5 Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana

<b>Peran Pra Bencana</b>	<b>Peran Saat Bencana</b>	<b>Peran Pascabencana</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Koordinasi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan kebijakan strategi penanggulangan bencana;</li> <li>2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;</li> <li>3) Penentuan standar kebutuhan minimum;</li> <li>4) Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;</li> <li>5) Pengurangan risiko bencana;</li> <li>6) Pembuatan peta rawan bencana;</li> <li>7) Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>8) Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan</li> <li>9) Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>Siaga Darurat</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;</li> <li>2) Pengkajian secara tepat dan cepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan;</li> <li>3) Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;</li> <li>4) Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik;</li> <li>5) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;</li> <li>6) Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning);</li> <li>7) Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan); dan</li> <li>8) Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>Rehabilitasi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan; prasarana dan sarana umum; dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>2) Pelayanan kesehatan;</li> <li>3) Rekonsiliasi dan resolusi konflik; dan</li> <li>4) Pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><u>Implementasi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>Tanggap Darurat</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk Pos Komando</li> <li>2) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>Rekontruksi</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan</li> </ol>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Peran Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Pascabencana
<p>2) Sosialisasi, Komunikasi, &amp; Edukasi Rawan Bencana Provinsi;</p> <p>3) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;</p> <p>4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;</p> <p>5) Pelatihan Pencegahan &amp; Mitigasi bencana;</p> <p>6) Pengelolaan risiko bencana;</p> <p>7) Penyusunan Rencana Kontijensi;</p> <p>8) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;</p> <p>9) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;</p> <p>10) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;</p> <p>11) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana;</p> <p>12) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana;</p> <p>13) Penanganan pascabencana provinsi;</p> <p>14) Respon cepat penanganan darurat bencana;</p> <p>15) Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>16) Respon cepat bencana non-alam epidemi/wabah penyakit;</p> <p>17) Penyediaan logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p>	<p>&amp; Pos Pendukung PDB (jika diperlukan);</p> <p>3) Mengirimkan TRC BPBD ke lokasi bencana;</p> <p>4) Melapor Kepala Daerah untuk menetapkan status bencana &amp; menginformasikan kepada masyarakat;</p> <p>5) Memerintahkan Kadis Kesehatan, Sosial, PU, Perhubungan dan Lintas Sektor untuk melakukan kegiatan tanggap darurat;</p> <p>6) Mencairkan dana siap pakai (DSP);</p> <p>7) Menyiapkan &amp; mengirimkan logistik bencana ke lokasi bencana;</p> <p>8) Mengkoordinasikan bantuan bencana dari luar daerah;</p> <p>9) Analisis lingkup bencana dan analisis jumlah korban; dan</p> <p>10) Menyusun Rencana Operasi (Operation Plan) bersama Incident Commander</p>	<p>meliputi Pembangunan kembali prasarana dan sarana; serta sarana sosial masyarakat;</p> <p>2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;</p> <p>3) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;</p> <p>4) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;</p> <p>5) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat</p>

Peran Pra Bencana	Peran Saat Bencana	Peran Pascabencana
18) Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan; 19) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi; 20) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah; dan 21) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;		
	<p style="text-align: center;"><b><u>Transisi Darurat-Pemulihan</u></b></p> 1) Penilaian kebutuhan pascabencana; dan 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

Tabel 3.6 Peran Para Pihak di Kota Lhokseumawe dalam Kerangka Penanggulangan Bencana

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	BAPPEDA	1) Memastikan harmoni program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan 2) Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana	-	1) Memastikan perencanaan program rekonstruksi dan rehabilitasi pas bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
2.	Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	DINKES	<p>1) Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana dan langkah-langkah pertolongan pertama pada saat bencana terjadi</p> <p>2) Persiapan Peralatan Medis dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Memastikan bahwa peralatan medis dan perlengkapan pertolongan pertama tersedia dan siap digunakan dalam situasi darurat</p> <p>3) Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Relawan Melatih tenaga kesehatan dan relawan untuk menghadapi keadaan darurat, termasuk pemberian pertolongan pertama, penanganan cedera, dan evakuasi korban</p> <p>4) Pengorganisasian Sistem Evakuasi dan Penyelamatan Membuat rencana evakuasi dan</p>	<p>1) Penyediaan Pelayanan Medis Darurat Menyediakan pelayanan medis darurat di titik-titik evakuasi dan pusat pengungsian untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana</p> <p>2) Penanganan Korban Cedera dan Trauma Memberikan perawatan medis kepada korban cedera dan trauma serta melakukan evakuasi ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut jika diperlukan</p> <p>3) Pengendalian Penyakit Menular Melakukan survei penyakit untuk mencegah terjadinya wabah penyakit menular di tempat-tempat pengungsian dan lokasi terdampak bencana lainnya</p> <p>4) Distribusi Obat-obatan dan Perlengkapan Medis Mengatur distribusi obat-obatan, peralatan medis, dan</p>	<p>1) Evaluasi Dampak Kesehatan Melakukan evaluasi terhadap dampak kesehatan yang disebabkan oleh bencana, termasuk cedera fisik, gangguan kesehatan mental, dan penyebaran penyakit menular</p> <p>2) Pelayanan Kesehatan Pascabencana Memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban bencana yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang, rehabilitasi, dan konseling psikologis</p> <p>3) Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan Memulihkan dan merekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana agar layanan kesehatan dapat kembali beroperasi secara normal</p> <p>4) Pencegahan Penyakit dan Gangguan Kesehatan</p>

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
			<p>Penyelamatan yang efektif, termasuk lokasi pengungsian dan rute evakuasi yang aman</p> <p>5) Pemetaan Sumber Daya Kesehatan Mengidentifikasi fasilitas kesehatan dan sumber daya medis yang tersedia di wilayah yang rentan terhadap bencana, serta mengkoordinasikan penggunaan sumber daya tersebut dalam situasi darurat</p> <p>6) Pengembangan Rencana Tanggap Darurat Menyusun rencana tanggap darurat yang meliputi tindakan cepat dalam distribusi obat-obatan, pelayanan medis, dan penanganan keadaan darurat lainnya</p> <p>7) Pemantauan Kesehatan Masyarakat Memantau kesehatan masyarakat secara berkala untuk mendeteksi adanya penyakit menular, gangguan kesehatan mental, dan</p>	<p>perlengkapan lainnya ke fasilitas kesehatan dan pos-pos pengungsian</p> <p>5) Pemberian Layanan Kesehatan Mental Memberikan layanan kesehatan mental kepada korban bencana, relawan, dan petugas penanganan bencana untuk membantu mengatasi stres dan trauma psikologis</p> <p>6) Koordinasi dengan Instansi Terkait Berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), MPU dan relawan untuk memaksimalkan efektivitas tanggap darurat</p> <p>7) Edukasi Masyarakat Terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan, pertolongan pertama, dan tindakan keselamatan selama</p>	<p>Melakukan program pencegahan penyakit, vaksinasi, sanitasi, dan pemantauan kesehatan lingkungan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit pascabencana</p> <p>5) Pemberdayaan Masyarakat Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan, kesehatan lingkungan, dan cara menghadapi potensi ancaman kesehatan pascabencana</p> <p>6) Pemulihan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Memastikan pasokan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat terdampak, mengurangi risiko penyebaran penyakit melalui air dan lingkungan</p> <p>7) Konseling dan Dukungan Psikologis Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
			kebutuhan kesehatan lainnya yang mungkin timbul setelah terjadinya bencana	masa tanggap darurat	kepada korban bencana, relawan, dan petugas kesehatan yang mungkin mengalami trauma dan stres pascabencana 8) Koordinasi dengan Pihak Terkait Terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk mendukung upaya pemulihan kesehatan pascabencana
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe	DLH	Penyusunan rencana kedaruratan atau rencana kontijensi, yaitu rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi tak terduga/darurat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Melakukan rencana operasional/ aktivitas dari rencana kedaruratan yang telah disusun sebelumnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penyusunan rencana pemulihan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	DPMG	Melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Gampong untuk memastikan memasukkan pada dokumen RPJMG dan RKPG anggaran kegiatan penanggulangan bencana	Memantau operasi tanggap darurat di Pos Gampong dan memastikan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG)	Memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
			dengan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dari sumber Dana Desa (DD) ataupun sumber dana lainnya		
5.	Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe	DISHUB		Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana	
6.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	DISKOMINSA	1) Melakukan pemantauan dan pengawasan atas informasi bohong (hoaks) 2) Perencanaan Pengamanan terhadap Pusat Data	1) Melakukan pemblokiran terhadap laporan hoaks melalui penyampaian pada aduan.id 2) Disaster recovery terhadap infra dan pusat data	1) Koordinasi dengan instansi terkait dan Kemenkominfo RI 2) Koordinasi dengan instansi terkait, BSSN dan Kemenkominfo
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	DINAS PUPR	Penyusunan rencana kedaruratan atau rencana kontijensi, yaitu rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi tak terduga/darurat	Melakukan rencana operasional/ aktivitas dari rencana kedaruratan yang telah disusun sebelumnya	Penyusunan rencana pemulihan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	DP3AP2KB	Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan membersihkan lingkungan sekitar masyarakat sebelum adanya bencana	Mendirikan dapur umum darurat, menyiapkan logistik, dan melakukan assessment awal	Melakukan pemulihan psikologis korban dengan trauma healing

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
	Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe				
9.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe	DISPORAPAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi pemuda tanggap bencana</li> <li>2) Sosialisasi sadar wisata dan aksi bersih di destinasi-destinasi wisata</li> <li>3) Membantu memastikan adanya rambu-rambu rawan bencana dan rambu-rambu jalur evakuasi di destinasi wisata</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membantu mendampingi perbaikan-perbaikan destinasi wisata yang terkena dampak bencana</li> <li>2) Mempromosikan destinasi wisata yang aman untuk membangkitkan kembali minat wisatawan</li> </ol>
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	DINAS PK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana</li> <li>2) Melakukan kajian analisis risiko, kapasitas dan kerentanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya</li> <li>3) Membuat/menentukan alat peringatan dini di sekolah</li> <li>4) Membuat peta risiko ancaman dan peta evakuasi sekolah</li> <li>5) Membuat jalur dan rambu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan kaji cepat dan tepat di lokasi bencana berdasarkan cakupan luas dan dampak bencana di Satuan Pendidikan dan lingkungan sekitar</li> <li>2) Melakukan Penyelamatan dan evakuasi pada warga satuan pendidikan</li> <li>3) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan berdasarkan hasil assessment yang ada seperti kebutuhan makanan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar (Pangan, sandang dan papan)</li> <li>2) Melakukan layanan pendidikan situasi darurat</li> <li>3) Melakukan layanan dukungan Psikososial</li> <li>4) Melakukan proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada satuan pendidikan dan lingkungan sekitarnya</li> </ol>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
			evakuasi di sekolah 6) Membuat rencana aksi dan SOP kedaruratan sekolah 7) Melakukan pendataan kontak emergency (Puskesmas, Rumah Sakit, Polisi, BPBD setempat) 8) Melakukan kampanye kesiapsiagaan di sekolah 9) Melakukan simulasi kesiapsiagaan sekolah	minuman, layanan kesehatan dan layanan pendidikan darurat 4) Melakukan perlindungan kepada kelompok rentan dengan prioritas layanan 5) Melakukan dukungan Psikososial 6) Menyediakan layanan fasilitas kepada kelompok rentan	
11.	Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	DINSOS	1) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana 2) Pembentukan dan Pengembangan Kampung Siaga Bencana 3) Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Lokasi Rawan Bencana 4) Evakuasi Bersama Pihak Terkait Terlebih dalam Bidang Perlindungan Sosial atas Ancaman Bahaya	1) Mengidentifikasi / mendata Korban Bencana 2) Melaksanakan Operasi Tanggap Darurat pada Bidang Penampungan Sementara/ Pengungsi 3) Melaksanakan Operasi Tanggap Darurat untuk Bidang Dapur Umum/ masa panik 4) Melaksanakan Operasi Tanggap Darurat pada Bidang Logistik/ Psikososial	1) Mengidentifikasi Data Kerugian Korban Bencana 2) Mendata Kerusakan Rumah/ Tempat Tinggal Korban Bencana 3) Melakukan Penanganan Psikososial dan Pemulihan Sosial Korban Bencana 4) Memberikan Bantuan Sosial Lainnya yang di Butuhkan untuk Masyarakat Terkena Musibah
12.	Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan	DKPPP			

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
	Pangan Kota Lhokseumawe				
13.	Kantor Camat Muara Satu	Kantor Camat Muara Satu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan Himbauan kepada masyarakat terkait pengurangan risiko bencana</li> <li>2) Melaksanakan Koordinasi dengan aparatur desa terkait seruan bersama tentang desa rawan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait termasuk Unsur Muspika Kecamatan terkait Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan</li> <li>2) Melaporkan kepada Pimpinan tentang Kondisi Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Koordinasi terkait Data Kerugian Akibat Bencana</li> <li>2) Melaporkan kepada pimpinan terkait dampak dan kerugian akibat bencana</li> </ol>
14.	Kantor Camat Muara Dua	Kantor Camat Muara Dua	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Gampong untuk memastikan adanya kesiapan dan perencanaan yang dilakukan sebelum memasukkan pada Dokumen RPJMG dan RKPG anggaran kegiatan Penanggulangan Bencana dengan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dari sumber Dana Desa (DD) ataupun sumber dana lainnya	Memantau Operasi Tanggap Darurat di Pos Gampong, dan memastikan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG)	Memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan penanggulangan bencana terlaksana dengan baik
15.	Kantor Camat Banda Sakti	Kantor Camat Banda Sakti			
16.	Kantor Camat Blang Mangat	Kantor Camat Blang Mangat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan Himbauan Kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Koordinasi dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Koordinasi terkait</li> </ol>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
			<p>Masyarakat Terkait Pengurangan Risiko Bencana</p> <p>2) Melakukan Koordinasi dengan Aparatur Desa terkait Bersama tentang Desa Rawan Bencana</p> <p>3) Pembangunan Saluran Gampong Mane Kareung dari Jln Line (dari Pembuang Aceh Utara) di Pembuangan I dan II</p> <p>4) Rehabilitasi Saluran dari Gampong Neuheun Acut ke Mane Kareung Jln Line untuk mencegah Pembuangan Air yang selama ini hanya melalui arah sebelah kanan Mane Kareung sumbat banjir selama ini dari Gampong Neuheun Acut</p> <p>5) Rehabilitasi Saluran di Jembatan Gampong Rayeuk Kareung</p> <p>6) Normalisasi Sungai Alue Raya secara Optimal</p> <p>7) Normalisasi Saluran Pertanian dari Gampong Mane Kareung s/d Gampong Blang Cut</p> <p>8) Normalisa Saluran di Gampong</p>	<p>Pihak Terkait termasuk Unsur Muspika Kecamatan terkait Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan</p> <p>2) Melaporkan kepada Pimpinan tentang Kondisi Penanggulangan Bencana</p> <p>3) Koordinasi dengan Pihak Gampong Mane Kareung dan Gampong Neuheun</p> <p>4) Melakukan Koordinasi antara Gampong Mane Kareung dan Gampong Neuhueun Aceh Utara</p> <p>5) Koordinasi masalah Saluran di Jembatan Gampong Rayeuk Kareung</p> <p>6) Melakukan Koordinasi Normalisasi Sungai Alue Raya secara Optimal</p> <p>7) Melakukan Koordinasi Saluran Pertanian dari Gampong Mane Kareung s/d Gampong Blang Cut</p> <p>8) Melakukan Koordinasi Normalisasi Saluran di Gampong Aluei Lim dengan</p>	<p>Data Kerugian Akibat Bencana</p> <p>2) Melakukan kepada Pimpinan terkait Dampak dan Kerugian akibat Bencana</p> <p>3) Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Dinas/ instansi	Akronim	Pra bencana	Tanggap darurat	Pascabencana
			Alue Lim 9) Pembuatan Talut Sungai Gampong Blang Buloh 10)Normalisasi Sungai Gampong Blang Buloh Tiap Tahun 11)Pelebaran dan Turap Saluaran di Gampong Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjo dan Gampong Jeulikat	Gampong Blang Buloh 9) Melakukan Koordinasi tentang Normalisasi Sungai Gampong Blang Buloh 10)Melakukan Koordinasi Pelebaran dan Turab Saluaran Gampong Blang Weu Baroh, Blang Weu Panjo dan Gampong Jeulikat	

### **3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penggunaan dana untuk penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dana tersebut digunakan sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahap pra bencana, tanggap darurat, dan/atau pascabencana. Adapun sumber anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dapat berasal dari anggaran kota hingga anggaran pusat yaitu APBD, APBA, dan APBN. Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dibantu dengan pendanaan oleh pihak ketiga seperti LSM, Badan Usaha, atau lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **3.4.1 Mekanisme Penganggaran dan Pendanaan**

Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Kota Lhokseumawe baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh maupun pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap pra bencana, pemerintah menggunakan dana kontinjensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBA dan APBK. Pendanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN, APBA atau APBK dan dana kontinjensi yang bersumber dari APBN. Pendanaan tahap pra bencana dibagi menjadi dua situasi, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana (kecuali untuk kegiatan kesiapsiagaan), seluruhnya menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBK, yang dialokasikan pada anggaran BNPB atau BPBD.

Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dapat menyediakan dana siap pakai dalam APBK yang ditempatkan dalam anggaran badan penanggulangan bencana Kota Lhokseumawe (BPBD). Sedangkan untuk tahap pascabencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan dana darurat. Kedua dana tersebut dapat bersumber dari APBN, APBA maupun APBK yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

Penggunaan dana kontinjensi hanya diperuntukkan bagi kegiatan kesiapsiagaan saat terdapat potensi terjadinya bencana. Dana kontinjensi merupakan dana yang dicadangkan untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya bencana tertentu melalui kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan ini mencakup berbagai upaya untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah yang tepat guna dan efektif, seperti evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan dalam situasi dimana terdapat potensi terjadinya bencana dan dikategorikan sebagai tahap pra-bencana karena kejadian bencana belum benar-benar terjadi.

### **3.4.2 Penggunaan Dana**

Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap prabencana tersebut sepenuhnya mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang keuangan negara. Untuk dana yang bersumber dari APBK harus tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya.

Tahap Tanggap Darurat Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, Penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pada tahap tanggap darurat, sumber pendanaannya dapat berasal dari tiga sumber: pertama adalah dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBA atau APBK untuk masing-masing instansi, kedua adalah dana siap pakai dalam APBN dan APBA yang telah dialokasikan dalam anggaran BNPB maupun BPBA dan ketiga adalah dana siap pakai dalam APBK yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBK secara memadai. Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat tersebut digunakan untuk:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b. Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, 6 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 7 Pasal 1 angka 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan. dan
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pemberian dana siap pakai oleh pemerintah kepada pemerintah Kota Lhokseumawe didasarkan pada ketetapan keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan Kota Lhokseumawe perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB dan BPBA, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB dan BPBA.

Dana siap pakai digunakan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana (BNPB, BPBA, BPBD Kota/Kabupaten dan Instansi /Lembaga/Organisasi terkait). Terhadap penggunaan dana siap pakai diberikan perlakuan khusus, mengenai pengadaan barang bisa dilakukan dengan pembelian/pengadaan langsung. Perlakuan khusus ini juga berarti, meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Penggunaan dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD hanya terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan Penyelamatan korban bencana.
- b. Pertolongan darurat.
- c. Evakuasi korban bencana.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- e. Pangan.
- f. Sandang.
- g. Pelayanan kesehatan, dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara

Untuk dana siap pakai yang bersumber dari APBN prosedur penyalurannya dimulai dengan penyampaian usulan bantuan dana oleh pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kepala BNPB dengan menyertakan laporan kejadian hasil/informasi Tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, 8 Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 9 Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Dana Siap Pakai 10 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 6 kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan. Setelah menerima

usulan dari Kota Lhokseumawe/Instansi/Lembaga terkait, laporan tim reaksi cepat, dan hasil rapat koordinasi atau inisiatif BNPB, maka jumlah besaran bantuan (uang tunai, Barang dan jasa) ditetapkan. Setelah jumlah bantuan ditetapkan, bantuan yang berasal dari dana siap pakai diserahkan langsung kepada Kota Lhokseumawe yang terancam bencana dan terkena bencana.

Pentingnya, optimalisasi penggunaan Dana Desa. Permendesa No 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Klasifikasi belanja dalam dana desa ini terdiri atas 5 hal, yang mana salah satunya yaitu Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, terdiri atas sub bidang:

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat; dan
- 3) keadaan mendesak.

Belanja tak terduga bisa masuk dalam penanggulangan bencana. Tahapan pelaksanaan sendiri terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pihak yang berwenang mengelola bantuan dari dana siap pakai di Kota Lhokseumawe adalah Kepala BPBA dan BPBD Kabupaten/Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menerima bantuan dana siap pakai wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana siap pakai. Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir. Sedangkan untuk dana siap pakai yang tidak digunakan sampai dengan akhir masa status keadaan darurat bencana, harus disetorkan kembali ke kas negara bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban dana siap pakai.

Tahap Pascabencana dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran

kegiatan rehabilitasi. 11 Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 12 Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 13 Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 7 Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana Kota Lhokseumawe. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kegiatan rekonstruksi meliputi kegiatan rekonstruksi fisik dan rekonstruksi non-fisik. Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Rekonstruksi non-fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibiayai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBK dalam alokasi anggaran masing-masing instansi. Apabila dana Penanggulangan bencana dari APBK tidak mencukupi, maka pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengajukan pembiayaan pascabencana kepada pemerintah dengan menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari APBN. Dana tersebut adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai bantuan penanganan pascabencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN.

Dana bantuan sosial berpola hibah tidak termasuk dalam dana transfer, karena itu tidak dimasukkan dalam APBK. Jumlah dana yang telah diterima cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (*CaLK*) dalam pertanggungjawaban APBK. Mekanisme pengajuan dan penggunaan

dana bantuan sosial berpola hibah secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Penerima dana bantuan sosial berpola hibah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan APBN dengan beberapa penyesuaian. Dana bantuan sosial berpola hibah yang belum digunakan pada masa akhir periode, harus disetorkan kembali ke kas negara. Apabila setelah penyetoran kembali dana tersebut ke kas negara ada pekerjaan yang belum dibayar, maka pekerjaan tersebut wajib dibiayai dari dana APBK atau sumber lain yang sah.

Untuk kegiatan pada tahap pascabencana, di samping dana bantuan sosial berpola hibah yang diberikan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah juga menyiapkan Dana Darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Kota Lhokseumawe yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan Kota Lhokseumawe dan dikelola dengan mekanisme APBK. Syarat utama pemberian dana darurat kepada Kota Lhokseumawe adalah adanya bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan pendanaan dari APBK.

Penggolongan bencana nasional atau peristiwa luar biasa serta batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksinya harus ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian dana darurat diakui pemerintah sebagai belanja transfer kepada Kota Lhokseumawe, dan oleh Kota Lhokseumawe dilaksanakan melalui mekanisme APBK sebagai pendapatan Kota Lhokseumawe pada bagian lain-lain pendapatan. Penggunaan dana darurat adalah untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe, dan tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang telah dibiayai oleh APBN. 16 Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Juknis Permintaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, hal. 3 dan 8. Pemerintah Kota Lhokseumawe wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana darurat. Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan terdapat sisa dana darurat pada kas Kota Lhokseumawe, maka dana darurat tersebut masih dapat digunakan sepanjang untuk:

- a. Kegiatan yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan. dan
- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh *force majeure*.

Di samping hal tersebut, pemerintah Kota Lhokseumawe juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana darurat

kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Jika sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya masih juga terdapat sisa anggaran Dana Darurat pada kas Kota Lhokseumawe, maka sisa anggaran tersebut diperhitungkan sebagai tambahan kecukupan APBK pada tahun anggaran berikutnya. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pada tahap tanggap darurat, pemerintah atau pemerintah Kota Lhokseumawe segera menentukan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan tingkatan/skala bencana. Sesuai dengan bunyi ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk bencana dalam skala nasional penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh presiden, untuk skala wilayah provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (dalam hal ini BNPB atau BPBD) yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penetapan status bencana dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana 18 Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat 19 Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Visi Kota Lhokseumawe adalah Kota Lhokseumawe yang Bersih, Indah, Tertib dan Aman (BERIMAN) dengan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Tujuan ini sesuai dengan Sesuai dengan Visi Kota Lhokseumawe 2025-2045 yaitu menjadikan KOTA LHOKSEUMAWE YANG ISLAMI, MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN, dimana yang dimaksud dengan BERKELANJUTAN adalah terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana dan krisis iklim serta ketangguhan ekonomi.

Sementara Misi Kota Lhokseumawe adalah (1). Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika berbudaya dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Islami adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang religius dan bertakwa kepada Allah SWT, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan intern dan antar umat beragama, menerapkan nilai-nilai budaya dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Lhokseumawe; (2). Mewujudkan perekonomian yang maju melalui pembangunan dan Pemerataan Ekonomi serta Kemandirian Daerah adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berorientasi pada keunggulan dan kompetitif dengan berbasis pada potensi yang ada di daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan serta membangun ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah; (3). Mewujudkan sumber daya manusia Kota Lhokseumawe unggul yang berkualitas dan berdaya saing tinggi adalah membangun sumber daya manusia yang sehat, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek.

Transformasi sumber daya manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial; (4). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Akuntabel, Efektif, Efisien dan Inovatif adalah penyelenggara pemerintahan ke depannya dapat menonjol dalam hal akuntabel, efektif, efisien dan inovatif. meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, memantapkan kelembagaan demokrasi; memperkuat peran masyarakat; memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah; meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, memihak masyarakat dan tidak diskriminatif; (5). Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai

modal pembangunan; (6). Mewujudkan keterpaduan penataan ruang serta pemenuhan kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan yang berkualitas adalah menciptakan integrasi pusat-pusat kegiatan melalui pembangunan dan pengendalian tata ruang yang baik untuk menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dasar.

Dalam hal Kebencanaan, yang menjadi isu strategis adalah

1. Lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengarusutamakan aspek penanggulangan bencana
2. Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana
3. Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan
4. Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahapan terpenting dalam perencanaan penanggulangan bencana dan akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam perumusan kebijakan pada perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Tujuan penanggulangan bencana merupakan penjabaran atau implementasi yang dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis terkait kebencanaan yang ada di daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran penanggulangan bencana merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang diharapkan akan dicapai secara nyata oleh daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Untuk dapat menjawab isu strategis, diperlukan 1-3 tujuan yang terdiri dari 1-3 sasaran dan indikator sasaran penanggulangan bencana. Isu strategis daerah merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap penting diselesaikan oleh RPB dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Ketercapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dilihat berdasarkan capaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks, yang

menunjukkan riwayat nyata tingkat risiko suatu wilayah berdasarkan penilaian dari kapasitas, kerentanan, dan potensi bencana. Adapun IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut dalam kondisi tetap. Penilaian IRBI dan IKD dipandang secara bertolak belakang, dimana semakin besar nilai pada IRBI menunjukkan risiko bencana yang semakin tinggi, sedangkan pada IKD bermakna tingkat kapasitas daerah semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Adapun target capaian IRBI dan IKD Kota Lhokseumawe 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Capaian IRBI dan IKD Kota Lhokseumawe 2025-2029

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Risiko Bencana Indonesia	124,22	122,00	120,00	198,00	196,00
2.	Indeks Kapasitas Daerah	0,47	0,52	0,54	0,55	0,59
3.	Indeks Prioritas IKD					
	- Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80
	- Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	- Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,38	0,38	0,50	0,50	0,50
	- Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
	- Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50
	- Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
	- Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,38	0,38	0,38	0,50	0,50

Guna terus meningkatkan nilai IRBI dan IKD guna mencapai Kota Lhokseumawe yang aman, tangguh, dan siaga bencana, maka dibutuhkan serangkaian tujuan dan sasaran yang tepat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mengurusutamakan aspek penanggulangan bencana	Mengintegrasikan aspek-aspek penanggulangan bencana ke dalam perencanaan daerah	Aspek penanggulangan bencana tertuang ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana.
	Melaksanakan Koordinasi dan komunikasi penanggulangan bencana terpadu lintas pemangku kepentingan	Tersedianya perangkat, alur koordinasi dan terjalannya komunikasi terpadu penanganan bencana lintas pemangku kepentingan	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pascabencana)	Tingkat keberhasilan koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana terpadu.
	Meningkatkan kualitas penganggaran/pembiayaan penanggulangan bencana untuk Pembangunan berkelanjutan	Tersedianya pos anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana di masing-masing sektor	Terlaksananya penganggaran dan pembiayaan penanggulangan bencana	Persentase jumlah APBK dan sumber pendapatan lainnya yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana
	Meningkatkan diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	Perencanaan pembangunan berbasis analisis risiko bencana	Terlaksananya diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana	Tingkat akses informasi kajian risiko bencana
Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan	Efektifnya penganggaran pada kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Ketersediaan dan kesesuaian nomenklatur dan mata anggaran kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Tersedianya anggaran program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota	Jumlah alokasi anggaran untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
pascabencana			Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya
	Optimalisasi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Pengarusutamaan dan optimalnya kegiatan yang berdampak pada berkurangnya dampak bencana dan jumlah korban jiwa	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan
Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan	Optimalnya sistem informasi kebencanaan	Terkelolanya manajemen pengetahuan, pola informasi, model diseminasi dan kemampuan respon target	Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time</i> data, serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.
	Standarisasi model, metode dan materi diklat penanggulangan bencana yang mudah di dipahami para pihak	Model dan metode yang terstandarisasi	Terciptanya modul diklat penanggulangan bencana yang sesuai standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe.	Lahirnya modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Terciptanya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Tersedianya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe
	Peningkatan Kapasitas aparatur dan masyarakat melalui diklat penanggulangan bencana	Tersedianya pelatih/fasilitator/narasumber/tenaga ahli profesional kebencanaan yang tersertifikasi	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Tingkat pengetahuan, keahlian dan kemandirian aparatur dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan kebencanaan
	Optimalnya sistem logistik terpadu dalam penanggulangan bencana	Alur distribusi dan sistem pengelolaan logistik yang mudah diakses dan tepat waktu	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Sistem logistik terpadu dan terintegrasi.
Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Sinergisnya pelaksanaan Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologi untuk Pembangunan berkelanjutan	Persentase Rencana Pembangunan yang Mengintegrasikan Prinsip Kelestarian Lingkungan	Terintegrasinya prinsip dan aksi berbasis kelestarian lingkungan / ekologis dalam setiap perencanaan pembangunan	Persentase pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan
	Perencanaan tata ruang dan percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Aspek kebencanaan tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang dan tersusunnya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Perencanaan tata ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	Persentase implementasi penataan ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
			Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Tersedianya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Pengelolaan Sumber daya air yang berkelanjutan, efisien dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta mencegah bencana	Tingkat Efisiensi dan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;</p> <p>Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Resiliensi terhadap bencana perubahan iklim di Kota Lhokseumawe</p>	<p>Indeks kualitas lingkungan hidup, indeks implementasi ekonomi hijau, dan Indeks Ketahanan air terhadap bencana hidrometeorologi.</p> <p>Tingkat ketangguhan masyarakat</p>

## 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Lhokseumawe mencapai tujuan dan sasaran RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi penanggulangan bencana. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan saja, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi penanggulangan bencana merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif penanggulangan bencana untuk mewujudkan capaian yang diinginkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam manajemen perencanaan penanggulangan bencana Kota Lhokseumawe (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan perencanaan penanggulangan bencana yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi perencanaan penanggulangan bencana agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil perencanaan penanggulangan bencana yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Isu Strategis, tujuan, Sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mengurusutamakan aspek penanggulangan bencana	Mengintegrasikan aspek-aspek penanggulangan bencana ke dalam perencanaan daerah	Aspek penanggulangan bencana tertuang ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana.	Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana	Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana
	Melaksanakan Koordinasi dan komunikasi penanggulangan bencana terpadu lintas pemangku kepentingan	Tersedianya perangkat, alur koordinasi dan terjalannya komunikasi terpadu penanganan bencana lintas pemangku kepentingan	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pascabencana)	Tingkat keberhasilan koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana terpadu.	Membangun infrastruktur komunikasi, pusat koordinasi dan membangun proses komunikasi kebencanaan yang handal lintas pemangku kepentingan	Penyediaan infrastruktur komunikasi, pusat koordinasi dan proses komunikasi kebencanaan yang handal lintas pemangku kepentingan
	Meningkatkan kualitas penganggaran/pembiayaan penanggulangan bencana untuk Pembangunan berkelanjutan	Tersedianya pos anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana di masing-masing sektor	Terlaksananya penganggaran dan pembiayaan penanggulangan bencana	Persentase jumlah APBK dan sumber pendapatan lainnya yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana	Meningkatkan persentase alokasi APBK dan sumber pendapatan lainnya untuk penanggulangan bencana melalui advokasi, perencanaan berbasis data, kemitraan strategis, integrasi	Peningkatan persentase alokasi APBK dan sumber pendapatan lainnya untuk penanggulangan bencana melalui advokasi, perencanaan berbasis data, kemitraan strategis, integrasi

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, transparansi, serta pengembangan instrumen keuangan inovatif.	dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, transparansi, serta pengembangan instrumen keuangan inovatif.
	Meningkatkan diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan terpadu	Perencanaan pembangunan berbasis analisis risiko bencana	Terlaksananya diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana	Tingkat akses informasi kajian risiko bencana	Membuka akses informasi kawasan rawan bencana berdasarkan analisis kajian risiko bencana	Pembukaan akses dan penyusunan regulasi yang mewajibkan pemanfaatan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan terpadu
Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Efektifnya penganggaran pada kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Ketersediaan dan kesesuaian nomenklatur dan mata anggaran kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Tersedianya anggaran program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan	Jumlah alokasi anggaran untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota	Menyiapkan alokasi anggaran yang efektif untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup	Penyiapan dan pemantauan alokasi anggaran yang efektif untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			partner pentahelix lainnya	Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya
	Optimalisasi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Pengarusutamaan dan optimalnya kegiatan yang berdampak pada berkurangnya dampak bencana dan jumlah korban jiwa	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Melaksanakan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara efektif dan terpadu	Pelaksanaan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara efektif dan terpadu
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja	Tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan	Mengukur tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan	Penilaian tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya			
Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan	Optimalnya sistem informasi kebencanaan	Terkelolanya manajemen pengetahuan, pola informasi, model diseminasi dan kemampuan respon target	Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time data</i> , serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.	Menyiapkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time data</i> , serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.	Penyediaan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time data</i> , serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.
	Standarisasi model, metode dan materi diklat penanggulangan bencana yang mudah di dipahami para pihak.	Model dan metode yang terstandarisasi	Terciptanya modul diklat penanggulangan bencana yang sesuai standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe.	Lahirnya modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Menyusun modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Penyusunan modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe
			Terciptanya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Tersedianya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Menyediakan kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Penyediaan kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan Kapasitas aparatur dan masyarakat melalui diklat penanggulangan bencana	Tersedianya pelatih/fasilitator/narasumber/tenaga ahli profesional kebencanaan yang tersertifikasi	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Tingkat pengetahuan, keahlian dan kemandirian aparatur dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan kebencanaan	Menyiapkan standarisasi pelatihan kebencanaan dan sertifikasi kompetensi aparatur dan masyarakat secara profesional	Penyediaan standarisasi pelatihan kebencanaan dan sertifikasi kompetensi aparatur dan masyarakat secara profesional
	Optimalnya sistem logistik terpadu dalam penanggulangan bencana	Alur distribusi dan sistem pengelolaan logistik yang mudah diakses dan tepat waktu	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Sistem logistik terpadu dan terintegrasi.	Menyediakan sistem logistik terpadu dan terintegrasi.	Penyediaan sistem logistik terpadu dan terintegrasi.
Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Sinergisnya pelaksanaan Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologi untuk Pembangunan berkelanjutan	Persentase Rencana Pembangunan yang Mengintegrasikan Prinsip Kelestarian Lingkungan	Terintegrasinya prinsip dan aksi berbasis kelestarian lingkungan / ekologis dalam setiap perencanaan pembangunan	Persentase pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Melaksanakan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan
	Perencanaan tata ruang dan percepatan penyusunan panduan dan rencana	Aspek kebencanaan tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang dan	Perencanaan tata ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang	Persentase implementasi penataan ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan	Mengimplementasikan penataan ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan	Pengimplementasian penataan ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	tersusunnya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	berketahanan bencana dan iklim;	bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	berketahanan bencana dan iklim
			Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Tersedianya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Menyediakan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Penyediaan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;
	Pengelolaan Sumber daya air yang berkelanjutan, efisien dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta mencegah bencana	Tuntasnya permasalahan terkait manajemen sumber daya air	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Indeks kualitas lingkungan hidup, indeks implementasi ekonomi hijau, dan Indeks Ketahanan air terhadap bencana hidrometeorologi.	Implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan air berkelanjutan, edukasi masyarakat, kolaborasi multi-pihak, dan adopsi teknologi ramah lingkungan.	Pelaksanaan Implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan air berkelanjutan, edukasi masyarakat, kolaborasi multi-pihak, dan adopsi teknologi ramah lingkungan.
			Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Resiliensi	Tingkat ketangguhan	Melaksanakan perencanaan berbasis risiko,	Pelaksanaan perencanaan berbasis risiko,

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			terhadap bencana perubahan iklim di Kota Lhokseumawe	masyarakat	penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.	penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

### **4.3 Program Kebencanaan**

Penyusunan program dan fokus prioritas penanggulangan bencana dilakukan dengan memadukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ada 3 (tiga) sasaran utama RPB dalam pembangunan tingkat Kabupaten yaitu:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, karena RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari rencana pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan legalitas agar menjadi sebuah panduan teknokratik bagi daerah. Ketetapan hukum ini dapat mengikat seluruh instansi perangkat daerah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
2. Dokumen RPB menjamin anggaran penanggulangan Bencana di Kota Lhokseumawe tertampung dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.
3. Menjadikan dokumen RPB sebagai acuan bagi para pihak dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan kebencanaan baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pascabencana.

Tabel 4.4 Program Kebencanaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Jumlah dan jenis dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana.	Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana	Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan aspek penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12 Program Penyelenggaraan	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
					Penataan Ruang	
				2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong
Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pascabencana)	Tingkat keberhasilan koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana terpadu.	Membangun infrastruktur komunikasi, pusat koordinasi dan membangun proses komunikasi kebencanaan yang handal lintas pemangku kepentingan	Penyediaan infrastruktur komunikasi, pusat koordinasi dan proses komunikasi kebencanaan yang handal lintas pemangku kepentingan	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program Penanganan Bencana	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat
				Pengelolaan Persampahan	2.11.11 Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terkoordinasinya pengarusutamaan gender dan perempuan dalam penanggulangan bencana
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
Terlaksananya penganggaran dan pembiayaan penanggulangan bencana	Persentase jumlah APBK dan sumber pendapatan lainnya yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana	Meningkatkan persentase alokasi APBK dan sumber pendapatan lainnya untuk penanggulangan bencana melalui advokasi, perencanaan berbasis data, kemitraan	Peningkatan persentase alokasi APBK dan sumber pendapatan lainnya untuk penanggulangan bencana melalui advokasi, perencanaan berbasis data,	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
		strategis, integrasi dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, transparansi, serta pengembangan instrumen keuangan inovatif.	kemitraan strategis, integrasi dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, transparansi, serta pengembangan instrumen keuangan inovatif.			
Terlaksananya diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana	Tingkat akses informasi kajian risiko bencana	Membuka akses informasi kawasan rawan bencana berdasarkan analisis kajian risiko bencana	Pembukaan akses dan penyusunan regulasi yang mewajibkan pemanfaatan kajian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan terpadu	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
Tersedianya anggaran program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di	Jumlah alokasi anggaran untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota	Menyiapkan alokasi anggaran yang efektif untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner	Penyiapan dan pemantauan alokasi anggaran yang efektif untuk program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	pentahelix lainnya	pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya			
Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana	Melaksanakan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara efektif dan terpadu	Pelaksanaan program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara efektif dan terpadu	Program penanggulangan bencana	1.05.03 program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
				Program pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	2.11.05 program pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah) B3
				Program pengelolaan Persampahan	2.11.11 program pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani
				Program pengelolaan sistem data gender dan anak	2.08.05 program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA
				Program pengelolaan Sumber daya air (sda)	1.03.02 Program pengelolaan Sumber daya air (sda)	

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
				Program pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	1.03.06 Program pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
				Program pendidikan	1.01.02 program pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	2.15.02 program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05 program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan sikap siaga warga dalam menghadapi bencana seperti pandemi
					1.05.04 program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan	Mengukur tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan	Penilaian tingkat kemajuan/progress pelaksanaan kegiatan		kebakaran	Kebakaran
				Program penanggulangan bencana	1.05.03 program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
				Program pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04 program pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier
				Program pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	3.27.05 program pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04 program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program pengembangan Perumahan	1.04.02 Program pengembangan perumahan	

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time</i> data, serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.	Menyiapkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time</i> data, serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.	Penyediaan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dan <i>real time</i> data, serta memanfaatkan teknologi yang terbaru.	Program penanggulangan bencana	1.05.03 program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
				Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.16.02 program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik
				Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12 program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW
Terciptanya modul diklat penanggulangan bencana yang sesuai standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe.	Lahirnya modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Menyusun modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Penyusunan modul atau materi diklat penanggulangan bencana yang sesuai dengan standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Program penanggulangan bencana	1.05.03 program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
Terciptanya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Tersedianya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Menyediakan kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Penyediaan kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04 program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai	Tingkat pengetahuan, keahlian dan	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk	Penyediaan standarisasi pelatihan	Program penanggulangan bencana	1.05.03 program penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	kemandirian aparaturnya dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan kebencanaan	para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	kebencanaan dan sertifikasi kompetensi aparaturnya dan masyarakat secara profesional	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04 program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Program pendidikan	1.01.02 program pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
				Program penanganan bencana	1.06.06 program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat
				Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	2.11.08 program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program administrasi pemerintahan desa	2.13.04 program administrasi pemerintahan desa	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
				Program pengembangan perumahan	1.04.02 program pengembangan perumahan	
				Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.19.02 program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB)
Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Sistem logistik terpadu dan terintegrasi.	Menyediakan sistem logistik terpadu dan terintegrasi.	Penyedia sistem logistik terpadu dan terintegrasi.	Program penanganan bencana	1.06.06 program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat
Terintegrasinya prinsip dan aksi berbasis kelestarian lingkungan / ekologis dalam setiap perencanaan pembangunan	Persentase pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Melaksanakan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan	Program pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03 program pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Perencanaan tata ruang berbasis	Persentase implementasi	Mengimplementasikan penataan ruang	Pengimplementasian penataan ruang	Program penyelenggaraan	1.03.12 Program	Persentase Ketaatan terhadap

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	penataan ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	penataan ruang	penyelenggaraan penataan ruang	RTRW
Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Tersedianya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Menyediakan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Penyediaan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Program perencanaan lingkungan hidup	2.11.02 program perencanaan lingkungan hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Indeks kualitas lingkungan hidup, indeks implementasi ekonomi hijau, dan Indeks Ketahanan air terhadap bencana hidrometeorologi.	Implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan air berkelanjutan, edukasi masyarakat, kolaborasi multi-pihak, dan adopsi teknologi ramah lingkungan.	Pelaksanaan Implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan air berkelanjutan, edukasi masyarakat, kolaborasi multi-pihak, dan adopsi teknologi ramah lingkungan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	2.11.04 program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Luasan Taman
				Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02 program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program pemasaran pariwisata	3.26.03 program pemasaran pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisata
				2.11.03 program pengendalian Pencemaran dan/atau	2.11.03 program pengendalian Pencemaran dan/atau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
				kerusakan lingkungan hidup	kerusakan lingkungan hidup	
Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Resiliensi terhadap bencana perubahan iklim di Kota Lhokseumawe	Tingkat ketangguhan masyarakat	Melaksanakan perencanaan berbasis risiko, penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.	Pelaksanaan perencanaan berbasis risiko, penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12 Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Rencana Aksi merupakan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe, termasuk pemerintah, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan perwakilan masyarakat, sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Lhokseumawe.

Rencana Aksi ini disusun dengan mengacu pada isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kota Lhokseumawe. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Aksi menggambarkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang secara komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Lhokseumawe.

Di dalam Rencana Aksi juga dicantumkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Non-OPD yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan juga diuraikan sesuai dengan kondisi dan urgensi kebutuhan di Kota Lhokseumawe. Pola kontribusi dalam pendanaan atau penganggaran pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan juga dicantumkan untuk memberikan arahan yang lebih jelas agar kegiatan tersebut dapat diwujudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang terpadu dari tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Aceh, hingga Pemerintah Pusat. Rumusan Rencana Aksi Kota Lhokseumawe mendukung perencanaan pembangunan yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

Adapun rumusan rencana aksi Kota Lhokseumawe secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 1 peta lokasi rencana kegiatan RPB dan pada lampiran 2 rencana aksi perangkat daerah Kota Lhokseumawe (terlampir). Lampiran 1 merupakan penjabaran dari serangkai rencana aksi yang berfokus pada suatu jenis bencana. Lampiran 2 merupakan penjabaran rencana aksi secara terperinci, dimana pada kolom pola kontribusi dijabarkan kaitan kegiatan rencana aksi dengan sendai framework 2015-2030, RIPB Periode II 2025-2029, dan Draft Renas PB 2025-2029. Guna memahami penjabaran dari pola kontribusi tersebut, berikut beberapa poin keterangannya:

1. Sendai Framework 2015-2029

- Prioritas 1. Memahami Risiko Bencana

- Kebijakan dan praktik PRB harus didasarkan pada pemahaman akan risiko bencana pada seluruh dimensinya termasuk kerentanan, kapasitas, keterpaparan jiwa dan aset, karakteristik ancaman dan lingkungan hidup

- Prioritas 2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko  
Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengelolaan risiko yang efektif dan efisien
- Prioritas 3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan  
Investasi pemerintah dan swasta dalam PRB sangatlah penting untuk memperkuat ketangguhan ekonomi, sosial, dan budaya dari warga, masyarakat, aset mereka dan lingkungan hidup
- Prioritas 4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi  
Penguatan kesiapsiagaan bencana untuk tanggap, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi penting untuk membangun kembali dengan lebih baik
2. RIPB Periode II : 2025-2029
- Prioritas 1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
- Prioritas 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
- Prioritas 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
- Prioritas 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
- Prioritas 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
- Prioritas 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
- Prioritas 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
- Prioritas 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
- Prioritas 9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
- Prioritas 10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
- Prioritas 11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana
- Prioritas 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana

3. Draft Renas PB 2025-2029

- Prioritas 1. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif
- Prioritas 2. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan
- Prioritas 3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
- Prioritas 4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana

## **BAB VI**

### **PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Bagian pemaduan, pengendalian dan evaluasi menguraikan strategi integrasi para pihak yang mencakup unsur pemerintah dan nonpemerintah di Kota Lhokseumawe serta aspek integrasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan sistem perencanaan yang menciptakan keterkaitan dan konsistensi antar berbagai perencanaan.

Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka kerja pengendalian dan evaluasi program serta rencana aksi penanggulangan bencana. Pengendalian merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana aksi, sementara evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi guna menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi ini merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan. Lebih jauh, pengendalian dan evaluasi pengurangan risiko bencana bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan serta hasil rencana pengurangan risiko bencana yang telah disusun.

Dengan terstrukturinya ketercapaian dan manfaat rencana aksi pengurangan risiko bencana dalam dokumen RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027, diharapkan akan dihasilkan bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa mendatang di Kota Lhokseumawe.

#### **6.1 Pemaduan Para Pihak**

Pentingnya integrasi para pihak dalam penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 26 dan 27 UU No. 24 Tahun 2007, di mana pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan dalam setiap aspeknya. Saat ini, pendekatan pentahelix yang melibatkan kerja sama lima komponen yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media, diharapkan dapat meningkatkan upaya penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 juga menekankan pentingnya peran serta Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana, yang juga sering disebut sebagai komponen pentahelix. Komponen ini mencakup Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media, yang mana memiliki peran penting dalam setiap fase penanggulangan bencana, baik itu pra bencana, saat bencana, maupun pascabencana. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, RPB harus mampu diinternalisasi dalam kerangka pembangunan, menurunkan indeks risiko bencana, dan meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana

Kota Lhokseumawe ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, karena upaya penanggulangan bencana bersifat terintegrasi.

Peran dari kelima komponen pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana, yaitu:

1. Pemerintah

Pemerintah sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab secara penuh upaya penanggulangan bencana. Pemerintah Kota Lhokseumawe memegang peranan penting dalam upaya Penanggulangan Bencana di Kota Lhokseumawe, terutama terkait:

a. Aspek Legislasi

Pemerintah membuat sejumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah terkait Penanggulangan Bencana di Kota Lhokseumawe, Pedoman-pedoman teknis standar kebutuhan minimum Penanganan Bencana, Prosedur Tetap, Prosedur Operasi serta sejumlah peraturan lainnya terkait Penanggulangan Bencana.

b. Aspek kelembagaan

Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Badan Penanggulangan Bencana di Daerah, menyiapkan personil profesional dan ahli, menyiapkan prasarana dan sarana peralatan, serta logistic dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data informasi dan komunikasi.

c. Aspek Perencanaan

Pemerintah Kota Lhokseumawe harus melakukan perencanaan Penanggulangan Bencana Baik Itu Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Mitigasi, Bencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana, memasukkan aspek Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan (RPJPK, RPK, dan RKPD) dan memadukan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe.

d. Aspek Pendanaan

Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana rutin dan operasional melalui DIPA, dana kontinjensi dan Dana Siap Pakai untuk Tanggap Darurat (DSP), Dana Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta menggalang dan mengawasi penggalangan dana dari masyarakat.

e. Aspek Pengembangan Kapasitas

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam bidang pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan baik formal, informal, maupun non formal, Pelatihan manajerial dan teknis, Latihan

drill/simulasi dan gladi, pengembangan kelembagaan berupa pusat data dan media center, infrastruktur informasi dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah tersebut sangat penting dan mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan [penanggulangan bencana. Dengan kata lain, kelemahan-kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi penanggulangan bencana.

## 2. Dunia Usaha

Dunia Usaha merupakan salah satu pilar utama dalam upaya Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe. Dunia Usaha dapat berperan sebagai investor utama, pemberi kerja, penyedia layanan dan produk, serta bagian integral dari masyarakat yang merupakan mitra penting bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Fokus utama keterlibatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Dunia Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan risiko bencana ke dalam strategi dan praktik manajemen bisnis, termasuk melalui pengembangan kapasitas dan pendidikan;
- b. Mempromosikan investasi bisnis yang berdasarkan informasi risiko, termasuk melalui pengembangan kebijakan, standar, dan peraturan yang diperlukan;
- c. Mendorong penggunaan dan pengembangan keahlian dan inovasi sektor swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di Kota Lhokseumawe.
- d. Mendorong lahirnya Aliansi Masyarakat Tangguh Bencana, yang berfungsi sebagai advokat untuk investasi bisnis yang sadar risiko, mempromosikan pengembangan jaringan dan pengalaman dari lingkup yang lebih luas.
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberi dukungan program CSR guna mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat di zona risiko bencana
- f. Mempromosikan integrasi risiko bencana risiko ke dalam strategi bisnis anggota mereka dan investasi.

Kemitraan dan hasil yang disepakati, termasuk peningkatan advokasi, pengumpulan data dan pemodelan risiko, infrastruktur yang tangguh, perubahan peraturan, dan pembangunan kapasitas.

## 3. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan suara dasar ilmiah yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Hal ini diharapkan dapat memberikan kebijakan dan saran berdasarkan

keahliannya kepada Pemerintah Aceh dan juga partner Pentahelix lainnya. Perguruan tinggi juga memiliki peran untuk dapat melakukan inisiatif terkait :

- a. Mengkatalisasi dan memperkuat penelitian, inovasi dan kemitraan, termasuk pada 'bahaya bencana baru';
- b. Meningkatkan inter dan trans disiplin, dan penelitian dan sains antar generasi;
- c. Mempromosikan penelitian terpadu dan terapan. pertukaran informasi;
- d. Peningkatan kapasitas untuk menjembatani penguatan analisis terkait kajian-kajian dan kebijakan.
- e. mengembangkan sains dan teknologi dan dan membangun kemitraan dengan para pihak
- f. memberikan masukan kebijakan, saran, transfer pengetahuan kepada partner Pentahelix baik itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media.

#### 4. Media

Peran media dalam keterbukaan informasi dan akses media menjadi ujung tombak dari bangsa untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan. Tingginya potensi bahaya di Kota Lhokseumawe, Media diharapkan dapat terus mengedukasi dan mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu tangguh. Pemahaman karakteristik ancaman bahaya perlu untuk digali dan diinformasikan kepada masyarakat. Mereka yang berada di kawasan bahaya diharapkan untuk mengetahui risiko dan upaya mitigasi dalam menghadapi bahayanya.

Selama ini Framing pemberitaan sangat menentukan kemana audience digiring oleh media massa pada saat terjadi bencana. framing media pada kasus bencana di tanah air masih sangat kental dengan wacana gugatan terhadap peran negara dalam penanggulangan bencana.

- a. Media harus memberikan framing pemberitaan yang tepat untuk menggiring audience agar mampu menghadirkan wacana dorongan kemandirian untuk tetap survive pada saat bencana
- b. Pengelola media harus memiliki pengetahuan tentang bencana, manajemen informasi bencana dan fungsi dan disfungsi informasi yang disajikan.
- c. Media harus mampu menghadirkan informasi yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kebencanaan.
- d. Media harus menjadi corong yang tercepat dan akurat, dan penyaji informasi yang tepat dalam menginformasikan berita-berita terkait bencana ke masyarakat.

- e. Media harus mampu bersinergi dengan komponen pentahelix lainnya dalam menerjemahkan informasi baik kebijakan, ilmiah maupun dalam konteks bisnis.

#### 5. Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya Penanggulangan Bencana di Kota Lhokseumawe. Adapun hak dan kewajiban masyarakat, sebagaimana UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yakni masyarakat (setiap orang) berhak untuk

- a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana,
- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan,
- c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan, tentang kebijakan penanggulangan bencana,
- d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan,
- e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya,
- f. Melakukan pengawasan,
- g. Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khusus kepada yang terkena bencana), dan
- h. Memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sementara itu kewajiban masyarakat adalah

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
- b. Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- c. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan
- d. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Rincian peran dari perangkat daerah pemerintah dalam penanggulangan bencana telah dipaparkan pada bab III dalam tabel 3.5 peran BPBD dalam penanggulangan bencana dan tabel 3.6 peran para pihak di Kota Lhokseumawe dalam kerangka penanggulangan bencana. Untuk memahami peranan para pihak dari komponen pentahelix lainnya, berikut pemaduan perannya dalam tabel di bawah ini:

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

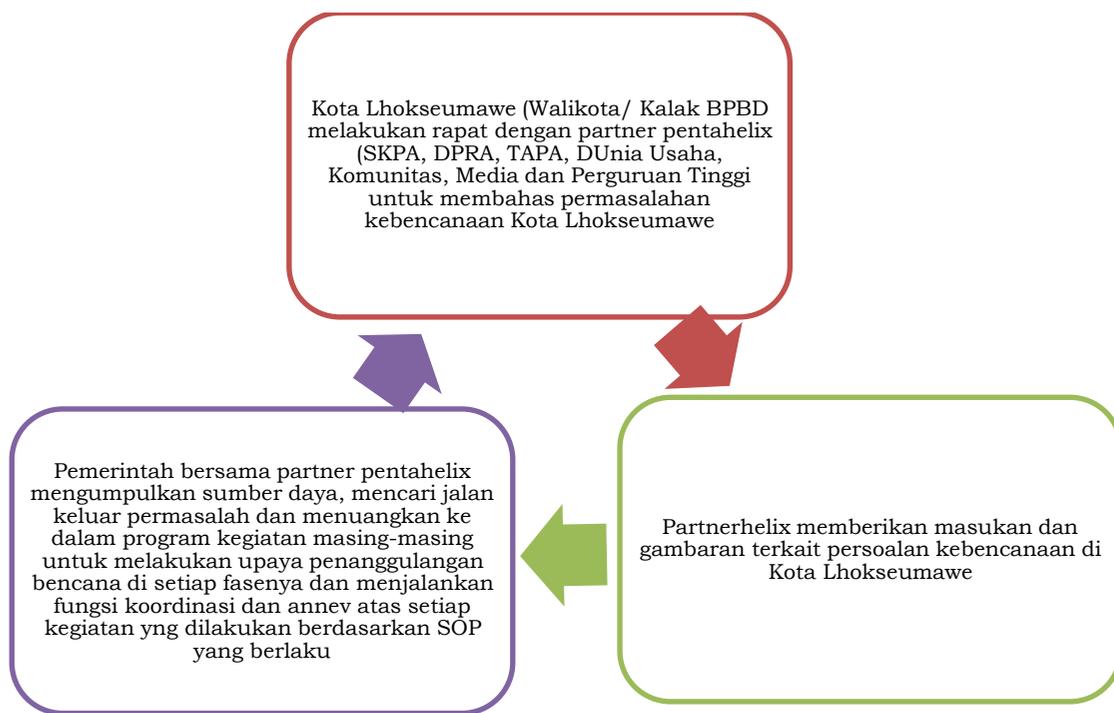
Tabel 6.1 Pemaduan peran para pihak pentahelix non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana Kota Lhokseumawe

No.	Unsur/ Instansi/Lembaga	Mandat/Tugas	Kepentingan
<b>A. Unsur Dunia Usaha</b>			
1.	BPMA	Melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan proses-proses analisis risiko berjalan dengan baik guna mendukung kepentingan bisnis</li> <li>- Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CRS perusahaan pada kawasan rawan bencana</li> <li>- Menjalin kolaborasi lintas Perusahaan dan OPD dalam aksi sosial kebencanaan</li> </ul>
2.	PEMA	Koordinasi dan komunikasi semua bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan suara dasar ilmiah yang diperlukan dalam penanggulangan bencana</li> <li>- Memastikan proses-proses analisis risiko berjalan dengan baik guna mendukung kepentingan bisnis</li> <li>- Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CRS perusahaan</li> <li>- Menjalin kolaborasi lintas Perusahaan dan OPD dalam aksi sosial kebencanaan</li> </ul>
3.	PT PIM	koordinator BUMN Satgas Bencana Nasional wilayah Aceh yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri BUMN SK Nomor 77/MBU/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas/keterampilan masyarakat binaannya terkait tanggap bencana,</li> </ul>
<b>B. Unsur Perguruan Tinggi</b>			
1.	Universitas Malikussaleh	Tri Dharma Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan suara dasar ilmiah yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.</li> <li>- Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian bencana melalui BEM mahasiswa</li> </ul>
2.	Politeknik Lhokseumawe	Tri Dharma Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan suara dasar ilmiah yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.</li> <li>- Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian</li> </ul>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Unsur/ Instansi/Lembaga	Mandat/Tugas	Kepentingan
			bencana melalui BEM mahasiswa
3.	IAIN Lhokseumawe	Tri Dharma Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan suara dasar ilmiah yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.</li> <li>- Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian bencana melalui BEM mahasiswa</li> </ul>
<b>C. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil</b>			
1	F-PRB Kota Lhokseumawe	pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat PRB dan juga membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
2	Pramuka	Pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda dalam menanggapi bencana	Membantu penyelenggaraan PB, terutama dalam peningkatan kapasitas kepemudaan dalam menghadapi bencana
3	PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
4	SAR	Melakukan tindakan pencarian dan pertolongan	Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
<b>D. Unsur Media</b>			
1	Persatuan wartawan	Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana	Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online

Untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan pelaksanaan program di lapangan, perlu dilakukan mekanisme koordinasi antar Lembaga Pentahelix. Adapun mekanisme koordinasi tata kerja lintas komponen pentahelix disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 6.1 Mekanisme koordinasi tata kerja lintas komponen pentahelix  
Sumber : Hasil Analisis Tim, 2022

## 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Rencana Penanggulangan Bencana harus dipadukan dan diharmonisasikan dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerja sama dan sinkronisasi. Penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

Kerangka kerja Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe haruslah sesuai dengan rangkaian perencanaan pembangunan baik dari tingkat kota hingga ke tingkat nasional. Keterkaitan kontribusi RPB dengan perencanaan lainnya dilihat pada komponen berikut ini:

1. Arah kebijakan Draft RPJN 2025-2045
  - i. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana.
  - ii. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan
  - iii. pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan

- iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnerships)
- iv. Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway, dll) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut
  - v. pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi
  - vi. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas
  - vii. pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah
  - viii. peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana
  - ix. pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana)
  - x. pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim
2. Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim dalam Draft RPJMN Teknokratik 2025-2029
- Sasaran 1. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan restorasi ekosistem pesisir (Mangrove, lamun dan terumbu karang) serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Sasaran 2. Pencegahan Penyakit menular akibat iklim
- Sasaran 3. Pertanian ramah iklim
- Sasaran 4. Pembangunan dan konservasi sumber daya air
- Sasaran 5. Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU dan limbah domestik
- Sasaran 6. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
- Sasaran 7. Peningkatan upaya pencegahan , kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu
- Sasaran 8. Penguatan tata kelola penanganan darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana
- Sasaran 9. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
- Sasaran 10. Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pengembangan wilayah

3. RIPB Periode II 2025-2029

- Prioritas 1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
- Prioritas 2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
- Prioritas 3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
- Prioritas 4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
- Prioritas 5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
- Prioritas 6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
- Prioritas 7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
- Prioritas 8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
- Prioritas 9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
- Prioritas 10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
- Prioritas 11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana
- Prioritas 12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana

4. Draft Renas 2025-2029

- Prioritas 1. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif
- Prioritas 2. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan
- Prioritas 3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
- Prioritas 4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana

5. Misi ke-7 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dalam Draft RPJP Aceh 2025-2045

- Prioritas 1. Resilien terhadap bencana perubahan iklim
- Prioritas 2. Ekonomi Hijau

- Prioritas 3. Pengeloaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan energi dan air
- 6. Tujuan ke-6 Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana dalam RPA Aceh 2023-2026
  - Prioritas 1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah
  - Prioritas 2. Meningkatkan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
  - Prioritas 3. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik
  - Prioritas 4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar
  - Prioritas 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
  - Prioritas 6. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari
  - Prioritas 7. Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Penjabarannya kaitannya secara terperinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.2 Kerangka Kerja Pemanduan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe dalam Perencanaan Lainnya

<b>Sasaran/Program (Rencana PB)</b>		<b>Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA</b>		<b>Kegiatan RPB (RAD PRB)</b>
<b>Isu Strategis 1 : Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek aspek penanggulangan bencana</b>				
Terlaksanannya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (vi)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 10  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 7	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Program Perencanaan Longkungan Hidup	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iv)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 1 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 8 Prioritas 9	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 5 Prioritas 6	- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i)	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 9	Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5  Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 9	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 9	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
2.09.04 Program Penanganan	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i)	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 4  -

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Kerawanan Pangan	<p>Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12 Prioritas 5 Prioritas 6</p>	<p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4</p>
	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (viii) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 3 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 11</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 7</p>
			<p>- Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>- Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>- Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>- Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	1.05.03 Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (v) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (viii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 10	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 2	Pengawasan Pemerintahan Desa  -Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (vii) Arah Kebijakan (viii) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	- 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8	
1.06.06 Program Penanganan Bencana	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>                      Arah Kebijakan (i)                      Arah Kebijakan (vi)                      Arah Kebijakan (viii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>                      Sasaran 7                      Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 7</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>                      Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b>                      Prioritas 7</p> <p>- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p>
2.11.11 Pengelolaan Persampahan	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>                      Arah Kebijakan (i)                      Arah Kebijakan (vi)                      Arah Kebijakan (vii)                      Arah Kebijakan (viii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>                      Sasaran 7                      Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 11</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>                      Prioritas 1</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 4                      Prioritas 7</p> <p>- Pengelolaan Sampah</p>
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>                      Arah Kebijakan (i)                      Arah Kebijakan (vi)                      Arah Kebijakan (vii)                      Arah Kebijakan (viii)                      Arah Kebijakan (ix)</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>                      Prioritas 1</p> <p>- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
		<p>Arah Kebijakan (x)</p> <p>Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b></p> <p>Sasaran 2 Sasaran 5 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b></p> <p>Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b></p> <p>Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11</p>	
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b></p> <p>Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b></p> <p>Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b></p> <p>Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b></p> <p>Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b></p> <p>Prioritas 1</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b></p> <p>Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 7</p> <p>- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Prioritas 11  <b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 7	- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 7	- Advokasi Program KKBPB kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
		<b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11		
Terlaksananya penganggaran dan pembiayaan penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 7	- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
<b>Isu Strategis 2 Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana</b>				
Tersedianya anggaran program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan,	Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii)	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3	- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Pelayanan

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
<p>penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya</p>	<p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>                      Sasaran 1                      Sasaran 2                      Sasaran 3                      Sasaran 4                      Sasaran 5                      Sasaran 6                      Sasaran 7                      Sasaran 8                      Sasaran 9                      Sasaran 10</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 4                      Prioritas 8                      Prioritas 10                      Prioritas 11                      Prioritas 12</p>	<p>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                      - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>
<p>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>                      Arah Kebijakan (i)                      Arah Kebijakan (ii)                      Arah Kebijakan (vii)                      Arah Kebijakan (viii)                      Arah Kebijakan (ix)                      Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>                      Sasaran 4                      Sasaran 7                      Sasaran 8                      Sasaran 9                      Sasaran 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3                      Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>                      Prioritas 1</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b>                      Prioritas 7</p> <p>- Penyimpanan sementara Limbah B3</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	<p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 5                      Prioritas 6                      Prioritas 7                      Prioritas 8</p>	
<p>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>                      Arah Kebijakan (i)                      Arah Kebijakan (vi)                      Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>                      Sasaran 3                      Sasaran 4                      Sasaran 5                      Sasaran 7</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 4                      Prioritas 8                      Prioritas 9                      Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>                      Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b>                      Prioritas 5                      Prioritas 7</p> <p>- Pengelolaan Sampah</p>
<p>2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>                      Arah Kebijakan (i)                      Arah Kebijakan (vi)                      Arah Kebijakan (vii)                      Arah Kebijakan (viii)                      Arah Kebijakan (ix)                      Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>                      Sasaran 2                      Sasaran 5</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b>                      Prioritas 4</p> <p>- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11	Prioritas 5 Prioritas 7	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii) Arah Kebijakan (viii) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 3	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 1	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 3	-Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	<p>Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12</p>	
1.01.02 Program Pendidikan	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 7</p> <p>- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan</p>
2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii) Arah Kebijakan (viii)</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1</p> <p>- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	<p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 1 Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11</p>	<p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>
<p>1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 9 Sasaran 10</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 12</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4</p> <p>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p>
<p>1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (viii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 2 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b></p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p>- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 7	- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (v) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (vii) Arah Kebijakan (ix)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4 Prioritas 7
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3  - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p>	<p>Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>	- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 9</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p>	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vi)</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 4</p>	Pengendalian dan Penanggulangan

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<p>Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 2</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 4 Prioritas 9</p>	<p>Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</p>
1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (iv)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 3 Sasaran 6 Sasaran 7</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4 Prioritas 7</p> <p>- Investigasi Kejadian Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p>
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b></p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Prioritas 7 Prioritas 9 Prioritas 10	<b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 7
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (vii) Arah Kebijakan (viii) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 4 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b>	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 3

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11 Prioritas 12	<b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4 Prioritas 7
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (ix) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11 Prioritas 12	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4 Prioritas 7  - Pembangunan Prasarana Pertanian
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (vi)	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b>  - Pengawasan Penataan Ruang

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
		<p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 3 Sasaran 6 Sasaran 7</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 12</p>	<p>Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4 Prioritas 7</p>
	<p>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (vi) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 4</p> <p>- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh pihak Swasta</p>
<p>Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan</p>	<p>2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (x)</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.		<b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 10	<b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7	
<b>Isu Strategis 3 Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan</b>				
Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 9  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 4	- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 9	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 3  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b>	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
		<b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12	Prioritas 1 Prioritas 4	
	10312 Program Penyelenggaraan penataan Ruang	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 10  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 8	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota"
Terciptanya modul diklat penanggulangan bencana yang sesuai standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Terciptanya kurikulum pelatihan khusus	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan,	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10</p>	<p>Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li> </ul>
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</li> <li>- Penyelenggaraan</li> </ul>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
1.01.02 Program Pendidikan	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7</p>
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10	<b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	2.19.02 Program	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b>	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b>	Pemberdayaan dan

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10	Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (vii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 7 Sasaran 8  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 10	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 7	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Terlaksananya sistem logistik yang terpadu	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 9  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4	- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (iii)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 9  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
<b>Isu Strategis 4 Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan</b>				
Terintegrasinya prinsip dan aksi berbasis kelestarian lingkungan / ekologis dalam setiap perencanaan pembangunan	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (x)  <b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9	<b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA		Kegiatan RPB (RAD PRB)
Perencanaan tata ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 9 Sasaran 10</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7</p>	<p>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</p>
Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6</p>	<p>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p>



Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	<p>Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b></p> <p>Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b></p> <p>Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12</p>	<p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b></p> <p>Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b></p> <p>Prioritas 5 Prioritas 6</p>
<p>3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata</p>	<p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b></p> <p>Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (v) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b></p> <p>Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b></p> <p>Prioritas 9 Prioritas 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b></p> <p>Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b></p> <p>Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b></p> <p>Prioritas 5 Prioritas 6</p> <p>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
	<p>Prioritas 11 Prioritas 12</p> <p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5 Sasaran 6 Sasaran 7 Sasaran 8 Sasaran 9 Sasaran 10</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 9</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p><b>RPA Aceh 2023-2026</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6</p> <p>- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>
<p>Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Resiliensi terhadap bencana perubahan iklim di Kota Lhokseumawe</p>	<p>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</p> <p><b>DRAFT RPJPN 2025-2045</b> Arah Kebijakan (i) Arah Kebijakan (ii) Arah Kebijakan (iv) Arah Kebijakan (x)</p> <p><b>DRAFT RPJMN teknokratik 2025-2029</b> Sasaran 9 Sasaran 10</p>	<p><b>DRAFT RENAS 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3</p> <p><b>Draft RPJP Aceh 2025-2045</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Sasaran/Program (Rencana PB)		Kontribusi RPB terhadap RPJPN, RPJMN, RIPB, RENAS, RPJPD, RPA	Kegiatan RPB (RAD PRB)
		<p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 4                      Prioritas 8                      Prioritas 12</p>	<p><b>RPA Aceh 2023-2026</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3                      Prioritas 4                      Prioritas 5                      Prioritas 6                      Prioritas 7</p>

### **6.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan menyupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pepaduan para pihak dan pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Lebih lanjut kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.3 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Lhokseumawe

<b>Waktu Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>Apa Yang Dipantau</b>	<b>Sumber Bukti dan Referensi Yang Digunakan</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Semester 1 Tahun 1 dan per semester (Koordinasi)	Penyusunan Baseline Legislasi (Payung Hukum) Sinkronisasi dengan Pusat dan Daerah Integrasi ke aktor-aktor daerah Realisasi kegiatan	Dokumen Legislasi (Payung Hukum) Dokumentasi Laporan dll	Ketersediaan baseline data Pengaruh daya paksa produk Peta Kontribusi daerah kepada program rencana provinsi atau nasional Peta Sinergi program/kegiatan/urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran Indikator Kegiatan dan Input kegiatan	FGD, kajian Pustaka, dll	Tim Teknis penyusunan RPB, BPBD Kota Lhokseumawe, Bappeda, SKPK terkait dan FPRB,
Per tahun (Pengendalian)	Realisasi program/Kegiatan tahun berjalan Peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	Laporan pemantauan Dokumentasi dan/atau laporan Dokumen peraturan/pedoman/Kebijakan daerah yang relevan dan lainnya	Indikator program/kegiatan Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan/ daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran	FGD, kajian Pustaka, dll	Tim Teknis penyusunan RPB, BPBD Kota Lhokseumawe, Bappeda, SKPK terkait dan FPRB,
Semester 1 Tahun ke 3 (Peninjauan kembali RPB)	Review Dokumen RPB	Laporan review RPB	Ada/tidaknya kejadian bahaya /peristiwa bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian Ada tidaknya perubahan sistem pemerintahan daerah - perlu dilakukan penyesuaian	FGD, kajian Pustaka, dll	Tim Teknis penyusunan RPB, BPBD Kota Lhokseumawe, Bappeda, SKPK terkait dan FPRB,
Semester ke 2 tahun ke 5 (Evaluasi)	Penyusunan endline data Sinkronisasi dengan pusat dan daerah Integrasi ke perencanaan lain si ke aktor-aktor daerah	Dokumentasi dan/atau laporan evaluasi	Ketersediaan endline data Kontribusi daerah kepada program rencana provinsi atau nasional Sinergi program/kegiatan/urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll Kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran	FGD, kajian Pustaka, dll	Tim Teknis penyusunan RPB, BPBD Kota Lhokseumawe, Bappeda, SKPK terkait dan FPRB,

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi panduan atau pedoman yang memadai bagi jajaran pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam hal kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana secara menyeluruh serta membangun dasar kemitraan dalam penanggulangan bencana di Kota Lhokseumawe. Dokumen ini juga menjadi salah satu alat instrumen untuk menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota sehingga perencanaan menjadi terarah, terpadu, terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kota Lhokseumawe.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sekaligus juga untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Lhokseumawe "KOTA LHOKSEUMAWE YANG ISLAMI, MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN".

Keberhasilan Pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan Visi dan Misi ini, memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya dan Indonesia pada umumnya.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

**A. HANAN, SP, MM**

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan bencana.

### Buku/Dokumen

Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020- 2044.

Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029.

Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022.

Dokumen Kajian Risiko Bencana Aceh Provinsi Aceh 2026.

Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2023.

Dokumen RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dokumen KRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

Dokumen RPB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Dokumen RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Situs

<http://dibi.bnpb.go.id/>

<https://inarisk.bnpb.go.id/>

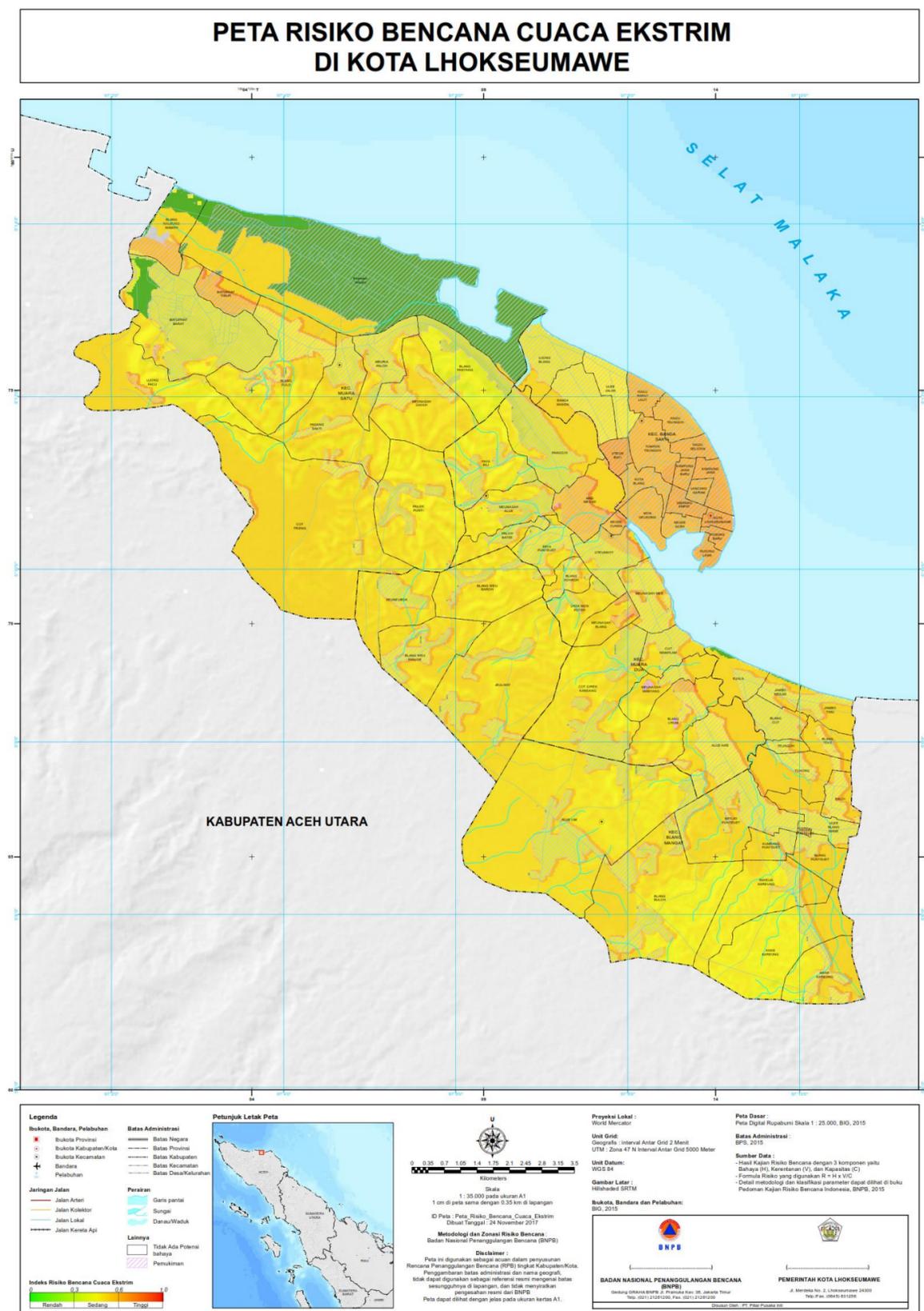
# LAMPIRAN

## RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LHOKSEUMAWE 2025-2029

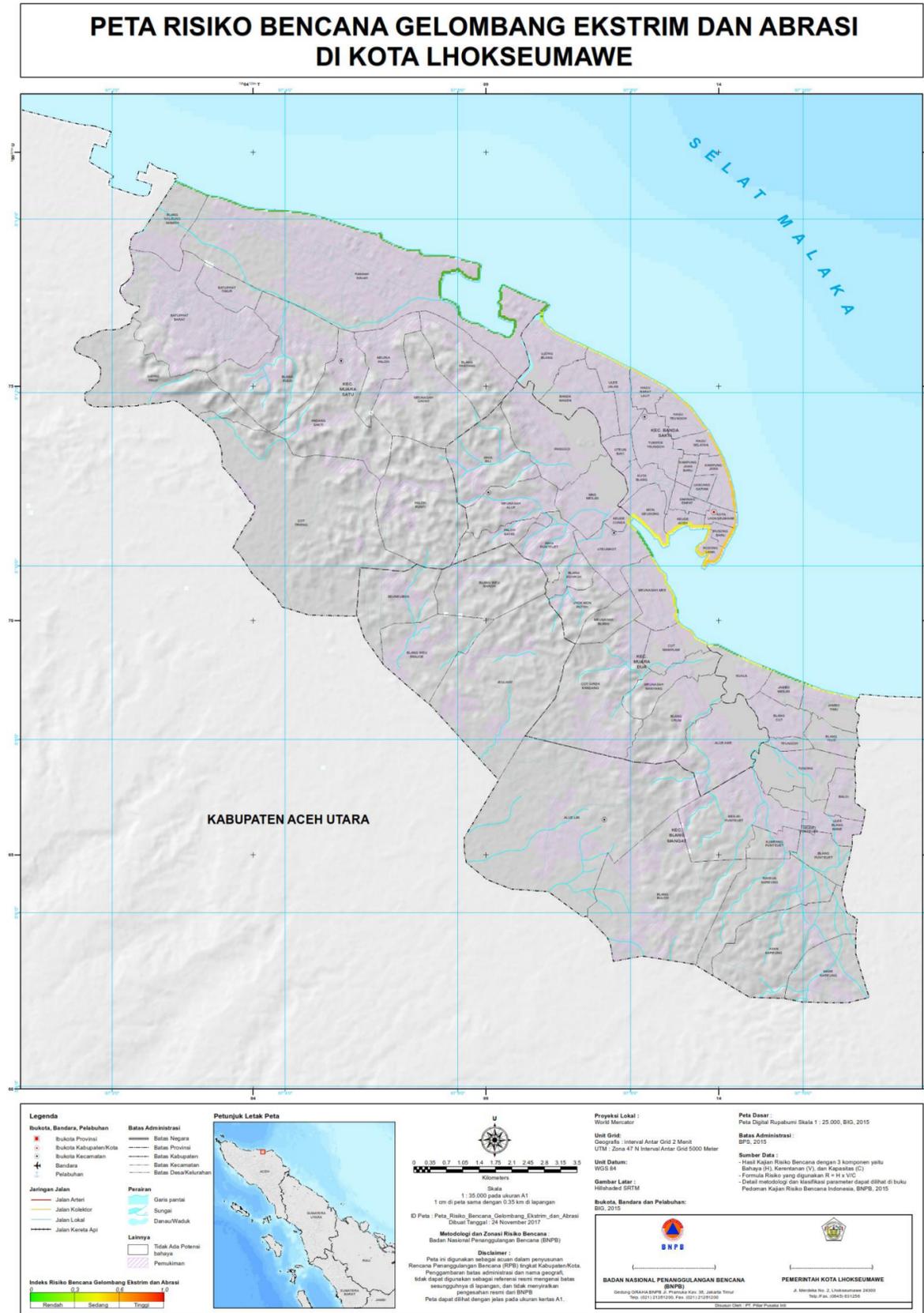
Lampiran 1 Peta Lokasi Rencana Aksi Kegiatan RPB



Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Fokus
1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir Yang Dibangun	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0069 Revitalisasi Situ	Jumlah Situ yang Direvitalisasi	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0070 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0094 Peningkatan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0097 Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0099 Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0096 Peningkatan Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Kota Lhokseumawe
1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0017 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Lhokseumawe
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Lhokseumawe

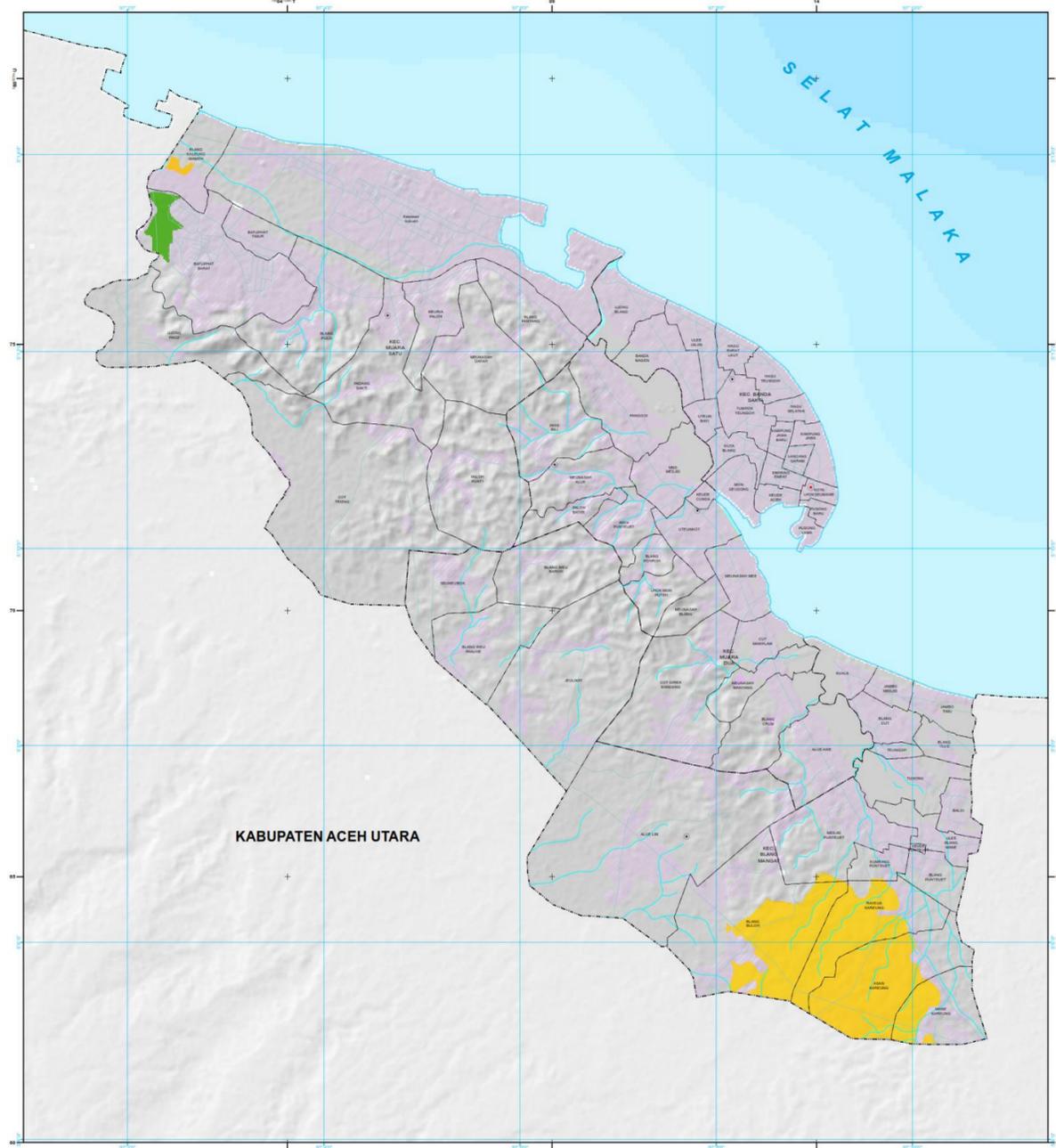


Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Fokus
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Lhokseumawe



Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Fokus
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Lhokseumawe

**PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA LHOKSEUMAWÉ**



**Legenda**

- Bukota, Bandara, Pelabuhan
- Bukota Provinsi
- Bukota Kabupaten/Kota
- Bukota Kecamatan
- Bandara
- Pelabuhan
- Jaringan Jalan
- Jalan Aspal
- Jalan Kiblat
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api

**Batas Administrasi**

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Perairan**

- Garis pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

**Lainnya**

- Tidak Ada Potensi bahaya
- Pemukiman

**Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

0 0.3 0.6 0.9

Rendah Sedang Tinggi

**Petunjuk Letak Peta**

**Proyeksi Lokal**  
WGS 1984

**Ukuk Grid**  
Geografis: Interval Antar Grid 2 Menit  
UTM : Zona 47 N Interval Antar Grid 5000 Meter

**Unit Datum**  
WGS 84

**Gambar Latar**  
Hilabead SRTM

**Bukota, Bandara dan Pelabuhan**  
BIG, 2015

**Peta Dasar**  
Peta Digital Rupa bumi Skala 1 : 25.000, BIG, 2015

**Batas Administrasi**  
BPS, 2015

**Sumber Data**  
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)  
- Formula Risiko yang digunakan  $R = H \times V \times C$   
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Indonesia, BNPB, 2015

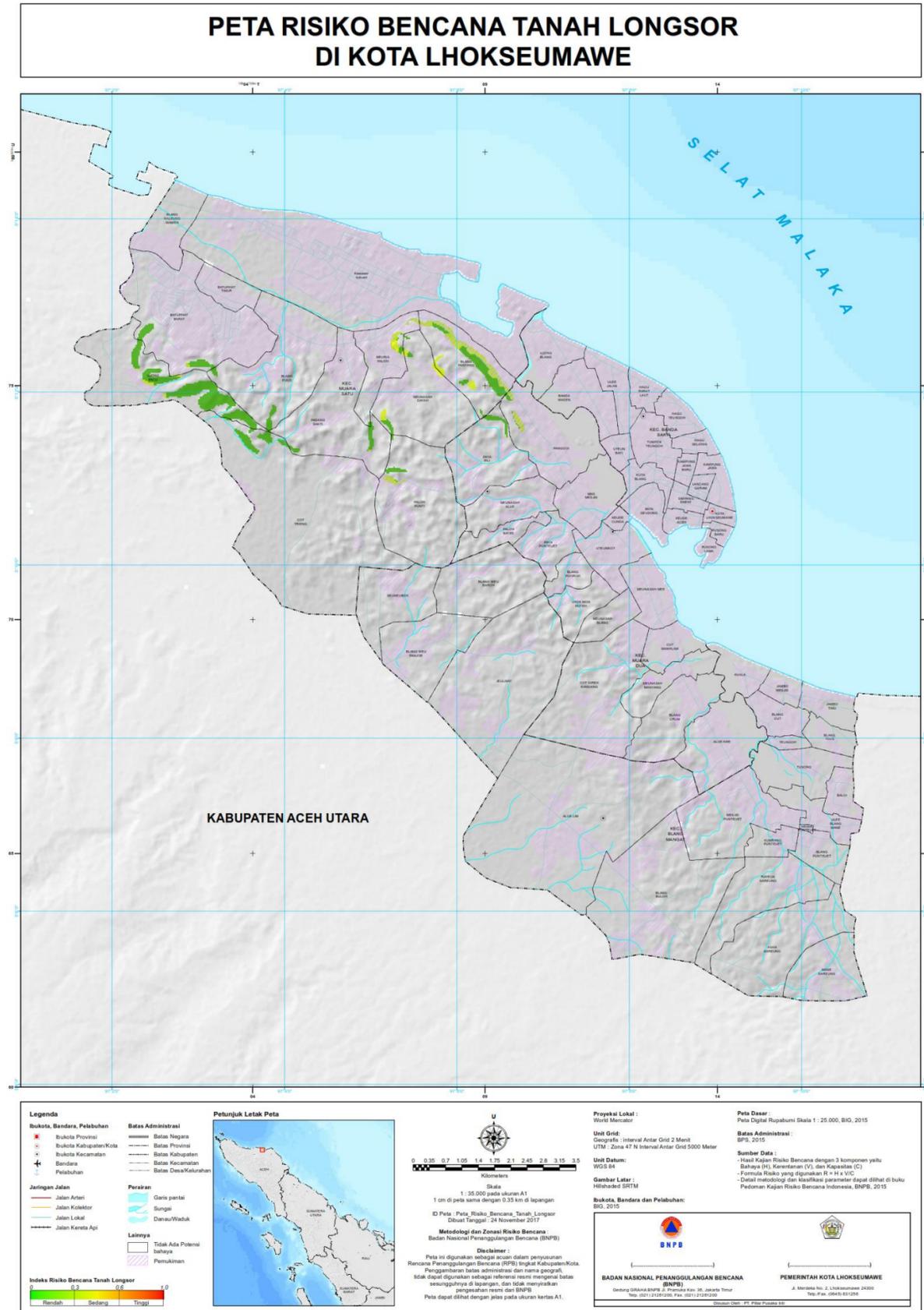
**Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana**  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

**Disclaimer**  
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas setingkatnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**  
Jl. Merdeka No. 2, Jakarta Timur  
Telp. 021-21251215, Fax. 021-21251220

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWÉ**  
Jl. Merdeka No. 2, Lhokseumawe 24300  
Telp. Fax. 0643-811205

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Fokus
1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa diperbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kota Lhokseumawe
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Lhokseumawe
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kota Lhokseumawe
1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kota Lhokseumawe
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Disyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Lhokseumawe



Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Lokasi Fokus
1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Lhokseumawe
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Lhokseumawe

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Lampiran 2 Rencana Aksi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi	
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung			
<b>Isu Strategis 1 : Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek aspek penanggulangan bencana</b>																							
1	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksanannya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.02.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota																<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4</p>
2	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksanannya penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p>
3	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksanannya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota																<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p>
4	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksanannya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		1	1	1	1	1										<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p>
5	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	Terlaksanannya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2.11.02.2.01.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		1	1	1	1	1										<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi						
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung								
6	2.11.02 Program Perencanaan Longkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	2.11.02.2.02.004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan			Rp100.000.000			Rp100.000.000			Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD dan Dishub	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6	
																											<b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3	
7	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air		Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelola an SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	-	-		1 Unit						Rp1.000.000.000						Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3	
8	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250			Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3
9	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota					1 Kegiatan												Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3
10	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000			Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
11	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp70.000.000	Rp77.000.000	Rp83.000.000	Rp90.000.000	Rp92.000.000	Kota Lhokseumawe	DKPPP		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
12	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyusunan peraturan Desa terkait kebencanaan	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Kota Lhokseumawe	Kecamatan Muara Dua	DPMG,BPBD, Dinas Sosial ,Dinkes	APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
13	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyusunan peraturan Desa terkait kebencanaan	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Kota Lhokseumawe	Kecamatan Muara Satu	DPMG,BPBD, Dinas Sosial ,Dinkes	APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
14	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyusunan peraturan Desa terkait kebencanaan	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Kota Lhokseumawe	Kecamatan Banda Sakti	DPMG,BPBD, Dinas Sosial ,Dinkes	APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
15	7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Terlaksananya pengarusutamaan aspek penanggulangan bencana dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyusunan peraturan Desa terkait kebencanaan	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Kota Lhokseumawe	Kecamatan Blang Mangat	DPMG,BPBD, Dinas Sosial ,Dinkes	APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
16	1.05.03 Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Penataan Sistem DasarPenanggulang an Bencana	1.05.03.2.04Penataan Sistem DasarPenanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga danKemitraan dalamPenanggulangan BencanaKabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0003Kerja Sama antar Lembaga danKemitraan dalamPenanggulangan BencanaKabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	semua instansi/ lembaga terkait	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
17	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.05.04.2.01.0008Pengelol aan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Diskominsa, DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
18	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0018Penyele nggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Semua OPD/ Instansi terkait	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
19	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	68 Desa Di Kota Lhokseumawe	DINAS SOSIAL	KECAMATAN DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
20	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Kota Lhokseumawe	DINAS SOSIAL	TAGANA KOTA LHOKSEUMAWA	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
21	2.11.11 Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD,	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
22	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terkoordinasinya pengarusutamaan gender dan perempuan dalam penanggulangan bencana	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.02.01 Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	2.08.02.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	18 OPD	25 OPD	30 OPD	34 OPD	34 OPD	Rp20.000.000	Rp30.000.000	Rp40.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
23	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Rp40.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
24	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	65 Pengaduan	60 Pengaduan	50 Pengaduan	45 Pengaduan	40 Pengaduan	Rp165.000.000	Rp160.000.000	Rp155.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD	APBK, DAK PPA dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
25	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/ Kota	50 KIE	50 KIE	55 KIE	55 KIE	55 KIE	Rp100.000.000	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD	APBK, DAK PPA dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
26	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Terlaksananya komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan pada setiap fase penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca bencana)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.14.03.2.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.01	10 Organisasi	10 Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi	30 Organisasi	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Rp130.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD, BKKBN	APBK, DAK NF KB dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
27	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penganggaran dan pembiayaan penanggulangan bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	BAPPEDA	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
28	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penganggaran dan pembiayaan penanggulangan bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	DPMG, DPMPTSP dan naker, Disperindakop, Disporapar	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
29	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya diseminasi dan integrasi hasil kajian risiko bencana	1.05.03.02.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.02.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Dinas PK, Dinas PMG, Dinas Kesehatan, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
<b>Isu Strategis 2. Belum efektifnya kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana</b>																						
30	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Tersedianya anggaran program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	BNPB, BPBA	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
31	1.05.03 Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
32	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	PUPR, Dinkes, DKP3, DLH	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
33	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah) B3	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penyimpanan sementara Limbah B3	.2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/ Kota	.2.11.05.2.01.0004 Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan				1 Kegiatan	Rp1.000.000.000			Rp1.000.000.000		Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
34	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD, Dishub, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
35	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp500.000.000	Rp200.000.000	Rp500.000.000	Rp200.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD, Dishub,	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
36	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD,	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
37	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusatpengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusatpengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD,	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
38	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.05 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp25.000.000	Rp30.000.000	Rp40.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
39	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir															Sendai Framework 2015-2030 Prioritas 3  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 3
40	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Revitalisasi Situ	1.03.02.2.01.0069 Revitalisasi Situ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	Sendai Framework 2015-2030 Prioritas 3  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 3
41	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Situ	1.03.02.2.01.0070 Operasi dan Pemeliharaan Situ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp525.000.000	Rp551.250.000	Rp578.812.500	Rp607.753.125	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	Sendai Framework 2015-2030 Prioritas 3  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 3		
42	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1.03.02.2.01.0071 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp500.000.000	Rp525.000.000	Rp551.250.000	Rp578.812.500	Rp607.753.125	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	Sendai Framework 2015-2030 Prioritas 3  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 3
43	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp3.000.000.000	Rp3.150.000.000	Rp3.307.500.000	Rp3.472.875.000	Rp3.646.518.750	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	Sendai Framework 2015-2030 Prioritas 3  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 3

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
44	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp500.000.000	Rp525.000.000	Rp551.250.000	Rp578.812.500	Rp607.753.125	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
45	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	1.03.02.2.01.0091 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp500.000.000	Rp525.000.000	Rp551.250.000	Rp578.812.500	Rp607.753.125	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
46	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	3000 M	4000 M	5000 M	6000 M	7000 M	Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
47	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Check Dam	1.03.02.2.01.0094 Peningkatan Check Dam	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
48	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.2.01.0095 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
49	1.03.02PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Bangunan Sabo	1.03.02.2.01.0096Peningkatan Bangunan Sabo	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
50	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.0097 Peningkatan Polder/Kolam Retensi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp3.000.000.000	Rp3.150.000.000	Rp3.307.500.000	Rp3.472.875.000	Rp3.646.518.750	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
51	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kanal Banjir	1.03.02.2.01.0099 Peningkatan Kanal Banjir	1000 M	1500 M	1800 M	2000 M	2500 M	Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
52	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.03.02.2.01.0100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
53	1.03.02PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan BangunanPerkuatan Tebing	1.03.02.2.01.0101Peningkatan BangunanPerkuatan Tebing	500 M	800 M	1000 M	1300 M	1500 M	Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
54	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai	1000 M	1500 M	2000 M	2500 M	3000 M	Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 9 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
55	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
56	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.2.01.0116 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
57	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
58	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
59	1.03.02PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.0123Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
60	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
61	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1500 M	1800 M	2000 M	2050 M	2100 M	Rp3.000.000.000	Rp3.150.000.000	Rp3.307.500.000	Rp3.472.875.000	Rp3.646.518.750	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
62	1.03.06PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0017Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	500 M	1000 M	1500 M	2000 M	2500 M	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
63	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	2000 M	3000 M	3500 M	4000 M	4500 M	Rp4.000.000.000	Rp4.200.000.000	Rp4.410.000.000	Rp4.630.500.000	Rp4.862.025.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
64	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	1000 M	1500 M	1800 M	2000 M	2500 M	Rp3.000.000.000	Rp3.150.000.000	Rp3.307.500.000	Rp3.472.875.000	Rp3.646.518.750	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
65	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	5 Unit	10 Unit	12 Unit	15 Unit	20 Unit	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
66	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
67	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	2 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp2.000.000.000	Rp2.100.000.000	Rp2.205.000.000	Rp2.315.250.000	Rp2.431.012.500	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
68	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	1.03.06.2.01.0027 Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp5.000.000.000	Rp5.250.000.000	Rp5.512.500.000	Rp5.788.125.000	Rp6.077.531.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
69	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
70	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
71	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliaran Air Tidak Tersumbat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp1.000.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.157.625.000	Rp1.215.506.250	Kota Lhokseumawe	PUPR	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	
72	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 engelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	"Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah"	1.01.02.2.01.0006 "Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah"	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp350.000.000	Rp350.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	
73	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	
74	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	
75	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.04.0002 Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
76	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Kota Lhokseumawe	Dishub	BPBD, Satpol PP	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
77	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan sikap siaga warga dalam menghadapi bencana seperti pandemi	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinkes	stakeholder	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
78	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BKPSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
79	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BKPSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
80	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04.2.01.0015 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan, Setdako, semu OPD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
81	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Semua OPD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
82	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan, Dukcapil, Setdako	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
83	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Inspeksi Peralatan ProteksiKebakaran	1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan ProteksiKebakaran	Penilaian Sarana PrasaranaProteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana PrasaranaProteksi Kebakaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
84	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Dinkes, PUPR, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
85	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
86	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2
87	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Semua OPD terkait	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
88	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 "Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana"	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3
89	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	5	7	7	8	8	Rp50.000.000	Rp70.000.000	Rp80.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD, BKKBN	APBK, DAK NF KB dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
90	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	55 kelompok	60 kelompok	65 kelompok	65 kelompok	70 kelompok	Rp50.000.000	Rp70.000.000	Rp80.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas P3AP2KB	BPBD, BKKBN	APBK, DAK NF KB dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
91	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DLH, Dinkes, Satpol PP, Dishub, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
92	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.03.002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, TNI/Polri, SAR	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
93	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.03.003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100 korban	100 korban	100 korban	100 korban	100 korban	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	SAR	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
94	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit												BPBD	DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, TNI/Polri, SAR	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
95	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana												BPBD	DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, TNI/Polri, SAR	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi	
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung			
			bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe																				RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 4
96	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota											BPBD	DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, TNI/Polri, SAR	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya		Sandai Framework 2015-2030 Prioritas 4  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 4	
97	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.2.01 Pelayanan Dukungan Psikososial	100 Orang	90 Orang	80 Orang	70 Orang	50 Orang	Rp. 50.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	KOTA LHOKSEUMAWE	DINAS SOSIAL	LEMBAGA LK3, PEKSOS, TKSK,PELOPOR,	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya		Sandai Framework 2015-2030 Prioritas 4  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 3 Prioritas 10  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 4
98	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Kota Lhokseumawe	DKPPP		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya		Sandai Framework 2015-2030 Prioritas 1 Prioritas 4  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7 Prioritas 11  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4
99	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	DKPPP		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya		Sandai Framework 2015-2030 Prioritas 1 Prioritas 4  RIPB Periode II : 2025-2029 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7  DRAFT RENAS PB 2025-2029 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
100	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp60.000.000	Rp65.000.000	Rp70.000.000	Kota Lhokseumawe	DKPPP		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7
																					Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4	
101	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	23.27.05.2.01.000 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp60.000.000	Rp65.000.000	Rp70.000.000	Kota Lhokseumawe	DKPPP		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
102	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Investigasi Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	TNI/Plori, Kecamatan, PUPR, PLN	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
103	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	SAR, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
104	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 "Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana"	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
105	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN			Rp35.000.000	Rp35.000.000			Kota Lhokseumawe	PUPR	BPN, DINAS PERTANAHAN	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	
106	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	11.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN			Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000		Kota Lhokseumawe	PUPR	DPMG, CAPIL	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	
107	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota		1 KEGIATAN				Rp50.000.000				Kota Lhokseumawe	PUPR	KECAMATAN DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
108	1.04.02PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01.0009Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota											Kota Lhokseumawe	PUPR	BPBD, DLHK	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
109	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota				150 UNIT	150 UNIT						Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA (KONSULTAN PERENCANA, KONTRAKTOR PELAKSANA, KONSULTAN PENGAWAS)	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
110	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota				150 UNIT	150 UNIT						Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA (KONSULTAN PERENCANA, KONTRAKTOR PELAKSANA, KONSULTAN PENGAWAS)	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
111	1.04.02PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pembangunan dan RehabilitasiRumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten / Kota	1.04.02.2.03Pembangunan dan RehabilitasiRumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03.0011Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota				150 UNIT	150 UNIT						Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA (KONSULTAN PERENCANA, KONTRAKTOR PELAKSANA, KONSULTAN PENGAWAS)	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi	
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung			
112	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota					300 UNIT						Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR	SETDAKO, KECAMATAN DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
113	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.04.0003 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota					1 KEGIATAN						Rp25.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR	SETDAKO, KECAMATAN DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
114	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota																<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
115	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam Kondisi Baik	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Kegiatan	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4	

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
116	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam Kondisi Baik	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	16	15	11	19	Rp2.000.000.000	Rp3.200.000.000	Rp3.000.000.000	Rp2.200.000.000	Rp3.800.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p>
117	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam Kondisi Baik	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	.1 KEGIATAN	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p>
118	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam Kondisi Baik	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 KEGIATAN					Rp25.000.000					Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 4</p>
119	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam Kondisi Baik	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4	3	6	4	7	Rp540.000.000	Rp405.000.000	Rp810.000.000	Rp540.000.000		Kota Lhokseumawe	PUPR	PIHAK KETIGA DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
120	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Kelompok Tani	Terlaksananya program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe	DKPPP		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
121	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.3.06 Pengawasan Penataan Ruang	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	1.03.12.3.06.0001 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp24.000.000	Rp26.000.000	Rp28.000.000	Rp30.000.000	Rp32.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
122	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana sebagai fokus kerja masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe dan partner pentahelix lainnya	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 9  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2
<b>Isu Strategis 3 : Belum optimalnya sistem informasi, diklat dan logistik kebencanaan</b>																						
123	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	Diskominsa, DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
124	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	Diskominfo	BPBD & Bag. Hukum Setdako	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3
125	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe	Diskominfo	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 7  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
126	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Optimalisasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi kebencanaan terintegrasi.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota"	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota"	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
127	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terciptanya modul diklat penanggulangan bencana yang sesuai standar dan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BNPB, BPBA, Tenaga Ahli, dan OPD lainnya	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
128	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terciptanya kurikulum pelatihan khusus untuk petugas kebencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Lhokseumawe	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Semua OPD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4 Prioritas 7  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
129	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BKPSDM	APBK dan sumber pendanaan lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
130	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Semua OPD terkait & Forkopimda	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
131	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.2.02.0012 "Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam"	50 kk	50 kk	50 kk	50 kk	50 kk	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
132	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DMPG, SAR, PMI, RAPI, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3                      Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3                      Prioritas 4                      Prioritas 5                      Prioritas 6                      Prioritas 7                      Prioritas 8                      Prioritas 9                      Prioritas 10                      Prioritas 11                      Prioritas 12</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 3                      Prioritas 4</p>
133	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 "Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana"	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BNPB, BPBA, BKPSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b>                      Prioritas 2                      Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 4                      Prioritas 5                      Prioritas 6                      Prioritas 7                      Prioritas 10</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b>                      Prioritas 4</p>
134	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 "Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana"	Bimbingan Teknis PascaBencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0008 "Bimbingan Teknis PascaBencana Kabupaten/ Kota"	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	BKPSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<p><b>Sendai Framework 2015-2030</b>                      Prioritas 1                      Prioritas 2                      Prioritas 4</p> <p><b>RIPB Periode II : 2025-2029</b>                      Prioritas 3                      Prioritas 6                      Prioritas 7                      Prioritas 10                      Prioritas 11</p> <p><b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b>                      Prioritas 2                      Prioritas 4</p>

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
135	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.01.0007 "Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran"	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BKPSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4
136	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan JabatanFungsional Analisis Kebakaran	1.05.04.2.01.0016 "Penyelenggaraan JabatanFungsional Analisis Kebakaran"	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BKPSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4
137	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	1.05.04.2.01.0019 "Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga"	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4
138	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
139	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0002 "Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran"	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	DPMG, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4
140	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05 "Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia"	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	BPKSDM	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4
141	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	BPBD, BMKG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
142	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparaturnya/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp175.000.000	Rp175.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	BPBD, BMKG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
143	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	BPBD, BMKG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
144	1.01.02 Program Pendidikan	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Kota Lhokseumawe	Dinas PK	BPBD, BMKG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
145	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.02 "Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota"	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	68 Desa Di Kota Lhokseumawe	DINAS SOSIAL	KECAMATAN DAN GAMPONG	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
146	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.02 "Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota"	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Kota Lhokseumawe	DINAS SOSIAL	TAGANA KOTA LHOKEUMAWA	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
147	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1.06.06.3.02 "Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota"	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.3.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	10 Orang	15 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	TAGANA KOTA LHOKEUMAWA	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
148	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD, Dishub, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
149	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	68 gampong	68 gampong	68 gampong	68 gampong	68 gampong	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DPMG	BPBD	APBD	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
150	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.02 "Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota"	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.04.02.2.02.0001 "Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana"											Kota Lhokseumawe	PUPR	BPBD, KECAMATAN	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
151	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota											Kota Lhokseumawe	Disporapar	BPBD, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
152	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan terwujudnya Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB)	Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											Kota Lhokseumawe	Dinkes	stakeholder	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
153	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana											Kota Lhokseumawe	PUPR	BPBD, KECAMATAN	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
154	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Terlaksananya pelatihan rutin yang sesuai standar untuk para pihak: aparatur/petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator											Kota Lhokseumawe	PUPR	-	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
155	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 "Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana"	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	PUPR, DPMG, Kecamatan, DLH	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
156	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 "Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana"	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.03.0009 "Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota"	1000 paket	1000 paket	1000 paket	1000 paket	1000 paket	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe, Seluruh Kecamatan, Seluruh Gampong	BPBD	Dinsos	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 10  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
157	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 "Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana"	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	1.05.03.2.04.0010 "Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota"	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe, seluruh kecamatan, seluruh gampong	BPBD	Semua OPD terkait	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
158	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01 "Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota"	Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	1.500 Orang	1.300 Orang	800 Orang	750 Orang	800 Orang	Rp. 300.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 220.000.000	Rp. 230.000.000	Rp.280.000.000	KOTA LHOKEUMAWA	DINAS SOSIAL	BPBD, KECAMATAN, APARATUR GAMPONG/DESA	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 7  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
159	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Terlaksananya sistem logistik yang terpadu.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	1.500 Orang	1.300 Orang	800. Orang	750 Orang	800 Orang	Rp.600.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 480.000.000	Rp. 460.000.000	Rp 560.000.000	KOTA LHOKSEUMAWE	DINAS SOSIAL	BPBD, KECAMATAN, APARATUR GAMPONG/DESA	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 7 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 4
<b>Isu Strategis 4 : Belum sinergisnya pelaksanaan pembangunan berbasis kelestarian lingkungan/ekologis untuk pembangunan berkelanjutan</b>																						
160	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terintegrasinya prinsip dan aksi berbasis kelestarian lingkungan / ekologis dalam setiap perencanaan pembangunan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan				Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
161	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Perencanaan tata ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
162	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Perencanaan tata ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.3.05 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Lingkungan Kabupaten/ Kota	1.03.12.3.05.0001 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Lingkungan Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp24.000.000	Rp26.000.000	Rp28.000.000	Rp30.000.000	Rp32.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4 <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11 <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
163	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Perencanaan tata ruang berbasis PRB dan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.4.05 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Lingkungan Kabupaten/ Kota	1.03.12.4.05.0001 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Lingkungan Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp24.000.000	Rp26.000.000	Rp28.000.000	Rp30.000.000	Rp32.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4
164	2.11.02 Program Perencanaan Longkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah berbasis kebencanaan;	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	2.11.02.2.01.0002Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD, Dishub, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3
165	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Taman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp500.000.000	Rp200.000.000	Rp500.000.000	Rp200.000.000	Rp500.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD, Dishub,	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3
166	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Taman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung		
167	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Taman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
168	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	-	1 Kegiatan	-	-	-	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Kota Lhokseumawe	Disporapar	BPBD, DLHK	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 2 Prioritas 4
169	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	1 Kegiatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Kota Lhokseumawe	Disporapar	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4
170	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	-	1 Kegiatan	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Kota Lhokseumawe	Disporapar	BPBD, Diskominfo, Kecamatan	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan (SPM)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan (SPM)	Target Tahun ke					Prakiraan Pagu Indikatif tahun ke					Lokasi	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Pola Kontribusi											
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Instansi Utama	Instansi Pendukung													
171	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan remediasi	Pelaksanaan remediasi	1 Kegiatan			1 Kegiatan			1 Kegiatan			Rp100.000.000		Rp100.000.000			Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD, Dishub, TNI/Polri	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4						
172	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			Rp100.000.000		Rp100.000.000			Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2						
173	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIANPENC EMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau, ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Kabupaten/ Kota					1 Kegiatan		1 Kegiatan					Rp100.000.000			Rp100.000.000	Kota Lhokseumawe	DLH	BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 3 Prioritas 4  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 4 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 3 Prioritas 4						
174	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Meningkatnya Mitigasi Bencana dan Resiliensi terhadap bencana perubahan iklim di Kota Lhokseumawe	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			Rp24.000.000		Rp26.000.000			Rp28.000.000			Rp30.000.000			Rp32.000.000	Kota Lhokseumawe	PUPR		APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya	<b>Sendai Framework 2015-2030</b> Prioritas 1  <b>RIPB Periode II : 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 6 Prioritas 8 Prioritas 10 Prioritas 11  <b>DRAFT RENAS PB 2025-2029</b> Prioritas 1 Prioritas 2

